ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Fendy Irmansyah

No. Mahasiswa : 07312418

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Fendy Irmansyah

No. Mahasiswa : 07312418

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Study Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk

mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi

Pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Fendy Irmansyah

No. Mahasiswa : 07312418

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 20 JUNI 2014

Penyusun,

(Fendy Irmansyah)

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Study Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : Fendy Irmansyah

No. Mahasiswa : 07312418

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 20/06/2014

Dosen Pembimbing,

Mahmudi, S.E., M.Si

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pemungutan Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)

Disusun Oleh : **Fendy Irmansyah**
Nomor Mahasiswa : **07312418**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 8 Juli 2014

Penguji/ Pembimbing Skripsi: Mahmudi, , S.E., M.Si., Ak, CA, CMA

Penguji : Marfuah, Dra., M.Si., Ak., Cert. SAP, CA

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si

MOTTO HIDUP

- *“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan hanya pada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap “ (Q.S Al-Insyirah : 6-8)*

- *“Titik balik dalam proses menuju kedewasaan adalah saat kita menemukan dalam diri kita kekuatan inti yang bisa mengatasi semua rasa sakit” (Max Lerner)*

- *“Kegagalan adalah penundaan, bukan kekalahan. Kegagalan adalah jalan memutar bukan jalan buntu” (William Arthur)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmat serta hidayah Nya kepadaku dan yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan kebesaran Nya.

Nabi Muhammad SAW sang pembimbing umat

Hormat dan baktiku kepada Ayahanda Isbiyanto dan Ibunda Martinah

Kakak ku, Novia Tinna Wijayanti

Semua keluarga besarku

Sahabat-sahabatku tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW.

Skripsi yang berjudul **"Analisis Pemungutan Pajak Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Study Empiris di Kabupaten Sleman) "** ini disusun guna melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana (S1) Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga tersusun skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak selaku dosen penguji
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
4. Ayahanda Isbiyanto dan Ibunda Martinah yang selalu mendoakanku, memberikan ku kasih sayang yang tak bisa diukur dengan materi, memberikan nasehat-nasehat yang berharga, bimbingan, arahan, serta motivasi dalam setiap langkah hidupku.
5. Kakakku, Novia Tinna Wijayanti terimakasih atas perhatiannya selama ini, meskipun kita sering berantem.
6. Qory Uyun Titaria, makasih ya uda selalu ada buat aku, selalu bantu, dan semangatin aku selama ini... Makasih banget..

7. Semua masalah yang datang silih berganti dalam hidupku yang telah menjadi guru terbaikku dan telah mendewasakanku.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu yang uda membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme..... iii

Halaman Pengesahaan iv

Pernyataan Brita Acara Ujian Skripsi v

Halaman Motto vi

Halaman Persembahan viii

Kata Pengantar xii

Daftar Isi x

Daftar Tabel xii

Daftar Lampiran xiv

Abstrak xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

1. Tujuan Penelitian 9

2. Manfaat Penelitian 10

D. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 13

A. Kajian Pustaka 13

B. Landasan Teori..... 15

1. Pendapatan Asli Daerah 15

2. Pajak Daerah 17
3. Evaluasi Pajak Daerah 27
4. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 31
C. Kerangka Berpikir 43
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Jenis Penelitian..... 45
B. Tempat dan Waktu Penelitian..... 45
1. Tempat Penelitian 45
2. Waktu Penelitian 45
C. Subjek dan Objek Penelitian..... 45
1. Subjek Penelitian 45
2. Objek Penelitian 45
D. Sumber Data Penelitian 46
E. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 46
1. Jenis Data 46
2. Metode Pengumpulan Data 47
F. Variabel dan Definisi Operasional Variabel..... 47
1. Efisiensi 48
2. Efektivitas 48
3. Kontrbusi 48
G. Teknik Analisis Data..... 49
1. Efisiensi 49
2. Efektivitas 50
3. Kontribusi 51
4. Perbandingan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 52
5. Tingkat Kemandirian Daerah 52
6. Sektor-sektor Pajak Daerah yang Berpotensi untuk Dikembangkan 55

BAB IV ANALISIS DATA 56

A. Deskripsi Data Penelitian 56

1. Analisis Efisiensi 56

2. Analisis Efektivitas 59

3. Analisis Kontribusi 61

4. Perkembangan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 63

5. Tingkat Kemandirian Daerah 66

6. Sektor-Sektor Potensial dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 71

B. Hasil dan Analisis 73

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 84

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1. Kategori Efisiensi 49

Tabel 3.2. Kategori Efektivitas 50

Tabel 3.3. Kategori Kontribusi 51

Tabel 3.4. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah..... 53

Tabel 4.1. Tingkat Efisiensi Pajak Daerah 58

Tabel 4.2. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah 60

Tabel 4.3. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah 62

Tabel 4.4. Data Realisasi Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Sleman 63

Tabel 4.5. Perkembangan Pajak Derah dan PAD dengan Angka Indeks Berantai 64

Tabel 4.6. Tingkat Kemampuan Daerah Kabupaten Sleman dengan Derajat Otonomi Fiskal 67

Tabel 4.7. Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten Sleman 69

Tabel 4.8. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Sleman 71

Tabel 4.9. Rasio Kontribusi Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah 72

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Surat Izin Penelitian 85

Surat Selesai Penelitian 86

Daftar Uraian Realisasi Anggaran tahun 2008-2013 (Bagian Pembiayaan) ... 87

Daftar Laporan Realisasi Anggaran tahun 2008-2012 124

Daftar Feedback Pendapatan Asli Daerah tahun 2008-2013 133

Hasil Perhitungan Biaya Pemungutan Pajak 143

Hasil Perhitugan Efisiensi, efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah..... 149

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)

Fendy Irmansyah
NIM. 07312418

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, (2) untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, (3) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, (4) untuk mengetahui perbandingan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2008 – 2013, (5) untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, dan (6) untuk mengetahui sektor-sektor pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013.

Penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menitik beratkan pada BPKKD dan DISPENDA Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan mencakup rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kontribusi, perbandingan pajak daerah dan pendapatan asli daerah, tingkat kemandirian daerah, serta perhitungan sektor-sektor pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Hasil perhitungan mengenai tingkat efisiensi pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah adalah sebesar 5.85% dengan kategori efisien. Hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah adalah sebesar 119.69% dengan kategori sangat efektif. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2008 sampai dengan 2013 adalah sebesar 53.62% yang termasuk dalam kategori cukup. Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami peningkatan. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman terhadap pemerintah pusat cukup tinggi, dan belum memperlihatkan kecenderungan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sektor dari pos pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB.

Kata kunci: efisiensi, efektivitas, kemandirian daerah, pajak daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya merupakan tuntutan dari globalisasi yang melanda di seluruh dunia. Dengan adanya globalisasi, setiap daerah sudah seharusnya dapat diberdayakan dengan diberikan kewenangan yang lebih luas dan lebih nyata. Setiap daerah tentunya juga dituntut untuk bertanggung jawab untuk menjalankan urusan dan kegiatan pemerintahannya masing-masing. Salah satu faktor yang tidak dapat dilepaskan dari otonomi daerah adalah pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah menginsyaratkan bahwa otonomi daerah secara resmi diberlakukan mulai pada tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah ini telah dikaji sebelumnya. Pengkajian atas kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, kabupaten/kota, dan desa telah dilaksanakan jauh sebelum otonomi daerah dilaksanakan. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi daerah yang luas, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penegasan semangat otonomi daerah semakin nyata dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah mencoba mengatasi beberapa kelemahan materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dibuat secara “darurat” menanggapi tuntutan reformasi (Halim dan Damayanti, 2007: 2).

Asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi yang dianut sistem pemerintahan Republik Indonesia perlu dilaksanakan secara bersama-sama. Otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan asas desentralisasi tersebut. Dalam otonomi daerah dibentuk daerah otonom yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Pembentukan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Asas desentralisasi menjadi lambang akan adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah yang akan mengembalikan kemandirian pemerintah dan masyarakat daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah. Sejalan dengan hal itu, pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenagan untuk mengurus kepentingan pemerintahan di daerah. Pemerintahan di daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini hanya berperan sebagai pengawas dan penilai.

Menurut Kaho (2003: 5), Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang didesentralisasikan. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi perlu diterapkan karena akan membawa efektivitas dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan wilayah Negara itu pada umumnya terdiri pada berbagai satuan daerah yang masing-masing memiliki sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis seperti halnya keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, bahasa, tingkat pendidikan atau pengajaran, dan sebagainya. Pemerintahan dapat efektif kalau sesuai dengan keadaan riil dalam negara.

Otonomi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentunya memiliki visi tersendiri. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama, yaitu: (1) politik, (2) ekonomi, (3) sosial dan budaya. Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Hal ini memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya

berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial. Selain itu, pada saat yang sama otonomi daerah juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Pelaksanaan otonomi daerah tentunya juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan masyarakat di daerah dalam berbagai bidang, terutama dengan adanya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Dengan adanya asa tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat dan kerjasama pembangunan di daerah semakin meningkat.

Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah

tangganya sendiri. Agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, perlu ada sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat diartikan bahwa pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Ketergantungan yang sangat besar dari daerah kepada pemerintah pusat telah menyebabkan kreatifitas dalam mengelola sumber-sumber ekonomi tidak dapat berkembang secara optimal. Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pusat pada satu sisi dan rendahnya peranan pendapatan daerah di sisi lain membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Kondisi seperti ini tentu saja dapat menyulitkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi secara nyata.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom, tidak dapat terlepas dari persoalan pembiayaan dan penganggaran. Kemampuan keuangan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Pendapatan daerah yang merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah masih terbilang rendah di sebagian besar daerah di Indonesia. Pemerintah daerah seharusnya mampu memanfaatkan sumber dan potensi keuangan yang dimiliki, serta mengadakan usaha menggali sumber-sumber keuangan guna meningkatkan pendapatan daerahnya. Kemampuan mengejar peluang yang ada dan membudayakan potensi alam setempat menjadi hal penting untuk meningkatkan pendapatan. Usaha ini dinilai dapat berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pilar pokok kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan daerah terdisi atas tiga komponen, yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) pendapatan transfer, dan (3) pendapatan lain-lain yang sah (Mahmudi, 2007: 67). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD. Hal ini terjadi karena PAD dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (*non*-PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan PAD diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicantumkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan (d) lain-lain pendapatan daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman daerah, dan (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pajak merupakan salah satu komponen PAD yang harus dikembangkan.

Pengembangan terhadap sumber-sumber PAD dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Salah satu sumber PAD adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai

kesejahteraan umum. Di Indonesia, Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, suatu daerah harus mampu meningkatkan kemandirian dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini dapat juga diartikan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang harus dikembangkan karena dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemandirian dan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah.

Kabupaten Sleman juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sedang berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah seperti halnya pajak daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu sumber yang dimanfaatkan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam upaya peningkatan tersebut adalah melalui upaya peningkatan pajak daerah yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Mengingat besarnya peranan kebijakan mengenai pelaksanaan otonomi daerah dalam memacu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah, maka pembahasan yang lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kemandirian Kabupaten Sleman juga perlu dilakukan, khususnya setelah penetapan otonomi daerah. Tingkat kemandirian itu sendiri dapat dilihat dari derajat otonomi fiskal serta konstribusi pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber yang dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya tersebut adalah melalui pajak daerah. Pajak daerah tentunya juga memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Sleman. Dengan pemungutan pajak yang efektif dan efisien, diharapkan PAD Kabupaten Sleman dapat mengalami peningkatan. Mengingat pentingnya pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka pembahasan secara mendalam tentang efisiensi dan efektivitas, serta kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Sleman perlu dianalisis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini agar memiliki nilai-nilai ilmiah adalah sebagai berikut.

a. Bagaimanakah tingkat efisiensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013?

b. Bagaimanakan tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013?
c. Seberapa besarkah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013?
d. Bagaimana perbandingan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2008 – 2013?
e. Bagaimana tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013?
f. Sektor-sektor pajak daerah apakah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini, maka tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013?
b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013?
c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013?
d. Untuk mengetahui perbandingan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2008 – 2013.

e. Untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013.

f. Untuk mengetahui sektor-sektor pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu ekonomi, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas pajak daerah, serta kontribusinya terhadap PAD.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pemungutan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah.

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai hasil dari penerapan teori, dan untuk menambah wawasan pemikiran khususnya mengenai

efisiensi dan efektivitas pajak daerah, serta kontribusinya terhadap PAD.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada bab ini peneliti membahas tentang uraian kajian pustaka dan landasan teori yang mendasari tentang Penerimaan Asli Daerah, pajak daerah, dan evaluasi pajak.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini merupakan uraian tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V : Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan topik penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan mengetahui keaslian karya ilmiah. Pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal, akan tetapi pada umumnya telah ada acuan yang mendasarinya. Hal ini, bertujuan sebagai titik tolak untuk mengadakan suatu penelitian. Kajian pustaka dapat bersumber dari makalah, skripsi, jurnal, internet atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Riduansyah (2005) mengadakan penelitian dengan judul "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan pendapatan asli daerah, khususnya pada Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai studi kasus, dan untuk menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata

kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun.

Fatchanie (2007), melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Sleman". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak parkir sebenarnya di Kabupaten Sleman, mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman, mengetahui jumlah pendapatan Pemerintah Daerah dari Pajak Parkir dengan dasar temuan potensi pajak parkir di Kabupaten Sleman, dan mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas praktik pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman selama ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman masih dibawah potensi sebenarnya. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh DPKAD Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien, sedangkan tingkat efektivitasnya masih berfluktuatif atau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan berhubungan dengan efisiensi, efektivitas, dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada di Kabupaten Sleman. Dengan perbedaan tersebut maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

2. Landasan Teori

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah. Menurut Devas, *et al*. (1999), kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 ditegaskan bahwa:

> "Kebijakan desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah".

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke daerah baik melalui perluasan basis pajak (*taxing power*) maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa telah diberikan kewenangan kepada daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan

sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran, yang didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, istilah tentang kemandirian daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada pada suatu daerah sampai sejauh mana kekayaan dan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan di daerah tersebut, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1) Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan lain-lain.

2) Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain.
3) Hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga, dan lain-lain.
4) Lain lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dan lain-lain.

b. Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi berbeda-beda tentang pajak. Namun demikian definisi-definisi tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal dari negara yang langsung dapat dituju dan yang digungkan untuk membiayai pengeluaran umum (Munawir, 1998: 3).

Pajak dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Situasi yang pertama adalah berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, dan situasi yang kedua adalah bertambahnya kemampuan keuangan

negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (1992), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Sementara pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan pengertian pajak sebagaimana kutipan berikut.

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari berbagai definisi tentang pajak tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pajak sebagaimana berikut.

a) Iuran masyarakat kepada negara, dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara.

b) Berdasarkan Undang-Undang, dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun dalam peiaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat melalui Undang-Undang.

c) Tanpa jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dari negara, dalam arti bahwa jasa timbal balik atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.

d) Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

2) Fungsi dan Syarat Pemungutan Pajak Daerah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Negara membutuhkan biaya dalam menjalankan tugas-tugas rutin dan melaksanakan pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk

pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif.

d) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a) Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

b) Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi; pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, yaitu:

(1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.

(2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.

(3) Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak.

c) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemungutan pajak yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d) Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Hal ini untuk menjamin bahwa pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Tata cara pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

3) Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak (Brotodiharjo, 1991: 2). Teori-teori tersebut diuraikan sebagaimana berikut.

a) Teori Asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya, baik keselamatan jiwa maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

b) Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, seperti perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

4) Asas Pengenaan Pajak

Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat

beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah sebagai berikut.

a) Asas Domisili (*Domicile/Residence Principle*)

Berdasarkan asas ini, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

c) Asas Kebangsaan (*Nationality/Citizenship Principle*).

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal tidaklah menjadi persoalan. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

5) Pengelompokan Pajak

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah antara lain adalah Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Air Bawah Tanah. Beberapa pengelompoan pajak adalah sebagai berikut.

a) Menurut Sifat

Apabila ditinjau dari sifatnya, maka pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

(1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

(2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b) Menurut Lembaga Pemungutan

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, maka pajak terbagi atas:

(1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

(2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

c) Menurut Golongan

Berdasarkan pembebanannya pajak dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

(1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya pajak seorang pengusaha dibayarnya dari bagian pendapatan atau labanya sendiri. Pada pokoknya jenis pajak ini tidak dapat menaikkan harga. Pajak langsung dikenakan kepada seseorang secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya tiap tahun atau tiap bulan, yang ditagih dengan suatu ketetapan pajak. Pajak yang termasuk pada golongan pajak langsung adalah Pajak Penghasilan, Pajak Gaji dan Upah, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan, Pajak Deviden dan Pajak Rumah Tangga.

(2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan harga, karena ditanggung oleh pembeli dan pajak tersebut baru terhutang jika terjadi hal-hal yang menyebabkan terhutang pajak. Pajak yang termasuk dalam golongan pajak tidak langsung adalah Pajak Penjualan, Pajak Pembangunan, Pajak Bea

dan Cukai. Pada dasarnya pajak tidak langsung sudah dimasukkan dalam harga barang, tetapi konsumen tidak menyadari bahwa sebenarnya ia juga membayar pajak.

c. Evaluasi Pajak Daerah

1) Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input* (Mahmudi, 2007: 17). Suatu organisasi apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). Berkaitan dengan pajak, pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, *et al*., 1999: 21). Biaya pemungutan didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh dinas terkait.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan, agar pajak yang diterima tidak lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Biaya pemungutan pajak yang dimaksud adalah jumlah dari biaya pendaftaran, pendataan, dan penetapan besarnya pajak terutang, serta biaya penagihan. Sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai. Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan

ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak (Devas, *et al*., 1999: 21). Rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak daerah adalah (Halim, 2004: 56):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Peneriman pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien. Dari metode Devas (1999), maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

a) Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
b) Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
c) Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien.

2) Efektivitas

Efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Devas, *et al*., 1999: 22).

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan

(Mardiasmo, 2002: 26). Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely* (Mahmudi, 2007: 19). Rumus pengukuran efektivitas untuk pemungutan pajak adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 56):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori, yaitu:

a) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
b) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90%-100% berarti efektif.
c) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80%-90% berarti cukup efektif.
d) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60%-80% berarti kurang efektif.

e) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

3) Kontribusi

Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya, berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu juga sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil bearti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 59):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\Sigma \text{ Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\Sigma \text{ Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Sesuai dengan konsep yang menitik beratkan pada retribusi daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka secara teoritis tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dievaluasi. Pada penelitian ini,

faktor-faktor efisiensi, efektivitas dan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur melalui rasio efsiensi, rasio efektivitas dan margin kontribusi. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efisiensi, efektivitas dan kontribusi retribusi daerah pada Kabupaten Sleman.

d. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Desentralisasi Fiskal

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban, dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Penerapan pembagian dana perimbangan meliputi bagi hasil atas penerimaan PBB, BPHTB dan SDA, DAU dan DAK akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan baik dari segi jumlah dana maupun dari segi mekanisme pengalokasian dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan ke daerah melalui APBN. Transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan diperkirakan akan menyebabkan peranan pengelolaan fiskal pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintah secara umum akan semakin berkurang. Sebaliknya, proporsi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam. Perubahan ini

akan tampak apabila dibandingkan dengan alokasi dana ke daerah pada tahun 2000 yang meliputi dana rutin dan dana pembangunan.

Perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung akan turut berpengaruh terhadap manajemen kebijakan fiskal. Semakin besar dana yang ditransfer ke daerah, semakin terbatas jumlah dana yang ditransfer ke daerah, semakin terbatas jumlah dana yang dapat dialokasikan bagi kegiatan pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah daerah akan memperoleh ruang gerak yang lebih luas untuk berperan dalam menentukan formulasi yang diperoleh dari hak otonomi dan desentralisasi.

b. Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur hal-hal yang berkenaan dengan keuangan negara dan daerah utamanya bagi hasil penerimaan negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD). Dana perimbangan yang terdiri dari PBB, BPHTB, SDA, DAU, dan DAK. Dana perimbangan terdiri dari:

1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam
2) Dana Alokasi Umum
3) Dana Alokasi Khusus

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Penerimaan negara dari BPHTB 20% untuk pemerintah pusat dan untuk daerah. 10 % penerimaan PBB dan

20% penerimaan BPHTB yang menjadi bagian dari pemerintah pusat dan 90% dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

Dana Alokasi Umum, ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terjadi perubahan kewenangan di antara daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota, persentase Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupatenAota disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah provinsi yang bersangkutan. Porsi daerah provinsi yang bersangkutan merupakan proporsi bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan:

1) kebutuhan wilayah otonomi daerah

2) potensi otonomi daerah

Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu biaya kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dari APBN. Kebutuhan khusus itu adalah:

1) kebutuhan yang tidak bisa diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau
2) kebutuhan yang merupakan komitmen yang berasal atau prioritas nasional

Dana Alokasi Khusus termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Dana reboisasi dibagi dengan perimbangan:

1) 40% dibagikan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus
2) 60% untuk pemerintah pusat

Kecuali dalam rangka reboisasi, daerah yang mendapat pembiayaan kebutuhan khusus, menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan.

1) Dana Bagi Hasil

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, jenis penerimaan yang dibagihasilkan diperluas, sehingga meliputi bagi hasil atas penerimaan SDA yang terdiri dari penerimaan minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan penerimaan pajak yang terdiri dari PBB dan BPHTB.

Melalui bagi hasil penerimaan negara tersebut, diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan daerah merasakan bahwa haknya atas pemanfaatan SDA yang dimiliki masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dengan sistem pembagian yang didasarkan atas daerah asal *(by origin)*, sebagian penerimaan yang diperoleh dari daerah penghasil harus diberikan dan dinikmati oleh daerah penghasil yang bersangkutan.

Dapat dimaklumi, pembagian hasil penerimaan pajak dan SDA tersebut yang berdasarkan daerah asal itu cenderung menimbulkan terjadinya ketimpangan antara daerah. Hal ini disebabkan hanya beberapa daerah saja yang memiliki SDA yang signifikan, seperti minyak bumi, gas alam, dan kehutanan, sedangkan daerah lain tidak memilikinya. Begitu pula dengan potensi penerimaan daerah dari PBB, BPHTB, dan PPh perseorangan. Oleh sebab itu, peranan DAU menjadi sangat strategis untuk dapat menciptakan keseimbangan dan pemerataan antar daerah secara menyeluruh.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat kepada daerah yang bersifat *block grant* yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya Dana Alokasi Umum ditetapkan minimal 25% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN). PDN yang akan dibagihasilkan kepada daerah adalah

PDN netto, yaitu PDN bruto dikurangi dengan penerimaan yang telah dibagihasilkan termasuk dana reboisasi.

DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan Pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus termasuk di dalamnya 40% dari dana reboisasi. Berbeda dengan dana bagi hasil dan DAU, kewenangan dalam pengalokasian DAK relatif terbatas karena.dana tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu *(earmaking)* termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya

dengan menggunakan rumus DAU, serta pembiayaan proyek yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usul kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan oleh daerah kepada Menteri Teknis, sedangkan pengalokasian DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis/Instansi yang terkait yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Untuk memperoleh DAK, daerah diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping minimal 10% dari total yang diajukan yang disediakan dari APBD.

4) Pinjaman Daerah

Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya di samping itu daerah pun dapat melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk membayar kembali pinjaman itu, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah. Pinjaman daerah tersebut dilakukan dengan persetujuan DPRD dengan memperhatikan kemam-puan daerah untuk memenuhi kewajibannya. Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh daerah diumumkan

dalam Lembaran Daerah, agar setiap orang dapat mengetahuinya. Daerah dilarang melakukan pinjaman daerah yang menyebabkan terlampauinya batas jumlah pinjaman yang ditetapkan. Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan sehingga mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah atas pinjaman daerah merupakan salah satu prioritas dalam pengeluaran APBD. Apa-bila daerah tidak memenuhi kewajiban 'pembayaran atas pinjaman daerah dari pemerintah, pemerintah dapat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan DAU kepada daerah. Pelaksanaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).

5) Dana Darurat

Dalam hal untuk keperluan yang mendesak kepada daerah tertentu diberikan dana darurat yang berasal dari APBN. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

6) Keterlibatan Swasta

Sekalipun diproyeksikan terjadi peningkatan kemampuan keuangan dan makin besar diskresi daerah dalam bidang anggaran, kita dihadapkan semakin banyaknya fungsi pemerintahan yang

dimiliki oleh daerah, akan terdapat keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam penyediaan prasarana dan pemberian layanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan *paradigms good governance* dan *reiventing government* dalam penyediaan prasarana dan pemberian layanan dapat melibatkan sektor swasta dan komunitas setempat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan dan keadilan bagi masing-masing pihak termasuk DPRD.

Perlu dipahami, bahwa keterlibatan sektor swasta dan komunitas dalam pembangunan dan pelayanan yang bersifat lokalitas memiliki perbedaan yang sangat penting. Sektor swasta berorientasi pada mencari keuntungan, sehingga perilakunya dipandang sebagai *selfish.* Sedangkan komunitas berorientasi pada nirlaba *(nonprofit)*, sehingga pelakunya dipandang sebagai kolektivitas. Dengan ikut serta keterlibatan sektor swasta dan komunitas tersebut, beban pemerintah daerah menjadi berkurang. Peran pemerintah daerah tidak lagi sebagai pemberi pelayanan, tetapi sebagai pembenar pelayanan. Oleh sebab itu, organisasi pemerintah daerah tidak perlu bengkak dan berjenjang atau hierarkis.

Dalam kehidupan demokratis dengan keterlibatan dan peran serta masyarakat, kecenderungan pergeseran dari demokrasi perwakilan ke peran serta demokrasi. Dalam konteks inilah, peran komunitas dalam penyelenggaraan otonomi, baik dalam formulasi maupun implementasi

kebijakan dapat beragam sesuai dengan saluran-saluran (kran) yang dapat dibuka oleh lembaga-lembaga pemerintahan setempat.

c. Derajat Desentralisasi dan Tingkat Kemandirian Daerah

Menurut Halim (2004: 187), ciri utama suatu daerah raampu melaksanakan otonomi adalah:

1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,

   mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,

   mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

4) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus raenjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat otonomi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Reksohadiprodjo (2000: 155) derajat otonomi fiskal daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut.

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} x100\%$$

$$DOP = \frac{BHD}{TPD} x100\%$$

$$DOB = \frac{B}{TPD} x100\%$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

B = Subsidi ataii Bantuan yang diterima Pemda

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan derajat otonomi fiskal menurut Halim (2004: 188 - 189) dapat dibedakan menjadi empat macam klasifikasi daerah, yaitu:

1) Apabila tingkat kemandirian antara 0% - 25%, maka daerah tergolong kurang atau tidak mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat lebih banyak memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah.
2) Apabila tingkat kemandirian antara 25,1% - 50%, maka daerah tergolong sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan konsultatif yaitu sudah mulai berkurangnya pengarahan atau campur tangan pemerintah pusat karena kemampuan daerah meningkat.
3) Apabila tingkat kemandirian antara 50,1% - 75%, daerah tergolong mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah pusat semakin berkurang dalam memberi pengarahan mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi.
4) Apabila tingkat kemandirian antara 75,1% -100%, maka daerah tergolong mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan delegatif, dimana pemerintah pusat sudah mengurangi atau meniadakan campur

tangan dalam mengurus urusan otonominya karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu untuk mandiri.

3. Kerangka Berpikir

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daeah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan restribusi daerah. Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaran bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah, parkir, sarang burung wallet, dan pajak reklame.

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari Sumber Daya Alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari Sumber Daya Alam

merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah dalam menghasilkan PAD. Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting/potensial dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan penerapan konsep yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah akan mengatur secara pasti pengalokasian dana perimbangan. Dengan demikian, diharapkan daerah akan lebih mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah dapat dikurangi. Sumber penerimaan dalam negeri yang paling dominan dan bisa diandalkan adalah pajak daerah. Dengan dilakukannya pemungutan pajak daerah, maka peranan dan kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah semakin dominan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pemungutan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang. Berdasarkan karakteristik masalahnya, maka penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Indriantoro dan Supomo, 2002: 26).

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menitik beratkan pada DPKAD dan DISPENDA Kabupaten Sleman.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam suatu kurun waktu, yakni pada bulan November 2013 sampai dengan Februari 2014.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek yang akan diteliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

b. Objek Penelitian

Adapun objek yang akan diteliti adalah data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menitik beratkan pada DPKAD dan DISPENDA Kabupaten Sleman. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi secara langsung pada DPKAD dan DISPENDA Kabupaten Sleman. Data yang dikumpulan antara lain laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman serta catatan atas biaya pemungutan pajak. Biaya pemungutan didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Adapun periode dari data yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2007 sampai dengan 2012.

5. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Sumber data penelitian adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data (Indriantoro dan Supomo, 2002: 146). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data dalam berbentuk angka. Apabila ditinjau dari sumber data, maka data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang dikumpulkan penulis antara lain berupa bukti, catatan atau laporan keuangan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter)

yang telah dipublikasikan. Data sekunder tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman serta catatan atas biaya pemungutan pajak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang didokumentasikan dari DPKAD dan DISPENDA Kabupaten Sleman.

b. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, peneliti memperoleh informasi dari responden atau subjek penelitian dalam bentuk laporan tentang hal-hal atau pribadinya yang diketahui (Arikunto, 2010: 139). Dalam mengumpulkan data atau informasi tersebut digunakan metode atau teknik yang telah diatur sehingga pengumpulan data penelitian dapat dilakukan secara terarah. Adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang antara lain berupa memo atau dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis dari instansi yang bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian ini. Data dokumentasi yang diperukan pada penelitian ini antara lain adalah gambaran umum tentang Kabupaten Sleman dan data menganai laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

6. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel pada penelitian ini adalah 3 (tiga) faktor yang merupakan rasio dari penerimaan pajak terhdap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut.

a. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Sehingga yang dimaksud dengan efisiensi pada penelitian ini adalah tingkat perbandingan antara biaya dan penerimaan pajak daerah.

b. Efektivitas

Efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga efektivitas dalam penelitian ini diartikan sebagai perbandingan antara realisasi penerimaan dan target atau potensi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan atau sesuatu yang diberikan bersama-sama antara suatu pihak dengan pihak lainnya untuk tujuan pendapatan, biaya, keuntungan dan kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Oleh karena itu, alat analisis yang digunakan merupakan alat analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis dalam bentuk perhitungan angka-angka berdasarkan data yang terkumpul. Adapun alat analisis yang digunakan adalah rumus efisiensi, efektivitas dan rasio kontribusi. Uraian dari masing-masing alat analisis tersebut adalah sebagai berikut.

a. Efisiensi

Rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak daerah adalah (Halim, 2004: 56):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Biaya pemungutan yang dimaksudkan adalah biaya yang dikeluarkan oleh DPKD Kabupaten Sleman dalam rangka pemungutan pajak daerah. Devas, *et al.* (1999) menyatakan bahwa perhitungan tingkat efisiensi dapat diukur dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Kategori Efisiensi

Persentase	Kriteria
kurang dari 20%	sangat efisien
20% - 85%	efisien
lebih dari 85%	tidak efisien

b. Efektivitas

Perhitungan terhadap efektivitas pajak daerah pada penelitian ini dilakukan dengan dua metode. Kedua metode tersebut adalah rasio perbadingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak dan rasio perbadingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap potensi penerimaan pajak. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 54):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasiakan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tingkat efektivitas pajak daerah dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Kategori Efektivitas

Persentase	**Kriteria**
lebih dari 100%	sangat efektif
90% - 100%	efektif
80% - 90%	cukup efektif
60% - 80%	kurang efektif
kurang dari 60%	tidak efektif

c. Kontribusi

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 59):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\Sigma \text{ Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\Sigma \text{ Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah pada periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya, berarti semakin besar pula peranan kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya, jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah disusun ukuran sebagai berikut (Mardiasmo, 2002: 146).

Tabel 3.3.

Kategori Kontribusi

Persentase	**Kriteria**
80% - 100%	sangat besar
60% - 79%	besar
40% - 59%	cukup
20% - 39%	kecil
0% - 19%	Sangat kecil

d. Perbandingan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis perbandingan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

a. Menentukan realisasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
b. Menentukan tahun dasar dari pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang akan dihitung.
c. Menghitung perbandingan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun dengan menggunakan analisis Angka Indeks Berantai (*Chain's Index*). Indeks ini dinyatakan dalam rumus:

$$V_{n,n-1} = \frac{\sum V_n}{\sum V_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$V_{n,n-1}$ = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar n -1

Σ = Jumlah

V_{n-1} = Nilai realisasi pajak daerah dan PAD tahun sebelumnya

V_n = Nilai realisasi pajak daerah dan PAD pada tahun berjalan

e. Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah dihitung dengan langkah-langkah sebagaimana berikut.

a. Menentukan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah.
b. Menghitung Derajat Otonomi Fiskal, yang berguna untuk mengukur

tingkat kemampuan keuangan daerah.

Menurut Reksohadlprodjo (2000: 155), Derajat Otonomi Fiskal Daerah dapat diukur dengan rumus berikut.

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} x100\%$$

$$DOP = \frac{BHD}{TPD} x100\%$$

$$DOB = \frac{B}{TPD} x100\%$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah kemudian diklasifikasikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4.

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemandirian (%) (DOF)	**Kemampuan Daerah**	**Pola Hubungan**
0 - 25	Rendah sekali	Instruktif
25,1 - 50	Rendah	Konsultatif
50,1 - 75	Sedang	Partisipatif
75,1 - 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2004:189)

Keterangan:

a. Apabila tingkat kemandirian antara 0% - 25%, maka daerah tergolong kurang atau tidak mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat lebih banyak memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah.
b. Apabila tingkat kemandirian antara 25,1% - 50%, maka daerah tergolong sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan konsultatif yaitu sudah mulai berkurangnya pengarahan atau campur tangan pemerintah pusat karena kemampuan daerah meningkat.
c. Apabila tingkat kemandirian antara 50,1% - 75%, daerah tergolong mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah pusat semakin berkurang dalam memberi pengarahan mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi.
d. Apabila tingkat kemandirian antara 75,1% -100%, maka daerah tergolong mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan delegatif, dimana pemerintah pusat sudah mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus urusan otonominya karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu untuk mandiri.

f. Sektor-sektor Pajak Daerah yang Berpotensi untuk Dikembangkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis sektor-sektor pajak daerah yang berpotensi untuk dikembagkan adalah sebagai berikut.

a. Menentukan realisasi masing-masing pos pajak daerah dan realisasi total Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah.
b. Menghitung kontribusi dari masing-masing pos pajak daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pos-pos Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 59).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\sum \text{Realisasi Pos-Pos Pajak Daerah}}{\sum \text{Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah}} \text{ x } 100\%$$

c. Mengidentifikasi sektor yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman melalui rasio kontribusi dengan kriteria rasio kontribusi yang lebih dominan dan lebih besar.

BAB IV

ANALISIS DATA

Analisis data merupakan suatu proses pemecahan masalah atau permasalahan agar tujuan penelitian dapat tercapai dan hipotesis dapat terjawab. Untuk itu, dalam proses analisis data diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan objek yang diteliti. Efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Sleman merupakan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan gambaran umum objek penelitian serta hasil-hasil yang diperoleh melalui penelitian.

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Analisis Efisiensi

Efisiensi pajak daerah digunakan untuk mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan pajak daerah. Dengan mengetahui efisiensi pajak, maka pihak Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah mendapat gambaran mengenai kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan pajak daerah di masa yang akan datang, sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan menekan pengeluaran yang tidak perlu. Perhitungan tingkat efisiensi dapat diukur sebagai berikut.

d) Persentase yang dicapai kurang dari 20% dinilai sangat efisien.

e) Persentase yang dicapai antara 20% sampai dengan 85% dinilai efisien.

f) Persentase yang dicapai diatas 85 % berarti tidak efisien.

Data yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak daerah adalah biaya pemungutan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan pajak dan realisasi penerimaan pajak. Biaya pemungutan pajak didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan, agar pajak yang diterima tidak lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Perhitungan efisiensi penerimaan pajak daerah diformulasikan dengan rumus berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.

Tingkat Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	**Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)**	**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)**	**Efisiensi**	**Keterangan**
2008	3,863,769,282.00	61,020,899,130.70	6.33%	Sangat Efisien
2009	5,496,579,250.00	71,044,731,106.66	7.74%	Sangat Efisien
2010	5,494,784,450.00	80,611,542,955.52	6.82%	Sangat Efisien
2011	6,212,179,140.00	142,698,407,280.12	4.35%	Sangat Efisien
2012	8,141,215,000.00	177,835,870,150.47	4.58%	Sangat Efisien
2013	14,936,171,045.00	281,385,141,223.77	5.31%	Sangat Efisien
Rata-Rata Efisiensi Pajak Daerah			**5.85%**	**Sangat Efisien**

Sumber: data diolah (2014)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efsiensi pajak daerah berfluktuasi setiap tahunnya. Tabel 4.1. menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat efisiensi pajak daerah tergolong sangat efisien. Namun demikian, dari hasil analisis pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 dan 2012 rasio efisiensi mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Rasio efisiensi penerimaan pajak daerah pada tahun 2009 menunjukkan persentase yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelum maupun tahun sesudahnya. Kurangnya tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2011 dan 2012 disebabkan biaya pemungutan pajak daerah yang cukup besar dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut. Biaya yang cukup besar ini berasal dari besarnya biaya operasional yang digunakan dalam pemungutan pajak akibat tidak adanya sistem administrasi yang baik pada saat pemungutan pajak. Dengan sistem administrasi yang tidak tertata tersebut seringkali penagihan pajak dilakukan berulang-ulang sehingga menambah biaya operasional pemungutan pajak. Kondisi ini perlu disadari juga tidak sepenuhnya sebagai kurangnya kualitas sistem administrasi, namun perlu diingat bahwa pada tahun tersebut Kabupaten Sleman melakukan beberapa perubahan pada sistem perpajakan. Hal ini juga diperkirakan dapat mempengaruhi sistem administrasi perpajakan Kabupaten Sleman.

Namun demikian, tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun berikutnya meningkat karena adanya perbaikan pada sistem administrasi pemungutan pajak daerah. Selain itu, Kabupaten Sleman juga mulai ditata kembali setelah

perubahan sistem administrasi perpajakan tersebutr. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2013, pajak daerah dapat dikategorikan sangat efisien dengan rata-rata persentase rasio efisiensi sebesar 5,85%.

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan upaya untuk mengerjakan semua pekerjaan secara tepat dengan menggunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan tujuan operasional. Analisis efektivitas dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dengan target dan ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tingkat efektivitas pajak daerah dapat dikategorikan berdasarkan persentase sebagai berikut.

a. Persentase tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
b. Persentase tingkat pencapaian 90% - 100% berarti efektif.
c. Persentase tingkat pencapaian 80% - 90% berarti cukup efektif.
d. Persentase tingkat pencapaian 60% - 80% berarti kurang efektif.
e. Persentase tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Data yang digunakan dalam perhitungan tingkat efektivitas pajak daerah adalah data target dan realisasi pajak daerah pada Kabupaten Sleman tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Untuk menghitung tingkat efektivitas pajak daerah pada Kabupaten Sleman digunakan rumus berikut ini.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak daerah}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas	Keterangan
2008	61,020,899,130.70	49,171,622,443.00	124.10%	Sangat Efektif
2009	71,044,731,106.66	56,350,000,000.00	126.08%	Sangat Efektif
2010	80,611,542,955.52	75,969,096,600.00	106.11%	Sangat Efektif
2011	142,698,407,280.12	122,700,165,400.00	116.30%	Sangat Efektif
2012	177,835,870,150.47	148,350,000,000.00	119.88%	Sangat Efektif
2013	281,385,141,223.77	223,900,000,000.00	125.67%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas Pajak Daerah			**119.69%**	**Sangat Efektif**

Sumber: data diolah (2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pada pajak daerah termasuk pada kategori sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 119,69% selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 juga berfluktuasi, atau mengalami kenaikan dan penurunan. Namun demikian, dari keseluruhan tahun yang diamati dapat diketahui bahwa pemungutan pajak tergolong sangat efektif setiap tahunnya. Hal ini disebabkan rasio efektivitas terendah adalah pada tahun 2010 dengan tingkat efektivitas sebesar 106,11%, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2009 dengan tingkat efektivitas sebesar 126,08%. Kurang efektifnya penerimaan pajak pada tahun 2010 terjadi akibat perubahan

peraturan daerah sehingga terjadi penurunan tarif pada beberapa jenis pajak daerah.

3. Analisis Kontribusi

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan restribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman. Pada akhirnya kontribusi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan atau memberi gambaran yang jelas mengenai tindakan yang harus lebih diperhatikan dalam pemungutan pajak daerah sebagai usaha untuk meningkatkan peranannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi pajak daerah adalah data realisasi penerimaan pajak daerah dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Sleman tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Untuk menghitung kontribusi pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\Sigma \text{ Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\Sigma \text{ Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam mengukur kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu juga sebaliknya, jika perbandingannya lebih kecil berarti peranan pajak daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)	Keterangan
2008	61,020,899,130.70	140,631,359,142.43	43.39%	Cukup
2009	71,044,731,106.66	157,231,267,811.84	45.18%	Cukup
2010	80,611,542,955.52	163,056,459,137.93	49.44%	Cukup
2011	142,698,407,280.12	226,723,271,088.47	62.94%	Besar
2012	177,835,870,150.47	301,069,539,284.13	59.07%	Cukup
2013	281,385,141,223.77	456,026,490,587.83	61.70%	Besar
Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah			**53.62%**	**Cukup**

Sumber: data diolah (2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami perubahan setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 53,62% dengan kategori cukup. Kontribusi pajak daerah yang paling rendah adalah pada tahun 2008 dengan persentase sebesar 43,39%, sedangkan kontribusi pajak daerah yang paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 62,94% dengan kategori besar. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman.

4. Perkembangan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013

Realisasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman Tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.4.

Data Realisasi Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Sleman

Tahun	Pajak Daerah	PAD
2008	61,020,899,130.70	140,631,359,142.43
2009	71,044,731,106.66	157,231,267,811.84
2010	80,611,542,955.52	163,056,459,137.93
2011	142,698,407,280.12	226,723,271,088.47
2012	177,835,870,150.47	301,069,539,284.13
2013	281,385,141,223.77	456,026,490,587.83

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

Selanjutnya, perbandingan perkembangan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dihitung dengan menggunakan analisis angka indeks berantai (*Chain's Index*) dengan tahun 2003 sebagai tahun dasar. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$V_{n,n-1} = \frac{\Sigma V_n}{\Sigma V_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$V_{n,n-1}$ = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar n -1

Σ = Jumlah

V_{n-1} = Nilai realisasi PAD tahun sebelumnya

V_n = Nilai realisasi PAD pada tahun berjalan

Hasil perhitungan angka indeks berantai perhitungan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.

Perkembangan Pajak Derah dan PAD dengan Angka Indeks Berantai

Tahun	Pajak Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
	Realisasi	Angka Indeks	Realisasi	Angka Indeks
2008	61,020,899,130.70	-	140,631,359,142.43	-
2009	71,044,731,106.66	116%	157,231,267,811.84	112%
2010	80,611,542,955.52	113%	163,056,459,137.93	104%
2011	142,698,407,280.12	177%	226,723,271,088.47	139%
2012	177,835,870,150.47	125%	301,069,539,284.13	133%
2013	281,385,141,223.77	158%	456,026,490,587.83	151%

Sumber: data diolah (2014)

Tabel dan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pajak daerah dan PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada pajak daerah berkisar antara 12% sampai dengan 77%, sedangkan peningkatan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 4% hingga mencapai 51%. Perkembangan pajak daerdah dan PAD pada setiap tahunnya diuraikan sebagai berikut.

a. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2008

   Perkembangan pajak daerah dan PAD pada tahun 2008 tidak terlihat, disebabkan karena tahun 2008 merupakan tahun dasar atau periode awal tahun perhitungan.

b. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2009

   Pada tahun 2009, pajak daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 16%, dari sebesar Rp. 71,044,731,106.66 (100%) pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 71,044,731,106.66 (116%) pada tahun 2009. PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar

12%, dari sebesar Rp. 140,631,359,142.43 (100%) pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 157,231,267,811.84 (112%) pada tahun 2009.

c. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2010

Pada tahun 2010, pajak daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 13%, dari sebesar Rp. 61,020,899,130.70 (100%) pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 80,611,542,955.52 (113%) pada tahun 2010. PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 4%, dari sebesar Rp. 157,231,267,811.84 (100%) pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 163,056,459,137.93 (104%) pada tahun 2010.

d. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2011

Pada tahun 2011, pajak daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 77%, dari sebesar Rp. 80,611,542,955.52 (100%) pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 142,698,407,280.12 (177%) pada tahun 2011. PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 39%, dari sebesar Rp. 163,056,459,137.93 (100%) pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 226,723,271,088.47 (139%) pada tahun 2011.

e. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2012

Pada tahun 2012, pajak daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 25%, dari sebesar Rp. 142,698,407,280.12 (100%) pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 177,835,870,150.47 (125%) pada tahun 2012. PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 33%, dari sebesar Rp. 226,723,271,088.47 (100%) pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 301,069,539,284.13 (133%) pada tahun 2012.

f. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2013

Pada tahun 2013, pajak daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 58%, dari sebesar Rp. 177,835,870,150.47 (100%) pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 281,385,141,223.77 (158%) pada tahun 2013. PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 51%, dari sebesar Rp. 301,069,539,284.13 (100%) pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 456,026,490,587.83 (151%) pada tahun 2013.

5. Tingkat Kemandirian Daerah

a. Derajat Otonomi Fiskal

Derajat otonomi fiskal digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah. Kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diketahui dari hasil perhitungan yang dikonsultasikan dengan interval klasifikasi kemandirian daerah. Rumus yang digunakan untuk menentukan derajat otonomi fiskal adalah sebagai berikut.

$$\text{DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \text{ x } 100\%$$

Keterangan:

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

Hasil perhitungan derajat otonomi fiskal di atas kemudian dikonsultasikan dengan interval klasifikasi kemandirian daerah. Kriteria tingkat kemandirian daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6.

Tingkat Kemampuan Daerah Kabupaten Sleman

dengan Derajat Otonomi Fiskal

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DOF (%)	Kriteria Kemampuan Daerah	Pola Hubungan
2008	140,631,359,142.43	946,476,028,092.43	14.86%	Rendah sekali	Instruktif
2009	157,231,267,811.84	996,182,714,691.84	15.78%	Rendah Sekali	Instruktif
2010	163,056,459,137.93	1,095,628,887,560	14.88%	Rendah Sekali	Instruktif
2011	226,723,271,088.47	1,311,473,547,855	17.29%	Rendah Sekali	Instruktif
2012	301,069,539,284.13	1,589,722,974,409	18.94%	Rendah Sekali	Instruktif
2013	456,026,490,587.83	1,899,525,636,839	24.01%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: data diolah (2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dan penurunan. Namun demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman cenderung mengalami kenaikan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. Pada tahun 2009, terjadi kenaikan derajat otonomi fiskal sebesar 0.92 % dari sebesar 14.86% pada tahun 2008 menjadi sebesar 15.78% pada tahun 2009. Tahun 2010 terjadi penurunan dengan persentase sebesar 0.90% dari sebesar 15.78% pada tahun 2009 menjadi 14.88% pad atahun 2010. Kenaikan derajat otonomi fiskal kembali terjadi pada tahun 2011 sebesar 2.41%, dari sebesar 14.88% pada tahun 2010 menjadi sebesar 17.29% pada tahun 2011. Kenaikan derajat otonomi fiskal pada tahun 2012 sebesar 1.65%, dari sebesar 17.29% pada tahun 2011 menjadi sebesar 18.94% pada tahun 2012. Kenaikan derajat otonomi fiskal pada tahun 2013 sebesar 5.07%,

dari sebesar 18.94% pada tahun 2012 menjadi sebesar 24.01% pada tahun 2013.

b. Derajat Otonomi Perpajakan

Untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam membiayai keuangan daerah dengan sumber pendapatan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak digunakan derajat otonomi perpajakan. Semakin besar proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerah, maka dapat dikatakan bahwa semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai keuangan. Sebaliknya, apabila proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerah semakin kecil maka daerah dinilai kurang mampu untuk membiayai keuangannya. Derajat otonomi perpajakan dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$DOP = \frac{BHP}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD = Total Penerimaan Daerah

Hasil perhitungan derajat otonomi perpajakan dengan rasio kontribusi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah pada Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7.

Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten Sleman

Tahun	BHP (Rp)	TPD (Rp)	DOF (%)
2008	86,195,950,722	946,476,028,092	9.11%
2009	93,869,391,280	996,182,714,692	9.42%
2010	107,029,836,398	1,095,628,887,560	9.77%
2011	79,317,976,957	1,311,473,547,855	6.05%
2012	98,874,892,150	1,589,722,974,409	6.22%
2013	47,256,439,773	1,899,525,636,839	2.49%

Sumber: data diolah (2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa derajat otonomi perpajakan daerah Kabupaten Sleman untuk tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami penurunan. Kenaikan yang terjadi menunjukkan persentase yang sangat kecil yaitu sebesar 0.32% pada tahun 2010 dari sebesar 9.42% pada tahun 2009 menjadi 9.77% pada tahun 2010. Kenaikan juga terjadi sebesar 0.17% dari 6.05% pada tahun 2011 menjadi 6.22% pada tahun 2012. Sebaliknya, penurunan yang terjadi lebih besar dibandingkan kenaikan. Pada tahun 2011, terjadi penurunan sebesar 3.72% dari 9.77% pada tahun 2010 menjadi 6.05% pada tahun 2011. Tahun 2013, penurunan kembali terjadi sebesar 3.73% dari 6.22% pada tahun 2012 menjadi 2.49% pada tahun 2013.

c. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat diketahui dengan menghitung derajat otonomi sumbangan dan bantuan. Semakin tinggi derajat otonomi sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah. maka semakin

besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah derajat otonomi sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah. maka semakin kecil pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$DOB = \frac{B}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

B = Smbangan dan bantuan yang diterima pemerintah daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

Hasil perhitungan derajat otonomi sumbangan dan bantuan dengan rasio kontribusi sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah pada Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8.

Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Sleman

Tahun	B (Rp)	TPD (Rp)	DOF (%)
2008	638,474,114,000	946,476,028,092	67.46%
2009	640,446,548,000	996,182,714,692	64.29%
2010	665,320,491,550	1,095,628,887,560	60.72%
2011	704,635,550,450	1,311,473,547,855	53.73%
2012	868,791,375,975	1,589,722,974,409	54.65%
2013	971,765,442,000	1,899,525,636,839	51.16%

Sumber: data diolah (2014)

Hasil analisis dan perhitungan menunjukkan bahwa derajat otonomi sumbangan dan bantuan Kabupaten Sleman cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 7% dari 60.72% pada tahun 2010 menjadi 53.73% pada tahun 2011. Kenaikan terjadi hanya pada tahun 2012, yaitu sebesar 0.92% dari 53.73% pada tahun 2011 menjadi 54.65% pada tahun 2012. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan pada tahun 2013 merupakan derajat yang paling kecil dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2013, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat merupakan tingkat ketergantungan yang paling kecil.

6. Sektor-Sektor Potensial dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Setelah mendapatkan gambaran umum tentang Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya dapat diidentifikasi pos-pos dari pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Hal ini dapat diketahui dari kontribusi masing-masing pos pajak daerah. Kontribusi pos-pos pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9.

Rasio Kontribusi Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah

Jenis Penerimaan	Rasio Kontribusi						Rata-rata Kontribusi
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Pajak Hotel	23.80%	25.60%	27.88%	15.86%	18.12%	14.75%	21.00%
Pajak Restoran	10.94%	10.74%	12.65%	9.29%	9.42%	7.48%	10.09%
Pajak Hiburan	5.82%	5.12%	4.71%	1.90%	2.14%	1.75%	3.57%
Pajak Reklame	13.35%	12.68%	11.24%	6.53%	6.38%	4.32%	9.08%
Pajak Penerangan Jalan Umum	44.12%	43.90%	41.71%	28.05%	23.36%	17.56%	33.12%
Pajak Pengambilan BGGC	0.90%	0.93%	0.87%	2.26%	4.51%	3.31%	2.13%
Pajak Parkir	1.07%	1.02%	0.96%	0.60%	0.48%	0.37%	0.75%
Pajak BPHTB	-	-	-	34.50%	34.54%	29.27%	32.77%
Pajak Air tanah (SDAEM)	-	-	-	1.01%	1.05%	0.72%	0.93%
Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	20.47%	20.47%

Sumber: data diolah (2014)

Berdasarkan data pajak daerah setelah diurutkan maka akhirnya diperoleh kontribusi rata-rata pos pajak daerah, yaitu pos; (1) pajak hotel sebesar 21.00%, (2) pajak restoran sebesar 10.09%, (3) pajak hiburan sebesar 3.57%, (4) pajak reklame sebesar 9.08%, (5) pajak penerangan jalan umum sebesar 33.12%, (6) pajak pengambilan BGGC sebesar 2.13%, (7) pajak parkir sebesar 0.75%, (8) pajak BPHTB sebesar 32.77%, (9) pajak air tanah sebesar 0.93%, dan (10) pajak bumi dan bangunan sebesar 20.47%. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa pos pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman adalah pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB dengan rata-rata kontribusi selama periode tahun 2008 sampai 2013 masing-masing sebesar 33.12% untuk pajak penerangan jalan umum dan 32.77% untuk pajak BPHTB. Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa sektor yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sektor-sektor dari pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB.

B. Hasil dan Analisis

Pada analisis data yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa rata-rata pemungutan pajak daerah pada Kabupaten Sleman tahun 2008 sampai dengan 2013 sudah sangat efisien. Apabila dilihat dari segi efektivitas dapat diketahui bahwa rata-rata pemungutan pajak daerah pada Kabupaten Sleman dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dikategorikan efektif. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2008 sampai dengan 2013 dapat dikategorikan cukup.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa sudah tidak adalah penerimaan pajak yang dikategorikan belum efisien, tidak efektif dan memiki kontribusi sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Namun demikian, penerimaan pajaka daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2013 masih terbilang fluktuatif. Artinya, penerimaan pajak tidak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi juga mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi dapat disebabkan karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut merupakan hambatan atau kendala bagi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman.

Hambatan-hambatan dan kendala yang ditemukan dalam pemungutan pajak daerah antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menyebabkan tidak optimalnya sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh daerah. Selain itu, rendahnya

intensifikasi pemungutan pajak daerah juga menyebabkan realisasi penerimaan pajak terkadang tidak begitu jauh melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Adanya peraturan daerah yang kurang efektif untuk diterapkan dalam masyarakat dalam rangka pemungutan pajak, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah, serta rendahnya kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai/aparat pemungut yang melakukan penagihan dan pemungutan juga turut menentukan pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Dengan adanya identifikasi terhadap berbagai faktor yang merupakan kendala atau hambatan bagi penerimaan pajak tersebut maka diharapkan pemerintah dapat menyusun suatu strategi yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak daerah. Adapun penyusunan strategi tersebut dilakukan dengan pertimbangan terhadap faktor-faktor kendala pemungutan pajak. Dengan demikian, strategi yang disusun tersebut dapat dijalankan guna menghindari faktor kendala dan hambatan pemungutan pajak.

Perkembangan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian, apabila ditinjau dari kemandirian daerah maka dapat dikatakan bahwa kemandirian Pemerintah Daerah Kebupaten Sleman belum cukup baik. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Kabupaten Sleman mengalami peningkatan tingkat kemampuan keuangan. Dengan demikian, Kabupaten Sleman mengalami peningkatan kemampuan dalam

membiayai kegiatan pembangunan daerah dengan menggunakan penerimaan dari pendapatan asli daerah. Hal ini dapat diketahui dari nilai derajat otonomi fiskal yang semakin meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2008, derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman adalah sebesar 14.86% dengan kemampuan daerah yang tergolong sangat rendah dan pola hubungan instruktur, sedangkan pada tahun 2013 derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman menjadi sebesar 24.01% dengan kemampuan daerah yang masih tergolong rendah sekali dan pola hubungan instruktif. Berdasarkan indikator pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah dapat dilihat bahwa kemampuan daerah yang rendah sekali dan pola hubungan instruktif terjadi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Sleman pada dasarnya masih belum memiliki kemandirian daerah yang baik.

Hasil pehitungan derajat otonomi perpajakan menunjukkan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 derajat otonomi perpajakan Kabupaten Sleman rata-rata masih rendah. Derajat otonomi perpajakan yang paling tinggi hanya terjadi pada tahun 2010. Namun hal ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena pada tahun-tahun berikutnya proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak masih terbilang kecil dibanding total penerimaan daerah. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sleman yang dinilai dari derajat otonomi fiskal masih terbilang rendah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa bagi hasil pajak dan bukan pajak pada daerah Kabupaten Sleman belum dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah.

Apabila dilihat secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa derajat otonomi sumbangan dan bantuan pada Kabupaten Sleman terbilang cukup tinggi, dengan nilai rata-rata dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013 yang melebihi dari 50%. Hal ini dapat diketahui dari besarnya proporsi perbandingan sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman terhadap pemerintah pusat cukup tinggi, dan belum memperlihatkan kecenderungan penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari penelitian serta analisis data yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Hasil perhitungan mengenai tingkat efisiensi pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah adalah sebesar 5.85% dengan kategori efisien. Efisiensi pajak daerah tertinggi adalah tahun 2009 dengan persentase sebesar 7.74%. Efisiensi pajak daerah terendah adalah tahun 2011 dengan persentase sebesar 4.35%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata pemungutan pajak daerah pada Kabupaten Sleman tahun 2008 sampai dengan 2013 sudah dilakukan dengan sangat efisien.

2. Hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah adalah sebesar 119.69% dengan kategori sangat efektif. Efektivitas pajak daerah dengan persentase tertinggi adalah

pada tahun 2009, yaitu sebesar 126.08%, sedangkan efektivitas pajak daerah terendah adalah pada tahun 2010 dengan persentase sebesar 106.11%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa rata-rata pemungutan pajak daerah pada Kabupaten Sleman dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dikategorikan sangat efektif.

3. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2008 sampai dengan 2013 adalah sebesar 53.62% yang termasuk dalam kategori cukup. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi adalah pada tahun 2011, yaitu sebesar 62.94%, dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah adalah pada tahun 2008, yaitu sebesar 43,39%.

4. Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada pajak daerah berkisar antara 12% sampai dengan 77%, sedangkan peningkatan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 4% hingga mencapai 51%.

5. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sleman secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

    a. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman cenderung tidak mengalami peningkatan yang

signifikan dan perubahan pola hubungan dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman cenderung mengalami kenaikan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. Rendahnya derajat otonomi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sleman belum memiliki kemandirian daerah yang baik.

b. Derajat otonomi perpajakan pada Kabupaten Sleman dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami penurunan. Derajat otonomi perpajakan yang tinggi terjadi pada tahun 2010, namun hal ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Derajat otonomi perpajakan yang tinggi pada tahun 2010 terjadi karena peningkatan yang cukup besar pula pada penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sleman yang dinilai dari derajat otonomi fiskal masih terbilang rendah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa bagi hasil pajak dan bukan pajak pada daerah Kabupaten Sleman belum dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah.

c. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami penurunan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara keseluruhan dapat dikatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman terhadap pemerintah pusat cukup tinggi, dan belum

memperlihatkan kecenderungan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.

6. Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sektor dari pos pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata kontribusi dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2013 yang menunjukkan bahwa kontribusi pos pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB memiliki rasio yang paling besar, yaitu 33.12% untuk pajak penerangan jalan umum dan 32.77% untuk pajak BPHTB

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis dan beberapa kesimpulan pada penelitian ini, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap efisiensi pemungutan pajak daerah melalui berbagai upaya, seperti mengklasifikasikan biaya pemungutan pajak daerah secara lebih rinci, menggunakan tenaga kerja yang profesional sehingga mengurangi penggunaan dana operasional yang dapat mengurangi efisiensi, dan menetapkan target yang tidak terlalu rendah sehingga biaya insentif yang ditetapkan tidak terlalu besar.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi sumber

pajak yang terdapat di Kabupaten Sleman, penagihan penyetoran yang belum dibayar, dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak, serta melakukan pengawasan untuk mencegah kebocoran dalam pemungutan pajak.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan kontribusi penerimaan yang bersumber dari pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti mengoptimalkan sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh daerah dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak daerah, melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah khususnya yang menyangkut pendapatan asli daerah, melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai/aparat pemungut yang melakukan penagihan dan pemungutan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Edisi Revisi V*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Brotodiharjo, R, Santoso. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Eresco.

Devas, Nick; Binder, Brian; Booth, Anne; Davey, Kenneth & Kelly, Roy. (1999). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.* Jakarta: UI Press.

Fatchanie, Meutia. (2007). "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman". Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

_____, dan Damayanti, Theresia. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Jogiyanto, H.M. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Kaho, J. Riwu. (2003). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Derah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

MPR RI. "Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah". Jakarta.

Munawir. (1998). *Analisis Informasi Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2002). "Sejarah Kota Yogyakarta". Artikel Online. http://www.jogjakota.go.id.

Reksohadiprodjo, Sukanto. (2000). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Jakarta

_____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Riduansyah, Mohammad. (2003). "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)". *Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2003*.

Soemitro, Rochmat. (1992). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1282 / 2014

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/1236/2014 Tanggal : 04 April 2014
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada	:
Nama	: FENDY IRMANSYAH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK	: 07312418
Program/Tingkat	: S1
Instansi/Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi	: Condongcatur Depok Sleman
Alamat Rumah	: Jongke Tengah Sendangadi Mlati Sleman
No. Telp / HP	: 085643130808
Untuk	: Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)**
Lokasi	: Dinas Pndapatan Daerah Kabupaten Sleman
Waktu	: Selama 3 bulan mulai tanggal: 04 April 2014 s/d 04 Juli 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman
Pada Tanggal : 4 April 2014
a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris
u.b.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19630112 198903 2 003

Tembusan :
1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman
3. Kepala DPKAD Kab. Sleman
4. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Ekonomi Akuntansi - UII Yk.
6. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070 / Bappeda / 011/IX/2014

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman menerangkan bahwa yang tercantum dibawah ini :

Nama	:	FENDY IRMANSYAH
No Mhs/ NIM/ NIP/ NIK	:	07312418
Universitas/Akademi/Instansi	:	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas/ Program	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akutansi
Program	:	S1
Alamat Rumah	:	Jongke Tengah Sendangadi Mlati Sleman
Judul Skripsi/ Tesis/ Karya Tulis Ilmiah	:	ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)
Waktu pelaksanaan	:	04 April 2014 s/d 04 Juli 2014

Telah selesai melaksanakan pengambilan data / penelitian di wilayah Kabupaten Sleman.
Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 29 September 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris
u.b.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ERNY MARYATUN, S.IP, MT
Pembina, IV/a
NIP 19720411 199603 2 003

05 : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
1.20.05.13.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.505.000,00	106.805.000,00	76,56	(32.700.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	71.245.000,00	41.194.000,00	57,82	(30.051.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.2.01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	3.404.000,00	3.404.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.404.000,00	3.404.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.01.5.2.2.06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	12.656.000,00	11.000.000,00	86,92	(1.656.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak dan Jilid	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.156.000,00	3.500.000,00	67,88	(1.656.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.2.11	**Belanja Makanan dan Minuman**	36.600.000,00	24.960.000,00	68,20	(11.640.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.600.000,00	24.960.000,00	68,20	(11.640.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.2.15	**Belanja Perjalanan Dinas**	18.585.000,00	1.830.000,00	9,85	(16.755.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	18.585.000,00	1.830.000,00	9,85	(16.755.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.3	**BELANJA MODAL**	700.000,00	350.000,00	50,00	(350.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.3.10	**Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor**	350.000,00	0,00	0,00	(350.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.3.10.18	Belanja Moda Pengadaan mesin hitung/ calculator	350.000,00	0,00	0,00	(350.000,00)
1.20.05.13.01.5.2.3.12	**Belanja Modal Pengadaan Komputer**	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.01.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk,Mouse,Keyboard,hardisk,speaker)	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.02	**Penetapan pajak daerah**	126.053.000,00	118.563.900,00	94,06	(7.489.100,00)
1.20.05.13.02.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	99.000.000,00	98.235.000,00	99,23	(765.000,00)
1.20.05.13.02.5.2.1.01	**Honorarium PNS**	91.800.000,00	91.035.000,00	99,17	(765.000,00)
1.20.05.13.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.800.000,00	91.035.000,00	99,17	(765.000,00)
1.20.05.13.02.5.2.1.03	**Uang Lembur**	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.02.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	27.053.000,00	20.328.900,00	75,14	(6.724.100,00)
1.20.05.13.02.5.2.2.01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	20.753.000,00	18.308.900,00	88,22	(2.444.100,00)
1.20.05.13.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.753.000,00	18.308.900,00	88,22	(2.444.100,00)
1.20.05.13.02.5.2.2.11	**Belanja Makanan dan Minuman**	6.300.000,00	2.020.000,00	32,06	(4.280.000,00)
1.20.05.13.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	2.020.000,00	32,06	(4.280.000,00)
1.20.05.13.03	**Koordinasi Pemungutan PJU**	160.000.000,00	149.720.900,00	93,58	(10.279.100,00)
1.20.05.13.03.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	160.000.000,00	149.720.900,00	93,58	(10.279.100,00)
1.20.05.13.03.5.2.2.06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	160.000.000,00	149.720.900,00	93,58	(10.279.100,00)
1.20.05.13.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak dan Jilid	160.000.000,00	149.720.900,00	93,58	(10.279.100,00)
1.20.05.13.04	**Pendaftaran Calon WP dan Pendataan WP daerah**	223.647.550,00	198.788.320,00	88,88	(24.859.230,00)

05 : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
1.20.05.13.04.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	137.120.000,00	130.110.000,00	94,89	(7.010.000,00)
1.20.05.13.04.5.2.1.01	**Honorarium PNS**	137.120.000,00	130.110.000,00	94,89	(7.010.000,00)
1.20.05.13.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.120.000,00	130.110.000,00	94,89	(7.010.000,00)
1.20.05.13.04.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	37.527.550,00	20.928.320,00	55,77	(16.599.230,00)
1.20.05.13.04.5.2.2.01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	28.527.550,00	16.478.320,00	57,76	(12.049.230,00)
1.20.05.13.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.527.550,00	16.478.320,00	57,76	(12.049.230,00)
1.20.05.13.04.5.2.2.11	**Belanja Makanan dan Minuman**	9.000.000,00	4.450.000,00	49,44	(4.550.000,00)
1.20.05.13.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	4.450.000,00	49,44	(4.550.000,00)
1.20.05.13.04.5.2.3	**BELANJA MODAL**	49.000.000,00	47.750.000,00	97,45	(1.250.000,00)
1.20.05.13.04.5.2.3.12	**Belanja Modal Pengadaan Komputer**	49.000.000,00	47.750.000,00	97,45	(1.250.000,00)
1.20.05.13.04.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software	49.000.000,00	47.750.000,00	97,45	(1.250.000,00)
1.20.05.13.05	**Pemeriksaan Pajak Daerah**	189.445.000,00	168.813.250,00	89,11	(20.631.750,00)
1.20.05.13.05.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	188.770.000,00	168.173.250,00	89,09	(20.596.750,00)
1.20.05.13.05.5.2.1.01	**Honorarium PNS**	111.270.000,00	91.670.000,00	82,39	(19.600.000,00)
1.20.05.13.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.270.000,00	91.670.000,00	82,39	(19.600.000,00)
1.20.05.13.05.5.2.1.02	**Honorarium Non PNS**	77.500.000,00	76.503.250,00	98,71	(996.750,00)
1.20.05.13.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber	77.500.000,00	76.503.250,00	98,71	(996.750,00)
1.20.05.13.05.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	675.000,00	640.000,00	94,81	(35.000,00)
1.20.05.13.05.5.2.2.11	**Belanja Makanan dan Minuman**	675.000,00	640.000,00	94,81	(35.000,00)
1.20.05.13.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.000,00	640.000,00	94,81	(35.000,00)
1.20.05.13.08	**Bagi hasil pajak**	274.121.200,00	233.120.000,00	85,04	(41.001.200,00)
1.20.05.13.08.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	225.250.000,00	200.450.000,00	88,99	(24.800.000,00)
1.20.05.13.08.5.2.1.01	**Honorarium PNS**	225.250.000,00	200.450.000,00	88,99	(24.800.000,00)
1.20.05.13.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.250.000,00	200.450.000,00	88,99	(24.800.000,00)
1.20.05.13.08.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	48.871.200,00	32.670.000,00	66,85	(16.201.200,00)
1.20.05.13.08.5.2.2.01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	36.191.000,00	30.135.000,00	83,27	(6.056.000,00)
1.20.05.13.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.191.000,00	30.135.000,00	83,27	(6.056.000,00)
1.20.05.13.08.5.2.2.06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	980.200,00	0,00	0,00	(980.200,00)
1.20.05.13.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	980.200,00	0,00	0,00	(980.200,00)
1.20.05.13.08.5.2.2.11	**Belanja Makanan dan Minuman**	4.050.000,00	2.130.000,00	52,59	(1.920.000,00)
1.20.05.13.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.050.000,00	2.130.000,00	52,59	(1.920.000,00)
1.20.05.13.08.5.2.2.15	**Belanja Perjalanan Dinas**	7.650.000,00	405.000,00	5,29	(7.245.000,00)
1.20.05.13.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	7.650.000,00	405.000,00	5,29	(7.245.000,00)

05 : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
1.20.05.13.09	**Pengelolaan PBB**	2.764.639.200,00	1.669.151.865,00	60,37	(1.095.687.335,00)
1.20.05.13.09.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	2.328.420.000,00	1.288.975.225,00	55,36	(1.039.444.775,00)
1.20.05.13.09.5.2.1.01	**Honorarium PNS**	1.751.220.000,00	890.638.000,00	50,86	(860.582.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.751.220.000,00	890.638.000,00	50,86	(860.582.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.1.02	**Honorarium Non PNS**	571.600.000,00	392.747.225,00	68,71	(178.852.775,00)
1.20.05.13.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	0,00	0,00	(25.600.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	546.000.000,00	392.747.225,00	71,93	(153.252.775,00)
1.20.05.13.09.5.2.1.03	**Uang Lembur**	5.600.000,00	5.590.000,00	99,82	(10.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.600.000,00	5.590.000,00	99,82	(10.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	434.553.200,00	378.310.640,00	87,06	(56.242.560,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	88.702.490,00	83.391.100,00	94,01	(5.311.390,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.702.490,00	83.391.100,00	94,01	(5.311.390,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.02	**Belanja Bahan/Material**	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.09.5.2.2.02.13	Belanja Barang Penghargaan	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.09.5.2.2.03	**Belanja Jasa Kantor**	16.250.000,00	15.500.000,00	95,38	(750.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Dekorasi/Dokumentasi	2.750.000,00	2.000.000,00	72,73	(750.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.03.40	Belanja jasa publikasi/pengumuman lelang/pemenang	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.09.5.2.2.06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	138.131.710,00	113.112.500,00	81,89	(25.019.210,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak dan Jilid	121.105.210,00	105.711.000,00	87,29	(15.394.210,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.026.500,00	7.401.500,00	43,47	(9.625.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.07	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	29.250.000,00	26.192.040,00	89,55	(3.057.960,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	29.250.000,00	26.192.040,00	89,55	(3.057.960,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.10	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	849.000,00	566.000,00	66,67	(283.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	849.000,00	566.000,00	66,67	(283.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.11	**Belanja Makanan dan Minuman**	62.500.000,00	48.059.000,00	76,89	(14.441.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.865.000,00	44.309.000,00	83,82	(8.556.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.635.000,00	0,00	0,00	(5.635.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	3.750.000,00	93,75	(250.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.15	**Belanja Perjalanan Dinas**	30.870.000,00	23.490.000,00	76,09	(7.380.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	30.870.000,00	23.490.000,00	76,09	(7.380.000,00)
1.20.05.13.09.5.2.3	**BELANJA MODAL**	1.866.000,00	1.866.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.09.5.2.3.12	**Belanja Modal Pengadaan Komputer**	1.866.000,00	1.866.000,00	100,00	0,00

05 : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
1.20.05.13.09.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk,Mouse,Keyboard,hardisk,speaker)	1.866.000,00	1.866.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.10	**Pembinaan dan operasional BPHTB**	**797.800.000,00**	**765.629.272,00**	**95,97**	**(32.170.728,00)**
1.20.05.13.10.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	**745.000.000,00**	**732.645.000,00**	**98,34**	**(12.355.000,00)**
1.20.05.13.10.5.2.1.01	**Honorarium PNS**	**739.400.000,00**	**727.050.000,00**	**98,33**	**(12.350.000,00)**
1.20.05.13.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	739.400.000,00	727.050.000,00	98,33	(12.350.000,00)
1.20.05.13.10.5.2.1.03	**Uang Lembur**	**5.600.000,00**	**5.595.000,00**	**99,91**	**(5.000,00)**
1.20.05.13.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.600.000,00	5.595.000,00	99,91	(5.000,00)
1.20.05.13.10.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**52.800.000,00**	**32.984.272,00**	**62,47**	**(19.815.728,00)**
1.20.05.13.10.5.2.2.01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.160.000,00**	**6.160.000,00**	**100,00**	**0,00**
1.20.05.13.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.160.000,00	6.160.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.10.5.2.2.06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**4.760.000,00**	**3.750.000,00**	**78,78**	**(1.010.000,00)**
1.20.05.13.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.760.000,00	3.750.000,00	78,78	(1.010.000,00)
1.20.05.13.10.5.2.2.11	**Belanja Makanan dan Minuman**	**22.560.000,00**	**20.104.272,00**	**89,11**	**(2.455.728,00)**
1.20.05.13.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.560.000,00	16.254.272,00	98,15	(305.728,00)
1.20.05.13.10.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.000.000,00	3.850.000,00	64,17	(2.150.000,00)
1.20.05.13.10.5.2.2.15	**Belanja Perjalanan Dinas**	**19.320.000,00**	**2.970.000,00**	**15,37**	**(16.350.000,00)**
1.20.05.13.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	19.320.000,00	2.970.000,00	15,37	(16.350.000,00)
1.20.05.13.11	**Pengelolaan titik lokasi reklame**	**241.000.000,00**	**211.540.000,00**	**87,78**	**(29.460.000,00)**
1.20.05.13.11.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	**84.290.000,00**	**84.040.000,00**	**99,70**	**(250.000,00)**
1.20.05.13.11.5.2.1.01	**Honorarium PNS**	**84.290.000,00**	**84.040.000,00**	**99,70**	**(250.000,00)**
1.20.05.13.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.290.000,00	84.040.000,00	99,70	(250.000,00)
1.20.05.13.11.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**156.710.000,00**	**127.500.000,00**	**81,36**	**(29.210.000,00)**
1.20.05.13.11.5.2.2.06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(535.000,00)**
1.20.05.13.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	535.000,00	0,00	0,00	(535.000,00)
1.20.05.13.11.5.2.2.07	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**121.000.000,00**	**120.000.000,00**	**99,17**	**(1.000.000,00)**
1.20.05.13.11.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Tanah	121.000.000,00	120.000.000,00	99,17	(1.000.000,00)
1.20.05.13.11.5.2.2.11	**Belanja Makanan dan Minuman**	**35.175.000,00**	**7.500.000,00**	**21,32**	**(27.675.000,00)**
1.20.05.13.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.175.000,00	7.500.000,00	21,32	(27.675.000,00)
1.20.05.13.12	**Penagihan pajak daerah**	**320.659.900,00**	**281.989.775,00**	**87,94**	**(38.670.125,00)**
1.20.05.13.12.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	**276.400.000,00**	**261.430.000,00**	**94,58**	**(14.970.000,00)**
1.20.05.13.12.5.2.1.01	**Honorarium PNS**	**266.200.000,00**	**251.230.000,00**	**94,38**	**(14.970.000,00)**
1.20.05.13.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	266.200.000,00	251.230.000,00	94,38	(14.970.000,00)

05 : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
1.20.05.13.12.5.2.1.02	**Honorarium Non PNS**	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.12.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.12.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	43.605.900,00	19.909.775,00	45,66	(23.696.125,00)
1.20.05.13.12.5.2.2.01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	30.034.700,00	14.159.775,00	47,14	(15.874.925,00)
1.20.05.13.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.034.700,00	14.159.775,00	47,14	(15.874.925,00)
1.20.05.13.12.5.2.2.06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	251.200,00	0,00	0,00	(251.200,00)
1.20.05.13.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	251.200,00	0,00	0,00	(251.200,00)
1.20.05.13.12.5.2.2.11	**Belanja Makanan dan Minuman**	13.320.000,00	5.750.000,00	43,17	(7.570.000,00)
1.20.05.13.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.320.000,00	5.750.000,00	43,17	(7.570.000,00)
1.20.05.13.12.5.2.3	**BELANJA MODAL**	654.000,00	650.000,00	99,39	(4.000,00)
1.20.05.13.12.5.2.3.12	**Belanja Modal Pengadaan Komputer**	654.000,00	650.000,00	99,39	(4.000,00)
1.20.05.13.12.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk,Mouse,Keyboard,hardisk,speaker)	654.000,00	650.000,00	99,39	(4.000,00)
1.20.05.13.14	**Pengembalian PHR**	18.000.000,00	15.283.000,00	84,91	(2.717.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	8.265.000,00	8.085.000,00	97,82	(180.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.1.01	**Honorarium PNS**	5.925.000,00	5.925.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.925.000,00	5.925.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.14.5.2.1.03	**Uang Lembur**	2.340.000,00	2.160.000,00	92,31	(180.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.340.000,00	2.160.000,00	92,31	(180.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	9.735.000,00	7.198.000,00	73,94	(2.537.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.2.03	**Belanja Jasa Kantor**	905.000,00	300.000,00	33,15	(605.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Dekorasi/Dokumentasi	550.000,00	300.000,00	54,55	(250.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.2.03.40	Belanja jasa publikasi/pengumuman lelang/pemenang	355.000,00	0,00	0,00	(355.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.2.10	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	250.000,00	0,00	0,00	(250.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	0,00	0,00	(250.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.2.11	**Belanja Makanan dan Minuman**	8.580.000,00	6.898.000,00	80,40	(1.682.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.020.000,00	5.398.000,00	76,89	(1.622.000,00)
1.20.05.13.14.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.560.000,00	1.500.000,00	96,15	(60.000,00)
1.20.05.13.15	**Pelatihan Profesional Petugas PBB**	36.000.000,00	29.180.500,00	81,06	(6.819.500,00)
1.20.05.13.15.5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	9.835.000,00	9.625.000,00	97,86	(210.000,00)
1.20.05.13.15.5.2.1.01	**Honorarium PNS**	4.675.000,00	4.675.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.675.000,00	4.675.000,00	100,00	0,00
1.20.05.13.15.5.2.1.02	**Honorarium Non PNS**	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening							Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hul
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	**05**	**01**	**06**				**Fasilitasi Rapat dan Tamu**	**28.500.000,00**	**28.500.000,00**	-	-	
1.20	05	01	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	28.500.000,00	-	-	
1.20	**05**	**01**	**07**				**Pengelolaan Kepegawaian**	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	-	-	
1.20	05	01	07	5	2	1	Belanja Pegawai	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	
1.20	**05**	**01**	**08**				**Konsultasi dan Koordinasi**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	-	-	
1.20	05	01	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1.20	**05**	**02**	**00**				**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor**	**550.000.000,00**	**582.940.000,00**	**32.940.000,00**	5,99	
1.20	**05**	**02**	**01**				**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**	**550.000.000,00**	**582.940.000,00**	**32.940.000,00**	**5,99**	
1.20	05	02	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	582.940.000,00	32.940.000,00	5,99	
1.20	**05**	**03**	**00**				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**254.997.600,00**	**351.922.600,00**	**96.925.000,00**	38,01	
1.20	**05**	**03**	**01**				**Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya**	**160.000.000,00**	**256.925.000,00**	**96.925.000,00**	60,58	
1.20	05	03	01	5	2	1	Belanja Pegawai	-	3.125.000,00	3.125.000,00	100,00	
1.20	05	03	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	253.800.000,00	93.800.000,00	58,63	
1.20	**05**	**03**	**02**				**Pelatihan Profesional Petugas PBB**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	-	-	
1.20	05	03	02	5	2	1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1.20	05	03	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
1.20	**05**	**03**	**03**				**Pembinaan Bendahara**	**69.997.600,00**	**69.997.600,00**	-	-	
1.20	05	03	03	5	2	1	Belanja Pegawai	45.525.000,00	45.525.000,00	-	-	
1.20	05	03	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	24.472.600,00	24.472.600,00	-	-	
1.20	**05**	**04**	**00**				**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan**	**308.000.000,00**	**751.035.000,00**	**443.035.000,00**	143,84	
1.20	**05**	**04**	**01**				**Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	-	-	
1.20	05	04	01	5	2	1	Belanja Pegawai	19.600.000,00	19.600.000,00	-	-	
1.20	05	04	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1.20	**05**	**04**	**02**				**Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	-	-	
1.20	05	04	02	5	2	1	Belanja Pegawai	73.500.000,00	73.500.000,00	-	-	
1.20	05	04	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1.20	**05**	**04**	**03**				**Penyusunan Pelaporan keuangan dan realisasi anggaran**	**40.000.000,00**	48.700.000,00	8.700.000,00	21,75	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Dasar H
1							2	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
								3	4	5	6	7
1.20	05	04	03	5	2	1	Belanja Pegawai	38.400.000,00	47.100.000,00	8.700.000,00	22,66	
1.20	05	04	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1.20	**05**	**04**	**04**				**Pendampingan dan Implementasi SIPKD dan SIKD**					
1.20	05	04	04	5	2	1	Belanja Pegawai	**142.000.000,00**	**343.335.000,00**	**201.335.000,00**	141,79	
1.20	05	04	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	203.000.000,00	128.000.000,00	170,67	
								67.000.000,00	140.335.000,00	73.335.000,00	109,46	
1.20	**05**	**04**	**05**				**Rekonsiliasi Bank**					
1.20	05	04	05	5	2	1	Belanja Pegawai	**30.000.000,00**	**39.210.000,00**	**9.210.000,00**	30,70	
1.20	05	04	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	36.690.300,00	8.490.300,00	30,11	
								1.800.000,00	2.519.700,00	719.700,00	39,98	
1.20	**05**	**04**	**06**				**Penyusunan Raperda/Perbup Bidang Keuangan**					
1.20	05	04	06	5	2	1	Belanja Pegawai	-	**223.790.000,00**	**223.790.000,00**	100,00	
1.20	05	04	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	-	175.745.000,00	175.745.000,00	100,00	
								-	48.045.000,00	48.045.000,00	100,00	
1.20	**05**	**07**	**00**				**Program peningk.& Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah**					
1.20	**05**	**07**	**01**				**Penyus. laporan Keu.& Publikasi Lap. Keuangan Daerah Th 2008**	**825.000.000,00**	**881.250.000,00**	**56.250.000,00**	6,82	
1.20	05	07	01	5	2	1	Belanja Pegawai	**685.000.000,00**	**730.650.000,00**	**45.650.000,00**	6,66	
1.20	05	07	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	451.395.000,00	454.770.000,00	3.375.000,00	0,75	
								233.605.000,00	275.880.000,00	42.275.000,00	18,10	
1.20	**05**	**07**	**02**				**Annual Report**					
1.20	05	07	02	5	2	1	Belanja Pegawai	**140.000.000,00**	**150.600.000,00**	**10.600.000,00**	7,57	
1.20	05	07	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00	75.600.000,00	1.800.000,00	2,44	
								66.200.000,00	75.000.000,00	8.800.000,00	13,29	
1.20	**05**	**13**	**00**				**Program Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan**					
1.20	**05**	**13**	**01**				**Evaluasi PAD**	**4.759.035.000,00**	**5.788.115.250,00**	**1.029.080.250,00**	21,62	
1.20	05	13	01	5	2	1	Belanja Pegawai	**230.000.000,00**	**212.000.000,00**	**(18.000.000,00)**	(7,83)	
1.20	05	13	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	183.900.000,00	166.800.000,00	(17.100.000,00)	(9,30)	
								46.100.000,00	45.200.000,00	(900.000,00)	(1,95)	
1.20	**05**	**13**	**02**				**Penetapan Pajak Daerah**					
1.20	05	13	02	5	2	1	Belanja Pegawai	**149.000.000,00**	**149.000.000,00**	-	-	
1.20	05	13	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	119.400.000,00	119.400.000,00	-	-	
								29.600.000,00	29.600.000,00	-	-	
1.20	**05**	**13**	**03**				**Analisis Hasil Pemeriksaan dan Hasil Pemantauan Pajak daerah**					
1.20	05	13	03	5	2	1	Belanja Pegawai	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	-	-	
1.20	05	13	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	56.510.000,00	56.510.000,00	-	-	
								3.490.000,00	3.490.000,00	-	-	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hul
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	**05**	**13**	**04**				**Penyediaan Jasa Surat Ketetapan Pajak Penerangan Jalan**	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	-	-	
1.20	05	13	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1.20	**05**	**13**	**05**				**Pendaftaran Calon WP dan pendataan WP daerah**	**170.000.000,00**	**236.522.750,00**	**66.522.750,00**	39,13	
1.20	05	13	05	5	2	1	Belanja Pegawai	139.430.000,00	153.320.000,00	13.890.000,00	9,96	
1.20	05	13	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	30.570.000,00	34.202.750,00	3.632.750,00	11,88	
1.20	05	13	05	5	2	3	Belanja Modal	-	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	
1.20	**05**	**13**	**06**				**Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah**	**155.000.000,00**	**279.495.000,00**	**124.495.000,00**	80,32	
1.20	05	13	06	5	2	1	Belanja Pegawai	152.750.000,00	277.245.000,00	124.495.000,00	81,50	
1.20	05	13	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1.20	**05**	**13**	**07**				**Pelayanan Keberatan dan keringan pajak daerah**	**40.000.000,00**	**52.900.000,00**	**12.900.000,00**	32,25	
1.20	05	13	07	5	2	1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	37.800.000,00	4.800.000,00	14,55	
1.20	05	13	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	15.100.000,00	8.100.000,00	115,71	
1.20	**05**	**13**	**08**				**Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan kaliurang**	**140.000.000,00**	**164.500.000,00**	**24.500.000,00**	17,50	
1.20	05	13	08	5	2	1	Belanja Pegawai	97.120.000,00	119.120.000,00	22.000.000,00	22,65	
1.20	05	13	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	41.964.000,00	41.964.000,00	-	-	
1.20	05	13	08	5	2	3	Belanja Modal	916.000,00	3.416.000,00	2.500.000,00	272,93	
1.20	**05**	**13**	**09**				**Bagi Hasil Pajak**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	-	-	
1.20	05	13	09	5	2	1	Belanja Pegawai	220.500.000,00	220.500.000,00	-	-	
1.20	05	13	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	39.500.000,00	-	-	
1.20	**05**	**13**	**10**				**Pengelolaan PBB**	**1.800.000.000,00**	**1.996.612.500,00**	**196.612.500,00**	10,92	
1.20	05	13	10	5	2	1	Belanja Pegawai	1.505.475.000,00	1.585.908.000,00	80.433.000,00	5,34	
1.20	05	13	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	294.525.000,00	410.704.500,00	116.179.500,00	39,45	
1.20	**05**	**13**	**11**				**Pembinaan dan Operasional BPHTB**	**650.000.000,00**	**989.300.000,00**	**339.300.000,00**	52,20	
1.20	05	13	11	5	2	1	Belanja Pegawai	605.900.000,00	945.200.000,00	339.300.000,00	56,00	
1.20	05	13	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	44.100.000,00	-	-	
1.20	**05**	**13**	**12**				**Pengelolaan titik lokasi reklame**	**186.000.000,00**	**241.000.000,00**	**55.000.000,00**	29,57	
1.20	05	13	12	5	2	1	Belanja Pegawai	97.530.000,00	97.530.000,00	-	-	
1.20	05	13	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	88.470.000,00	143.470.000,00	55.000.000,00	62,17	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hul
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	**05**	**13**	**13**				**Penagihan pajak daerah**	**295.075.000,0**	**295.075.000,00**	-	-	
1.20	05	13	13	5	2	1	Belanja Pegawai	253.800.000,00	253.800.000,00	-	-	
1.20	05	13	13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	41.275.000,00	41.275.000,00	-	-	
1.20	**05**	**13**	**14**				**Forum komunikasi pengelolaan pendapatan**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	-	-	
1.20	05	13	14	5	2	1	Belanja Pegawai	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-	
1.20	05	13	14	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	31.400.000,00	-	-	
1.20	**05**	**13**	**15**				**Pemantauan WP Daerah**	**189.100.000,00**	**261.950.000,00**	**72.850.000,00**	38,52	
1.20	05	13	15	5	2	1	Belanja Pegawai	189.100.000,00	261.950.000,00	72.850.000,00	38,52	
1.20	**05**	**13**	**16**				**Intensifikasi pajak reklame**	**160.000.000,00**	**314.900.000,00**	**154.900.000,00**	96,81	
1.20	05	13	16	5	2	1	Belanja Pegawai	159.520.000,00	314.300.000,00	154.780.000,00	97,03	
1.20	05	13	16	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	600.000,00	120.000,00	25,00	
1.20	**05**	**13**	**17**				**Pembinaan Wajib Pajak Daerah**	**27.910.000,00**	**27.910.000,00**	-	-	
1.20	05	13	17	5	2	1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	16.350.000,00	-	-	
1.20	05	13	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	11.560.000,00	11.560.000,00	-	-	
1.20	**05**	**13**	**18**				**Pengembalian PHR**	**21.950.000,00**	**21.950.000,00**	-	-	
1.20	05	13	18	5	2	1	Belanja Pegawai	9.665.000,00	9.665.000,00	-	-	
1.20	05	13	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	12.285.000,00	12.285.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**00**				**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah**	**21.541.589.400,00**	**27.737.243.896,01**	**6.195.654.496,01**	28,76	
1.20	**05**	**14**	**01**				**Evaluasi APBD th 2009**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	-	-	
1.20	05	14	01	5	2	1	Belanja Pegawai	52.925.000,00	53.487.500,00	562.500,00	1,06	
1.20	05	14	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	67.075.000,00	66.512.500,00	(562.500,00)	(0,84)	
1.20	**05**	**14**	**02**				**Penyiapan materi sisdur pengelolaan keuangan**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	-	-	
1.20	05	14	02	5	2	1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	20.160.000,00	(840.000,00)	(4,00)	
1.20	05	14	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.840.000,00	840.000,00	9,33	
1.20	**05**	**14**	**03**				**Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Daerah**	**98.000.000,00**	**95.975.000,00**	**(2.025.000,00)**	(2,07)	
1.20	05	14	03	5	2	1	Belanja Pegawai	93.350.000,00	88.130.000,00	(5.220.000,00)	(5,59)	
1.20	05	14	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	7.845.000,00	3.195.000,00	68,71	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hu
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	**05**	**14**	**04**				**Penyusunan laporan penyerapan anggaran dan evaluasi penyerapan anggaran**	**63.900.000,00**	**72.400.000,00**	**8.500.000,00**		
1.20	05	14	04	5	2	1	Belanja Pegawai	55.965.000,00	63.360.000,00	7.395.000,00	13,30	
1.20	05	14	04	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7.935.000,00	9.040.000,00	1.105.000,00	13,21	
											13,93	
1.20	**05**	**14**	**05**				**Analisis kelayakan modal, pengendalian kredit dana penguatan**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	-	-	
1.20	05	14	05	5	2	1	Belanja Pegawai	47.400.000,00	47.400.000,00	-	-	
1.20	05	14	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**06**				**Rekonsiliasi modal**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	-	-	
1.20	05	14	06	5	2	1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	45.900.000,00	-	-	
1.20	05	14	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**08**				**Pengendalian dan koordinasi SPJ, pendapatan dan belanja SKPD dlm pelaksanaan APBD**	**107.500.000,00**	**107.500.000,00**	-		
1.20	05	14	08	5	2	1	Belanja Pegawai	100.950.000,00	100.950.000,00	-	-	
1.20	05	14	08	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	6.550.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**09**				**Klarifikasi dan penyusunan SK Bendahara**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	-	-	
1.20	05	14	09	5	2	1	Belanja Pegawai	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-	
1.20	05	14	09	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**10**				**Penelitian SPM dan Penerbitan SP2D**	**90.050.000,00**	**90.050.000,00**	-	-	
1.20	05	14	10	5	2	1	Belanja Pegawai	85.200.000,00	85.200.000,00	-	-	
1.20	05	14	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	4.850.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**11**				**Penelitian data dan register SKPP**	**81.950.000,00**	**81.950.000,00**	-	-	
1.20	05	14	11	5	2	1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	-	-	
1.20	05	14	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	950.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**12**				**Penelitian daftar gaji dan penerbitan realisasi gaji pegawai**	**102.250.000,00**	**151.750.000,00**	**49.500.000,00**	48,41	
1.20	05	14	12	5	2	1	Belanja Pegawai	98.000.000,00	98.000.000,00	-	-	
1.20	05	14	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	53.750.000,00	49.500.000,00	1.164,71	
1.20	**05**	**14**	**13**				**Pengelolaan dana perimbangan**	**134.600.000,00**	**134.600.000,00**	-	-	
1.20	05	14	13	5	2	1	Belanja Pegawai	130.900.000,00	130.900.000,00	-	-	
1.20	05	14	13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hul
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	05	14	13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**14**				**Pelaporan SPT masa dan SPT tahunan (PPh 21)**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	-	-	
1.20	05	14	14	5	2	1	Belanja Pegawai	123.525.000,00	123.525.000,00	-	-	
1.20	05	14	14	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	26.475.000,00	26.475.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**15**				**Manajemen Kasda**	**80.798.000,00**	**80.798.000,00**	-	-	
1.20	05	14	15	5	2	1	Belanja Pegawai	77.500.000,00	77.500.000,00	-	-	
1.20	05	14	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3.298.000,00	3.298.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**16**				**Operasional Pos Bantuan Keuangan**	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	-	-	
1.20	05	14	16	5	2	1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1.20	05	14	16	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1.20	**05**	**14**	**17**				**Perencanaan Keuangan Daerah**	**1.942.365.900,00**	**2.042.365.900,00**	**100.000.000,00**	5,15	
1.20	05	14	17	5	2	1	Belanja Pegawai	1.199.495.000,00	1.200.095.000,00	600.000,00	0,05	
1.20	05	14	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	742.870.900,00	842.270.900,00	99.400.000,00	13,38	
1.20	**05**	**14**	**18**				**Pengadaan Kendaraan Dinas**	**632.098.000,00**	**3.078.840.300,00**	**2.446.742.300,00**	387,08	
1.20	05	14	18	5	2	3	Belanja Modal	632.098.000,00	3.078.840.300,00	2.446.742.300,00	387,08	
1.20	**05**	**14**	**19**				**Pengadaan peralatan dan mesin**	**3.544.902.000,00**	**4.369.772.500,00**	**824.870.500,00**	23,27	
1.20	05	14	19	5	2	3	Belanja Modal	3.544.902.000,00	4.369.772.500,00	824.870.500,00	23,27	
1.20	**05**	**14**	**20**				**Pengadaan Tanah**	**3.900.000.000,00**	**5.193.617.971,01**	**1.293.617.971,01**	33,17	
1.20	05	14	20	5	2	3	Belanja Modal	3.900.000.000,00	5.193.617.971,01	1.293.617.971,01	33,17	
1.20	**05**	**14**	**21**				**Pengadaan mebelair dan perlengkapannya**	**1.950.000.000,00**	**2.328.043.200,00**	**378.043.200,00**	19,39	
1.20	05	14	21	5	2	3	Belanja Modal	1.950.000.000,00	2.328.043.200,00	378.043.200,00	19,39	
1.20	**05**	**14**	**22**				**Pengadaan bahan pakaian kerja dan perlengkapannya**	**6.205.949.500,00**	**6.421.627.500,00**	**215.678.000,00**	3,48	
1.20	05	14	22	5	2	1	Belanja Pegawai	31.900.000,00	36.610.000,00	4.710.000,00	14,76	
1.20	05	14	22	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6.174.049.500,00	6.385.017.500,00	210.968.000,00	3,42	
1.20	**05**	**14**	**23**				**Pengadaan Plakat**	**37.500.000,00**	**267.001.225,00**	**229.501.225,00**	612,00	
1.20	05	14	23	5	2	1	Belanja Pegawai	-	5.730.000,00	5.730.000,00	100,00	
1.20	05	14	23	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	-	261.271.225,00	261.271.225,00	100,00	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hukum
										(Rp)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	**1.20.07**	**17**	**33**				**Pelaporan SPT masa dan Tahunan (PPH21) Tahun 2010**	**113.850.000,00**	**113.850.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	33	5	2	1	Belanja Pegawai	110.500.000,00	110.500.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	33	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	3.350.000,00	3.350.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**34**				**Manajemen Kasda**	**94.122.000,00**	**94.122.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	34	5	2	1	Belanja Pegawai	88.800.000,00	88.800.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	34	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	5.322.000,00	5.322.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**35**				**Operasional Pos Bantuan Keuangan**	**48.500.000,00**	**48.500.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	35	5	2	1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	35	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**36**				**Pengelolaan data dan dokumen dari kas daerah dan rekonsiliasi bank**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	36	5	2	1	Belanja Pegawai	92.480.000,00	92.480.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	36	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	7.520.000,00	7.520.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**37**				**Pengadaan kendaraan dinas**	**3.600.000.000,00**	**3.908.939.140,00**	**308.939.140,00**	**8,58**	
1.20	1.20.07	17	37	5	2	3	Belanja Modal	3.600.000.000,00	3.908.939.140,00	308.939.140,00	8,58	
1.20	**1.20.07**	**17**	**38**				**Pengadaan peralatan dan mesin**	**2.421.607.130,00**	**4.355.462.615,00**	**1.933.855.485,00**	**79,86**	
1.20	1.20.07	17	38	5	2	3	Belanja Modal	2.421.607.130,00	4.355.462.615,00	1.933.855.485,00	79,86	
1.20	**1.20.07**	**17**	**39**				**Pengadaan mabelair dan perlengkapannya**	**2.626.477.400,00**	**2.840.047.400,00**	**213.570.000,00**	**8,13**	
1.20	1.20.07	17	39	5	2	1	Belanja Pegawai	-	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.20	1.20.07	17	39	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	-	50.000.000,00	50.000.000,00		
1.20	1.20.07	17	39	5	2	3	Belanja Modal	2.626.477.400,00	2.788.547.400,00	162.070.000,00	6,17	
1.20	**1.20.07**	**17**	**40**				**Pengelolaan aktiva tetap dan check fisik barang**	**426.200.000,00**	**519.587.500,00**	**93.387.500,00**	**21,91**	
1.20	1.20.07	17	40	5	2	1	Belanja Pegawai	63.300.000,00	78.412.500,00	15.112.500,00	23,87	
1.20	1.20.07	17	40	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	362.900.000,00	441.175.000,00	78.275.000,00	21,57	
1.20	**1.20.07**	**17**	**41**				**Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	41	5	2	1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	41	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**42**				**Penghapusan Aktiva tetap**	**80.000.000,00**	**105.470.000,00**	**25.470.000,00**	**31,84**	
1.20	1.20.07	17	42	5	2	1	Belanja Pegawai	71.390.000,00	94.910.000,00	23.520.000,00	32,95	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hukum
										(Rp)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	1.20.07	17	42	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	8.610.000,00	10.560.000,00	1.950.000,00	22,65	
1.20	**1.20.07**	**17**	**43**				**Penyusunan dan Pengesahan DPAL**	**13.342.500,00**	**13.342.500,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	43	5	2	1	Belanja Pegawai	11.855.000,00	11.855.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	43	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	1.487.500,00	1.487.500,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**44**				**Penyusunan Perda dan Perbup Tentang APBD**	**1.205.759.250,00**	**1.230.759.250,00**	**25.000.000,00**	**2,07**	
1.20	1.20.07	17	44	5	2	1	Belanja Pegawai	678.220.000,00	678.220.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	44	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	527.539.250,00	552.539.250,00	25.000.000,00	4,74	
1.20	**1.20.07**	**17**	**45**				**Penyusunan dan Pengesahan DPA dan DPPA**	**199.549.250,00**	**199.549.250,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	45	5	2	1	Belanja Pegawai	151.770.000,00	151.770.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	45	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	47.779.250,00	47.779.250,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**46**				**Penyusunan Anggaran Kas**	**25.251.500,00**	**25.251.500,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	46	5	2	1	Belanja Pegawai	17.170.000,00	17.170.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	46	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	8.081.500,00	8.081.500,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**47**				**Penyusunan Instruksi Anggaran**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	47	5	2	1	Belanja Pegawai	28.150.000,00	28.150.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	47	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	11.850.000,00	11.850.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**48**				**Evaluasi Laporan Barang dan TPTGR**	**91.000.000,00**	**108.400.000,00**	**17.400.000,00**	**19,12**	
1.20	1.20.07	17	48	5	2	1	Belanja Pegawai	63.600.000,00	79.800.000,00	16.200.000,00	25,47	
1.20	1.20.07	17	48	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	27.400.000,00	28.600.000,00	1.200.000,00	4,38	
1.20	**1.20.07**	**17**	**49**				**Pengkajian dan Pemanfaatan Aset Daerah**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	49	5	2	1	Belanja Pegawai	59.950.000,00	59.950.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	49	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	10.050.000,00	10.050.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**50**				**Pendistribusian Barang Daerah**	**50.000.000,00**	**81.200.000,00**	**31.200.000,00**	**62,40**	
1.20	1.20.07	17	50	5	2	1	Belanja Pegawai	42.600.000,00	71.340.000,00	28.740.000,00	64,08	
1.20	1.20.07	17	50	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	7.400.000,00	9.860.000,00	2.460.000,00	33,24	
1.20	**1.20.07**	**17**	**51**				**Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah**	**150.000.000,00**	**170.000.000,00**	**20.000.000,00**	**13,33**	
1.20	1.20.07	17	51	5	2	1	Belanja Pegawai	47.800.000,00	66.000.000,00	18.200.000,00	38,08	
1.20	1.20.07	17	51	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	102.200.000,00	104.000.000,00	1.800.000,00	1,76	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hukum
										(Rp)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	**1.20.07**	**17**	**52**				**Pelatihan Pengurus barang dalam penggunaan SIM ASET**	**70.149.000,00**	**-**	**(70.149.000,00)**	**(100,00)**	
1.20	1.20.07	17	52	5	2	1	Belanja Pegawai	45.225.000,00	-	(45.225.000,00)	(100,00)	
1.20	1.20.07	17	52	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	24.924.000,00	-	(24.924.000,00)	(100,00)	
1.20	**1.20.07**	**17**	**53**				**Pengkajian Hibah gedung SD**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**	
1.20	1.20.07	17	53	5	2	1	Belanja Pegawai	60.400.000,00	60.400.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	53	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	14.600.000,00	14.600.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**54**				**Penyempurnaan SIM ASET**	**70.750.000,00**	**70.750.000,00**	**-**	**-**	
1.20	1.20.07	17	54	5	2	1	Belanja Pegawai	59.955.000,00	59.955.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	54	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	10.795.000,00	10.795.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**55**				**Penyusunan SK Bendahara Klarifikasi dan Penyusunan SK Bendahara**	**24.165.000,00**	**24.165.000,00**	**-**	**-**	
1.20	1.20.07	17	55	5	2	1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	55	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	4.165.000,00	4.165.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**56**				**Analisis SPM dan penerbitan SP2D**	**92.301.500,00**	**92.301.500,00**	**-**	**-**	
1.20	1.20.07	17	56	5	2	1	Belanja Pegawai	85.200.000,00	85.200.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	56	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	7.101.500,00	7.101.500,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**57**				**Analisis data dan penerbitan SKPP**	**82.300.000,00**	**82.300.000,00**	**-**	**-**	
1.20	1.20.07	17	57	5	2	1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	57	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**58**				**Analisis data gaji, upgrade sofware aplikasi SP2D dan Kartu gaji**	**157.844.000,00**	**157.844.000,00**	**-**	**-**	
1.20	1.20.07	17	58	5	2	1	Belanja Pegawai	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	58	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	72.844.000,00	72.844.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**59**				**Pengelolaan dan pengendalian dana transfer dan bagi hasil propinsi**	**139.250.000,00**	**93.068.000,00**	**(46.182.000,00)**	**(33,16)**	
1.20	1.20.07	17	59	5	2	1	Belanja Pegawai	136.300.000,00	88.450.000,00	(47.850.000,00)	(35,11)	
1.20	1.20.07	17	59	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	2.950.000,00	4.618.000,00	1.668.000,00	56,54	
1.20	**1.20.07**	**17**	**60**				**Forkom dan monev pengelolaan administrasi gaji**	**37.325.500,00**	**37.325.500,00**	**-**	**-**	
1.20	1.20.07	17	60	5	2	1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	60	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	8.725.500,00	8.725.500,00	-	-	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hukum
										(Rp)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	1.20.07	17	61				Pembinaan Bendaharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	61	5	2	1	Belanja Pegawai	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	61	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**62**				**Validasi SPJ dan Koordinasi administrasi pelaksanaan APBD**	**107.500.000,00**	**107.500.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	62	5	2	1	Belanja Pegawai	103.275.000,00	103.275.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	62	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	4.225.000,00	4.225.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**63**				**Administasi Pengelolaan Keuangan Daerah**	**35.028.500,00**	**35.028.500,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	63	5	2	1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	29.700.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	63	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	5.328.500,00	5.328.500,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**64**				**Sofware Pengelolaan Keuangan Daerah**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	64	5	2	1	Belanja Pegawai	67.330.000,00	67.330.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	64	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	8.170.000,00	8.170.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	64	5	2	2	Belanja Modal	74.500.000,00	74.500.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**65**				**Penyusunan Data Series**	**25.000.000,00**	-	**(25.000.000,00)**	**(100,00)**	
1.20	1.20.07	17	65	5	2	1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.20	1.20.07	17	65	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20	**1.20.07**	**17**	**66**				**Pengadaan Plakat dan kalender**	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	66	5	2	1	Belanja Pegawai	5.025.000,00	5.025.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	66	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	264.975.000,00	264.975.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**67**				**Penyusunan Draf Regulasi Pengelolaan Barang Daerah**	**26.419.000,00**	**26.419.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	67	5	2	1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	67	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	6.419.000,00	6.419.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**68**				**Penyusunan Dokumen status penggunaan aset daerah**	**35.747.500,00**	**35.747.500,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	68	5	2	1	Belanja Pegawai	25.350.000,00	25.350.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	68	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	10.397.500,00	10.397.500,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**69**				**Survey dan analisis investasi**	**100.000.000,00**	**66.198.000,00**	(33.802.000,00)	(33,80)	
1.20	1.20.07	17	69	5	2	1	Belanja Pegawai	84.020.000,00	56.420.000,00	(27.600.000,00)	(32,85)	
1.20	1.20.07	17	69	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	15.980.000,00	9.778.000,00	(6.202.000,00)	(38,81)	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hukum
										(Rp)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	**1.20.07**	**17**	**70**				**Evaluasi Investasi**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	70	5	2	1	Belanja Pegawai	44.480.000,00	44.480.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	17	70	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**72**				**Pengadaan Tanah**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	17	72	5	2	3	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**17**	**73**				**Kajian Kebijakan Investasi**	-	**33.802.000,00**	**33.802.000,00**	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	17	73	5	2	1	Belanja Pegawai	-	29.700.000,00	29.700.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	17	73	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	-	4.102.000,00	4.102.000,00	#DIV/0!	
1.20	**1.20.07**	**17**	**74**				**Pengadaan Pakaian Dinas**	-	45.000.000,00	45.000.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	17	74	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	-	45.000.000,00	45.000.000,00	#DIV/0!	
1.20	**1.20.07**	**17**	**75**				**Tindak lanjut Perpres gaji 13**	-	**37.750.000,00**	**37.750.000,00**	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	17	75	5	2	1	Belanja Pegawai	-	35.370.000,00	35.370.000,00	#DIV/0!	
1.20	**1.20.07**	**17**	**75**	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	-	2.380.000,00	2.380.000,00	#DIV/0!	
1.20	**1.20.07**	**17**	**76**				**Regulasi Pengendalian Kasda**	-	**27.109.600,00**	**27.109.600,00**	**#DIV/0!**	
1.20	1.20.07	17	76	5	2	1	Belanja Pegawai	-	23.100.000,00	23.100.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	17	76	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	-	4.009.600,00	4.009.600,00	#DIV/0!	
1.20	**1.20.07**	**17**	**77**				**Pelatihan Pengurus Barang**	-	**70.149.000,00**	**70.149.000,00**	**#DIV/0!**	
1.20	1.20.07	17	77	5	2	1	Belanja Pegawai	-	45.225.000,00	45.225.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	17	77	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	-	24.924.000,00	24.924.000,00	#DIV/0!	
1.20	**1.20.07**	**29**					**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	-	-	
1.20	**1.20.07**	**29**	**07**				**Pelatihan Profesional Petugas PBB**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	29	07	5	2	1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	29	07	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	28.150.000,00	28.150.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**					**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**6.622.877.000,00**	**7.932.972.310,00**	**1.310.095.310,00**	**19,78**	
1.20	**1.20.07**	**38**	**01**				**Pendaftaran Calon WP dan pemantauan WP Daerah**	**170.000.000,00**	**191.300.000,00**	**21.300.000,00**	**12,53**	
1.20	1.20.07	38	01	5	2	1	Belanja Pegawai	131.000.000,00	151.700.000,00	20.700.000,00	15,80	
1.20	1.20.07	38	01	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	39.000.000,00	39.600.000,00	600.000,00	1,54	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hukum
										(Rp)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	**1.20.07**	**38**	**02**				**Pemeriksaan Pajak Daerah**	**199.000.000,00**	**347.570.000,00**	**148.570.000,00**	**74,66**	
1.20	1.20.07	38	02	5	2	1	Belanja Pegawai	191.590.000,00	331.900.000,00	140.310.000,00	73,23	
1.20	1.20.07	38	02	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	7.410.000,00	15.670.000,00	8.260.000,00	111,47	
1.20	**1.20.07**	**38**	**03**				**Pemantauan WP Daerah dan pemantauan malam natal dan tahun baru**	**185.000.000,00**	**264.670.000,00**	**79.670.000,00**	**43,06**	
1.20	1.20.07	38	03	5	2	1	Belanja Pegawai	183.515.000,00	263.185.000,00	79.670.000,00	43,41	
1.20	1.20.07	38	03	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	1.485.000,00	1.485.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**04**				**Intensifikasi Pajak Reklame**	**212.580.000,00**	**331.380.000,00**	**118.800.000,00**	**55,88**	
1.20	1.20.07	38	04	5	2	1	Belanja Pegawai	212.580.000,00	331.380.000,00	118.800.000,00	55,88	
1.20	**1.20.07**	**38**	**05**				**Pengelolaan aplikasi sistem MAPATDA**	**89.000.000,00**	**119.110.000,00**	**30.110.000,00**	**33,83**	
1.20	1.20.07	38	05	5	2	1	Belanja Pegawai	85.390.000,00	115.500.000,00	30.110.000,00	35,26	
1.20	1.20.07	38	05	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	3.610.000,00	3.610.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**06**				**Pengelolaan Titik lokasi reklame**	**185.000.000,00**	**185.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	06	5	2	1	Belanja Pegawai	103.880.000,00	103.880.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	06	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	81.120.000,00	81.120.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**07**				**Penetapan Pajak Daerah**	**152.000.000,00**	**152.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	07	5	2	1	Belanja Pegawai	123.840.000,00	123.840.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	07	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	28.160.000,00	28.160.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**08**				**Analisis hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan pajak daerah**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	08	5	2	1	Belanja Pegawai	70.400.000,00	70.400.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	08	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**09**				**Penyediaan Surat ketetapan Pajak PPJU**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	09	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**10**				**Penagihan Pajak Daerah**	**373.000.000,00**	**425.350.000,00**	**52.350.000,00**	**14,03**	
1.20	1.20.07	38	10	5	2	1	Belanja Pegawai	326.850.000,00	379.200.000,00	52.350.000,00	16,02	
1.20	1.20.07	38	10	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	45.692.000,00	45.692.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	10	5	2	3	Belanja Modal	458.000,00	458.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**11**				**Pelayanan keberatan dan keringan Pajak Daerah**	**51.000.000,00**	**64.250.000,00**	**13.250.000,00**	**25,98**	
1.20	1.20.07	38	11	5	2	1	Belanja Pegawai	39.750.000,00	53.000.000,00	13.250.000,00	33,33	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hukum
										(Rp)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	1.20.07	38	11	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	10.563.000,00	10.563.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	11	5	2	3	Belanja Modal	687.000,00	687.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**12**				**Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan kaliurang**	**175.525.000,00**	**193.150.000,00**	**17.625.000,00**	**10,04**	
1.20	1.20.07	38	12	5	2	1	Belanja Pegawai	135.900.000,00	147.100.000,00	11.200.000,00	8,24	
1.20	1.20.07	38	12	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	38.709.000,00	45.134.000,00	6.425.000,00	16,60	
1.20	1.20.07	38	12	5	2	3	Belanja Modal	916.000,00	916.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**13**				**Pembinaan Wajib Pajak Daerah**	**34.000.000,00**	**43.300.000,00**	**9.300.000,00**	**27,35**	
1.20	1.20.07	38	13	5	2	1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	27.900.000,00	9.300.000,00	50,00	
1.20	1.20.07	38	13	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**14**				**Pengembalian PHR**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	14	5	2	1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	14	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**15**				**Evaluasi PAD**	**193.000.000,00**	**193.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	15	5	2	1	Belanja Pegawai	138.800.000,00	138.800.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	15	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	54.200.000,00	54.200.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**16**				**Bagi Hasil Pajak**	**229.000.000,00**	**229.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	16	5	2	1	Belanja Pegawai	193.420.000,00	193.420.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	16	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	35.580.000,00	35.580.000,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**17**				**Pengelolaan PBB**	**1.292.000.000,00**	**1.477.329.450,00**	**185.329.450,00**	**14,34**	
1.20	1.20.07	38	17	5	2	1	Belanja Pegawai	1.057.150.000,00	1.129.950.000,00	72.800.000,00	6,89	
1.20	1.20.07	38	17	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	234.850.000,00	347.379.450,00	112.529.450,00	47,92	
1.20	**1.20.07**	**38**	**18**				**Pendataan dan pemeliharaan basis data**	**464.000.000,00**	**464.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	18	5	2	1	Belanja Pegawai	388.752.500,00	388.752.500,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	18	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	75.247.500,00	75.247.500,00	-	-	
1.20	**1.20.07**	**38**	**19**				**Pembinaan dan operasional BPHTB**	**650.000.000,00**	**905.975.000,00**	**255.975.000,00**	**39,38**	
1.20	1.20.07	38	19	5	2	1	Belanja Pegawai	605.900.000,00	855.625.000,00	249.725.000,00	41,22	
1.20	1.20.07	38	19	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	44.100.000,00	50.350.000,00	6.250.000,00	14,17	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hukum
										(Rp)	%	
1							2	3	4	5	6	7
1.20	1.20.07	38	20				**Pemeliharaan Stadion**	**1.333.992.000,00**	**1.333.992.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	20	5	2	1	Belanja Pegawai	445.806.000,00	427.832.000,00	(17.974.000,00)	(4,03)	
1.20	1.20.07	38	20	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	715.536.000,00	733.510.000,00	17.974.000,00	2,51	
1.20	1.20.07	38	20	5	2	3	Belanja Modal	172.650.000,00	172.650.000,00	-		
1.20	1.20.07	38	21				**Penyusunan dan pemasaran stadion Maguwoharjo**	**160.500.000,00**	**160.500.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	21	5	2	1	Belanja Pegawai	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	21	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	123.500.000,00	123.500.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	22				**Kajian Sarana dan prasarana aset kabupaten**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	22	5	2	1	Belanja Pegawai	86.365.000,00	86.365.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	22	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	13.635.000,00	13.635.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	23				**Penyusunan pedoman pengelolaan stadion Maguwoharjo**	**26.280.000,00**	**26.280.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	23	5	2	1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	23	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	6.280.000,00	6.280.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	24				**Analisis Potensi PAD**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	-	-	
1.20	1.20.07	38	24	5	2	1	Belanja Pegawai	1.875.000,00	1.875.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	24	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	98.125.000,00	98.125.000,00	-	-	
1.20	1.20.07	38	26				**Penyusunan Draf Raperda Pajak Hotel dan Raperbup Petunjuk Pelaksanaan**	-	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**#DIV/0!**	
1.20	1.20.07	38	26	5	2	1	Belanja Pegawai	-	37.800.000,00	37.800.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	38	26	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	-	2.200.000,00	2.200.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	38	27				**Penyusunan Draf Raperda Pajak Restoran dan Raperbup Petunjuk Pelaksanaan**	-	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**#DIV/0!**	
1.20	1.20.07	38	27	5	2	1	Belanja Pegawai	-	37.800.000,00	37.800.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	38	27	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	-	2.200.000,00	2.200.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	38	28				**Penyusunan Draf Raperda Pajak Hiburan dan Raperbup Petunjuk Pelaksanaan**	-	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**#DIV/0!**	
1.20	1.20.07	38	28	5	2	1	Belanja Pegawai	-	37.800.000,00	37.800.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	38	28	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	-	2.200.000,00	2.200.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	38	29				**Penyusunan Draf Raperda Pajak Reklame dan Raperbup Nilai Sewa Reklame**	-	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**#DIV/0!**	
1.20	1.20.07	38	29	5	2	1	Belanja Pegawai	-	37.800.000,00	37.800.000,00	#DIV/0!	
1.20	1.20.07	38	29	5	2	2	Belanja Barang dan jasa	-	2.200.000,00	2.200.000,00	#DIV/0!	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah	Dasar Hukum
1							2	3	4
1.20	**1.20.07**	**17**	**91**				**Analisis Investasi**	**68.300.000,00**	
1.20	1.20.07	17	91	5	2	1	Belanja Pegawai	55.250.000,00	
1.20	1.20.07	17	91	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
1.20	**1.20.07**	**17**	**92**				**Pelaksanaan Akuntansi dan Pertanggungjawaban keuangan SKPKD**	**32.440.000,00**	
1.20	1.20.07	17	92	5	2	1	Belanja Pegawai	32.130.000,00	
1.20	1.20.07	17	92	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	310.000,00	
1.20	**1.20.07**	**17**	**93**				**Fasilitasi TPTGR**	**49.150.000,00**	
1.20	1.20.07	17	93	5	2	1	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.20	1.20.07	17	93	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.20	**1.20.07**	**17**	**94**				**Klarifikasi Calon Bendahara dan Pembinaan Bendaharaan**	**54.100.000,00**	
1.20	1.20.07	17	94	5	2	1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.20	1.20.07	17	94	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.20	**1.20.07**	**17**	**95**				**Penyus. Pedoman adm. gaji pegawai dan Pembinaan pengel. Gaji**	**30.260.000,00**	
1.20	1.20.07	17	95	5	2	1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	
1.20	1.20.07	17	95	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	
1.20	**1.20.07**	**29**					**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**34.000.000,00**	
1.20	**1.20.07**	**29**	**07**				**Pelatihan Profesional Petugas PBB**	**34.000.000,00**	
1.20	1.20.07	29	07	5	2	1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	
1.20	1.20.07	29	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	22.150.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**					**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**8.411.673.140,00**	
1.20	**1.20.07**	**38**	**01**				**Pendaftaran Calon WP dan pemantauan WP Daerah**	**147.992.000,00**	
1.20	1.20.07	38	01	5	2	1	Belanja Pegawai	121.000.000,00	
1.20	1.20.07	38	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	26.992.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**02**				**Pemeriksaan Pajak Daerah**	**296.750.000,00**	
1.20	1.20.07	38	02	5	2	1	Belanja Pegawai	290.000.000,00	
1.20	1.20.07	38	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**07**				**Penetapan Pajak Daerah**	**273.366.000,00**	
1.20	1.20.07	38	07	5	2	1	Belanja Pegawai	225.000.000,00	
1.20	1.20.07	38	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48.366.000,00	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah	Dasar Hukum
1							2	3	4
1.20	**1.20.07**	**38**	**10**				**Penagihan Pajak Daerah**	**703.497.000,00**	
1.20	1.20.07	38	10	5	2	1	Belanja Pegawai	676.200.000,00	
1.20	1.20.07	38	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27.297.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**12**				**Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan kaliurang**	**202.150.000,00**	
1.20	1.20.07	38	12	5	2	1	Belanja Pegawai	146.100.000,00	
1.20	1.20.07	38	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	55.134.000,00	
1.20	1.20.07	38	12	5	2	3	Belanja Modal	916.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**15**				**Evaluasi PAD**	**170.185.000,00**	
1.20	1.20.07	38	15	5	2	1	Belanja Pegawai	142.200.000,00	
1.20	1.20.07	38	15	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	27.985.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**18**				**Pendataan dan pemeliharaan basis data PBB**	**703.145.390,00**	
1.20	1.20.07	38	18	5	2	1	Belanja Pegawai	594.800.000,00	
1.20	1.20.07	38	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	108.345.390,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**20**				**Pemeliharaan Stadion**	**1.276.159.000,00**	
1.20	1.20.07	38	20	5	2	1	Belanja Pegawai	487.318.000,00	
1.20	1.20.07	38	20	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	788.841.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**35**				**Operasional Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman**	**228.750.000,00**	
1.20	1.20.07	38	35	5	2	1	Belanja Pegawai	222.000.000,00	
1.20	1.20.07	38	35	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**36**				**Penyampaian SPPT PBB dan Pembayaran PBB Panutan**	**599.141.000,00**	
1.20	1.20.07	38	36	5	2	1	Belanja Pegawai	484.100.000,00	
1.20	1.20.07	38	36	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	115.041.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**37**				**Publikasi dan pemasaran stadion Maguwoharjo**	**140.000.000,00**	
1.20	1.20.07	38	37	5	2	1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.20	1.20.07	38	37	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**38**				**Pengadaan Sapras Stadion**	**305.000.000,00**	
1.20	1.20.07	38	38	5	2	1	Belanja Pegawai	5.670.000,00	
1.20	1.20.07	38	38	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	32.030.000,00	
1.20	1.20.07	38	38	5	2	3	Belanja Modal	267.300.000,00	
1.20	1.20.07	38	39				Konseling BPHTB	67.152.500,00	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah	Dasar Hukum
1							2	3	4
1.20	1.20.07	38	39	5	2	1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.20	1.20.07	38	39	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	8.952.500,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**40**				**Sosialisasi PAD**	**140.000.000,00**	
1.20	1.20.07	38	40	5	2	1	Belanja Pegawai	53.500.000,00	
1.20	1.20.07	38	40	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	86.500.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**41**				**Pendataan Wajib Pajak**	**275.093.000,00**	
1.20	1.20.07	38	41	5	2	1	Belanja Pegawai	244.830.000,00	
1.20	1.20.07	38	41	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	30.263.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**42**				**Pemantauan dan Pembinaan WP Daerah**	**631.750.000,00**	
1.20	1.20.07	38	42	5	2	1	Belanja Pegawai	625.000.000,00	
1.20	1.20.07	38	42	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**43**				**Fasilitasi pajak hotel dan restoran**	**25.000.000,00**	
1.20	1.20.07	38	43	5	2	1	Belanja Pegawai	11.900.000,00	
1.20	1.20.07	38	43	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**44**				**Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah**	**64.250.000,00**	
1.20	1.20.07	38	44	5	2	1	Belanja Pegawai	54.500.000,00	
1.20	1.20.07	38	44	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	9.063.000,00	
1.20	1.20.07	38	44	5	2	3	Belanja Modal	687.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**45**				**Pelayanan pajak bumi dan bangunan**	**1.066.267.910,00**	
1.20	1.20.07	38	45	5	2	1	Belanja Pegawai	856.900.000,00	
1.20	1.20.07	38	45	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	209.367.910,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**46**				**Rekonsiliasi penerimaan PBB**	**83.374.800,00**	
1.20	1.20.07	38	46	5	2	1	Belanja Pegawai	64.625.000,00	
1.20	1.20.07	38	46	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	18.749.800,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**47**				**Penelitian SSPD dan BPHTB**	**617.150.000,00**	
1.20	1.20.07	38	47	5	2	1	Belanja Pegawai	592.000.000,00	
1.20	1.20.07	38	47	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**48**				**Pengendalian penerimaan dan tunggakan pajak daerah**	**101.834.000,00**	
1.20	1.20.07	38	48	5	2	1	Belanja Pegawai	88.800.000,00	
1.20	1.20.07	38	48	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	13.034.000,00	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah	Dasar Hukum
1							2	3	4
1.20	**1.20.07**	**38**	**49**				**Pendampingan intensifikasi PPh OPDN**	**213.665.540,00**	
1.20	1.20.07	38	49	5	2	1	Belanja Pegawai	177.950.000,00	
1.20	1.20.07	38	49	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	35.715.540,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**50**				**Penyusunan draf raperda pajak penerangan jalan**	**20.000.000,00**	
1.20	1.20.07	38	50	5	2	1	Belanja Pegawai	18.960.000,00	
1.20	1.20.07	38	50	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**51**				**Penyusunan draf raperda pajak parkir**	**20.000.000,00**	
1.20	1.20.07	38	51	5	2	1	Belanja Pegawai	18.960.000,00	
1.20	1.20.07	38	51	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**52**				**Penyusunan draf raperda pajak MBLB**	**20.000.000,00**	
1.20	1.20.07	38	52	5	2	1	Belanja Pegawai	18.960.000,00	
1.20	1.20.07	38	52	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
1.20	**1.20.07**	**38**	**53**				**Penyusunan draf raperda pajak sarang burung walet**	**20.000.000,00**	
1.20	1.20.07	38	53	5	2	1	Belanja Pegawai	18.960.000,00	
1.20	1.20.07	38	53	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
1.20	**1.20.07**	**00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN DAERAH**	**46.438.450.764,28**	
1.20	**1.20.07**	**00**	**00**	**6**	**1**		**Penerimaan pembiayaan Daerah**	**60.176.450.764,28**	
1.20	1.20.07	00	00	6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.176.450.764,28	
1.20	**1.20.07**	**00**	**00**	**6**	**2**		**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**13.738.000.000,00**	
1.20	1.20.07	00	00	6	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	
1.20	1.20.07	00	00	6	2	3	Pembayaran Pokok Utang	138.000.000,00	
1.20	1.20.07	00	00	6	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	6.100.500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 29 07 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	13.615.000,00	-	13.615.000,00	13.615.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 29 07 5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**6.720.000,00**	**-**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**720.000,00**	**89,29**
1.20 1.20.28 29 07 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid	720.000,00			-	720.000,00	-
1.20 1.20.28 29 07 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 29 07 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.575.000,00**	**-**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**175.000,00**	**95,10**
1.20 1.20.28 29 07 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.575.000,00	-	3.400.000,00	3.400.000,00	175.000,00	95,10
1.20 1.20.28 29 07 5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.240.000,00**	**-**	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**	**2.300.000,00**	**45,75**
1.20 1.20.28 29 07 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.240.000,00	-	1.940.000,00	1.940.000,00	2.300.000,00	45,75
1.20 1.20.28 29 07 5 2 2 17	**Belj Kursus, Pelat. Sosialisasi & bimbTeknis**	**141.800.000,00**	**93.750.000,00**	**-**	**93.750.000,00**	**48.050.000,00**	**66,11**
1.20 1.20.28 29 07 5 2 2 17 01	Belanja kursus kursus singkat	141.800.000,00	93.750.000,00		93.750.000,00	48.050.000,00	66,11
1.20 1.20.28 38	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**8.776.040.000,00**	**2.527.138.193,66**	**4.121.318.496,00**	**6.648.456.689,66**	**2.127.583.310,34**	**75,76**
1.20 1.20.28 38 01	**Pendaf.Calon WP & pemantauan WP Daerah**	**165.000.000,00**	**41.275.000,00**	**71.415.000,00**	**112.690.000,00**	**52.310.000,00**	**68,30**
1.20 1.20.28 38 01 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	143.520.000,00	39.000.000,00	60.000.000,00	99.000.000,00	44.520.000,00	68,98
1.20 1.20.28 38 01 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	**143.520.000,00**	**39.000.000,00**	**60.000.000,00**	**99.000.000,00**	**44.520.000,00**	**68,98**
1.20 1.20.28 38 01 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.520.000,00	39.000.000,00	60.000.000,00	99.000.000,00	44.520.000,00	68,98
1.20 1.20.28 38 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.480.000,00	2.275.000,00	11.415.000,00	13.690.000,00	7.790.000,00	63,73
1.20 1.20.28 38 01 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.380.000,00**	**-**	**7.380.000,00**	**7.380.000,00**	**-**	**100,00**
1.20 1.20.28 38 01 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	7.380.000,00	-	7.380.000,00	7.380.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 01 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.100.000,00**	**1.815.000,00**	**3.675.000,00**	**5.490.000,00**	**2.610.000,00**	**67,78**
1.20 1.20.28 38 01 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00	1.815.000,00	3.675.000,00	5.490.000,00	2.610.000,00	67,78
1.20 1.20.28 38 01 5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.000.000,00**	**460.000,00**	**360.000,00**	**820.000,00**	**5.180.000,00**	**13,67**
1.20 1.20.28 38 01 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	460.000,00	360.000,00	820.000,00	5.180.000,00	13,67
1.20 1.20.28 38 02	**Pemeriksaan Pajak Daerah**	**320.000.000,00**	**306.399.000,00**	**-**	**306.399.000,00**	**13.601.000,00**	**95,75**
1.20 1.20.28 38 02 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	224.800.000,00	213.075.000,00	-	213.075.000,00	11.725.000,00	94,78
1.20 1.20.28 38 02 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	**224.800.000,00**	**213.075.000,00**	**-**	**213.075.000,00**	**11.725.000,00**	**94,78**
1.20 1.20.28 38 02 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	224.000.000,00	213.075.000,00		213.075.000,00	10.925.000,00	95,12
1.20 1.20.28 38 02 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00				800.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 38 02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.200.000,00	93.324.000,00	-	93.324.000,00	1.876.000,00	98,03
1.20 1.20.28 29 02 5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-
1.20 1.20.28 29 02 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	160.000,00				160.000,00	-
1.20 1.20.28 38 02 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	5.040.000,00	4.620.000,00	-	4.620.000,00	420.000,00	91,67
1.20 1.20.28 38 02 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	4.620.000,00		4.620.000,00	420.000,00	91,67
1.20 1.20.28 38 02 5 2 2 21	**Belanja Jasa Konsultasi**	90.000.000,00	88.704.000,00	-	88.704.000,00	1.296.000,00	98,56
1.20 1.20.28 38 02 5 2 2 21 01	Belj jasa konsultasi penelitian/pemeriksaan	90.000.000,00	88.704.000,00		88.704.000,00	1.296.000,00	98,56
1.20 1.20.28 38 07	**Penetapan Pajak Daerah**	491.000.000,00	166.031.900,00	181.432.000,00	347.463.900,00	143.536.100,00	70,77
1.20 1.20.28 38 07 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	443.200.000,00	147.027.900,00	156.437.500,00	303.465.400,00	139.734.600,00	68,47
1.20 1.20.28 38 07 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	443.200.000,00	147.027.900,00	156.437.500,00	303.465.400,00	139.734.600,00	68,47
1.20 1.20.28 38 07 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	443.200.000,00	147.027.900,00	156.437.500,00	303.465.400,00	139.734.600,00	68,47
1.20 1.20.28 38 07 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.800.000,00	19.004.000,00	24.994.500,00	43.998.500,00	3.801.500,00	92,05
1.20 1.20.28 38 07 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	26.440.000,00	14.979.000,00	9.987.000,00	24.966.000,00	1.474.000,00	94,43
1.20 1.20.28 38 07 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	26.440.000,00	14.979.000,00	9.987.000,00	24.966.000,00	1.474.000,00	94,43
1.20 1.20.28 38 07 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	12.960.000,00	2.625.000,00	10.267.500,00	12.892.500,00	67.500,00	99,48
1.20 1.20.28 38 07 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.960.000,00	2.625.000,00	10.267.500,00	12.892.500,00	67.500,00	99,48
1.20 1.20.28 38 07 5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**	8.400.000,00	1.400.000,00	4.740.000,00	6.140.000,00	2.260.000,00	73,10
1.20 1.20.28 38 07 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	1.400.000,00	4.740.000,00	6.140.000,00	2.260.000,00	73,10
1.20 1.20.28 38 10	**Penagihan Pajak Daerah**	773.000.000,00	197.039.500,00	312.766.000,00	509.805.500,00	263.194.500,00	65,95
1.20 1.20.28 38 10 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	739.470.000,00	187.935.500,00	303.830.000,00	491.765.500,00	247.704.500,00	166,03
1.20 1.20.28 38 10 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	729.270.000,00	182.835.500,00	298.730.000,00	481.565.500,00	247.704.500,00	66,03
1.20 1.20.28 38 10 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	729.270.000,00	182.835.500,00	298.730.000,00	481.565.500,00	247.704.500,00	66,03
1.20 1.20.28 38 10 5 2 1 02	**Honorarium Non PNS**	10.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	10.200.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 10 5 2 1 02 03	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Harian	10.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	10.200.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 10 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.530.000,00	9.104.000,00	8.936.000,00	18.040.000,00	15.490.000,00	53,80

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 38 10 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.430.000,00	4.234.000,00	4.196.000,00	8.430.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 10 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8.430.000,00	4.234.000,00	4.196.000,00	8.430.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 10 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 10 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 10 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	4.050.000,00	3.900.000,00	7.950.000,00	8.250.000,00	49,07
1.20 1.20.28 38 10 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.200.000,00	4.050.000,00	3.900.000,00	7.950.000,00	8.250.000,00	49,07
1.20 1.20.28 38 10 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	820.000,00	340.000,00	1.160.000,00	7.240.000,00	13,81
1.20 1.20.28 38 10 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	820.000,00	340.000,00	1.160.000,00	7.240.000,00	13,81
1.20 1.20.28 38 12	Op.pemungutan retr.masuk kawasan xurang	252.000.000,00	93.233.881,00	110.189.675,00	203.423.556,00	48.576.444,00	80,72
1.20 1.20.28 38 12 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	146.100.000,00	52.500.000,00	89.250.000,00	141.750.000,00	4.350.000,00	97,02
1.20 1.20.28 38 12 5 2 1 01	Honorarium PNS	142.500.000,00	51.300.000,00	86.850.000,00	138.150.000,00	4.350.000,00	96,95
1.20 1.20.28 38 12 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.500.000,00	51.300.000,00	86.850.000,00	138.150.000,00	4.350.000,00	96,95
1.20 1.20.28 38 12 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 12 5 2 1 02 03	Honorarium pegawai tidak tetap harian	3.600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 12 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.984.000,00	40.733.881,00	20.939.675,00	61.673.556,00	43.310.444,00	58,75
1.20 1.20.28 38 12 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.784.000,00	3.076.825,00	2.707.175,00	5.784.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 12 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	5.784.000,00	3.076.825,00	2.707.175,00	5.784.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 12 5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi	50.000.000,00	27.112.056,00	-	27.112.056,00	22.887.944,00	54,22
1.20 1.20.28 38 12 5 2 2 04 05	Belanja Premi Asuransi Obyek Wisata	50.000.000,00	27.112.056,00	-	27.112.056,00	22.887.944,00	54,22
1.20 1.20.28 38 12 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.200.000,00	10.545.000,00	18.232.500,00	28.777.500,00	20.422.500,00	58,49
1.20 1.20.28 38 12 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	1.050.000,00	2.737.500,00	3.787.500,00	1.612.500,00	70,14
1.20 1.20.28 38 12 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur	43.800.000,00	9.495.000,00	15.495.000,00	24.990.000,00	18.810.000,00	57,05
1.20 1.20.28 38 12 5 2 3	BELANJA MODAL	916.000,00	-	-	-	916.000,00	-
1.20 1.20.28 38 12 5 2 3 10	Belanja modal pengadaan Peralatan kantor	916.000,00	-	-	-	916.000,00	-
1.20 1.20.28 38 12 5 2 3 10 01	Belanja modal pengadaan mesin hitung	916.000,00			-	916.000,00	-
1.20 1.20.28 38 15	Evaluasi PAD	179.000.000,00	46.037.500,00	126.287.500,00	172.325.000,00	6.675.000,00	96,27
1.20 1.20.28 38 15 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	142.200.000,00	35.950.000,00	106.100.000,00	142.050.000,00	150.000,00	99,89

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 38 15 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	142.200.000,00	35.950.000,00	106.100.000,00	142.050.000,00	150.000,00	99,89
1.20 1.20.28 38 15 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.200.000,00	35.950.000,00	106.100.000,00	142.050.000,00	150.000,00	99,89
1.20 1.20.28 38 15 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.800.000,00	10.087.500,00	20.187.500,00	30.275.000,00	6.525.000,00	82,27
1.20 1.20.28 38 15 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	3.050.000,00	-	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 15 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3.050.000,00		3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 15 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	33.750.000,00	10.087.500,00	17.137.500,00	27.225.000,00	6.525.000,00	80,67
1.20 1.20.28 38 15 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	33.750.000,00	10.087.500,00	17.137.500,00	27.225.000,00	6.525.000,00	80,67
1.20 1.20.28 38 18	**Pendataan dan Pemel. basis data PBB**	777.000.000,00	240.228.800,00	-	240.228.800,00	536.771.200,00	30,92
1.20 1.20.28 38 18 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	665.800.000,00	177.130.000,00	-	177.130.000,00	488.670.000,00	26,60
1.20 1.20.28 38 18 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	665.800.000,00	177.130.000,00	-	177.130.000,00	488.670.000,00	26,60
1.20 1.20.28 38 18 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	665.800.000,00	177.130.000,00	-	177.130.000,00	488.670.000,00	26,60
1.20 1.20.28 38 18 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.200.000,00	63.098.800,00	-	63.098.800,00	48.101.200,00	56,74
1.20 1.20.28 38 18 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	51.695.300,00	36.803.800,00	-	36.803.800,00	14.891.500,00	71,19
1.20 1.20.28 38 18 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	51.695.300,00	36.803.800,00	-	36.803.800,00	14.891.500,00	71,19
1.20 1.20.28 38 18 5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	32.554.700,00	23.595.000,00	-	23.595.000,00	8.959.700,00	72,48
1.20 1.20.28 38 18 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid	25.000.000,00	23.595.000,00	-	23.595.000,00	1.405.000,00	94,38
1.20 1.20.28 38 18 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	7.554.700,00	-	-	-	7.554.700,00	-
1.20 1.20.28 38 18 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	15.750.000,00	2.700.000,00	-	2.700.000,00	13.050.000,00	17,14
1.20 1.20.28 38 18 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	2.700.000,00	-	2.700.000,00	13.050.000,00	17,14
1.20 1.20.28 38 18 5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**	11.200.000,00	-	-	-	11.200.000,00	-
1.20 1.20.28 38 18 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.200.000,00	-	-	-	11.200.000,00	-
1.20 1.20.28 38 25	**Study Potensi Retribusi Daerah**	100.000.000,00	95.111.400,00	-	95.111.400,00	4.888.600,00	95,11
1.20 1.20.28 38 25 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.879.600,00	2.150.000,00	-	2.150.000,00	1.729.600,00	55,42
1.20 1.20.28 38 25 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	3.879.600,00	2.150.000,00	-	2.150.000,00	1.729.600,00	55,42
1.20 1.20.28 38 25 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.879.600,00	2.150.000,00		2.150.000,00	1.729.600,00	55,42
1.20 1.20.28 38 25 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.120.400,00	92.961.400,00	-	92.961.400,00	3.159.000,00	96,71

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 38 25 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.360.400,00**	1.360.400,00	-	1.360.400,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 25 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1.360.400,00	1.360.400,00		1.360.400,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 25 5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**330.000,00**	-	-	-	330.000,00	-
1.20 1.20.28 38 25 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid	-					
1.20 1.20.28 38 25 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	330.000,00			-	330.000,00	-
1.20 1.20.28 38 25 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.430.000,00**	**675.000,00**	-	**675.000,00**	1.755.000,00	27,78
1.20 1.20.28 38 25 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.430.000,00	675.000,00		675.000,00	1.755.000,00	27,78
1.20 1.20.28 38 25 5 2 2 21	**Belanja Jasa Konsultasi**	**92.000.000,00**	**90.926.000,00**	-	**90.926.000,00**	1.074.000,00	98,83
1.20 1.20.28 38 25 5 2 2 21 01	Belanja jasa konsultasi penelitian/pemeriksaan	92.000.000,00	90.926.000,00		90.926.000,00	1.074.000,00	98,83
1.20 1.20.28 38 35	**Op. Pengel.Sistem Informasi Pajak Sleman**	**226.910.000,00**	**36.075.000,00**	**134.110.000,00**	**170.185.000,00**	**56.725.000,00**	**75,00**
1.20 1.20.28 38 35 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	221.510.000,00	35.250.000,00	129.610.000,00	164.860.000,00	56.650.000,00	74,43
1.20 1.20.28 38 35 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	**193.550.000,00**	**23.600.000,00**	**113.300.000,00**	**136.900.000,00**	**56.650.000,00**	**70,73**
1.20 1.20.28 38 35 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	193.550.000,00	23.600.000,00	113.300.000,00	136.900.000,00	56.650.000,00	70,73
1.20 1.20.28 38 35 5 2 1 02	**Honorarium Non PNS**	**27.960.000,00**	**11.650.000,00**	**16.310.000,00**	**27.960.000,00**	-	**100,00**
1.20 1.20.28 38 35 5 2 1 02 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	27.960.000,00	11.650.000,00	16.310.000,00	27.960.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 35 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	825.000,00	4.500.000,00	5.325.000,00	75.000,00	98,61
1.20 1.20.28 38 35 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	5.400.000,00	825.000,00	4.500.000,00	5.325.000,00	75.000,00	98,61
1.20 1.20.28 38 27 5 2 2 11 01	Belanja makanan dan minuman harian						
1.20 1.20.28 38 35 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	825.000,00	4.500.000,00	5.325.000,00	75.000,00	98,61
1.20 1.20.28 38 27 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur						
1.20 1.20.28 38 36	**Penyamp.SPPT PBB & Pemb. PBB Panutan**	**650.000.000,00**	**43.330.600,00**	**513.714.300,00**	**557.044.900,00**	**92.955.100,00**	**85,70**
1.20 1.20.28 38 36 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	520.000.000,00	35.690.600,00	441.581.500,00	477.272.100,00	42.727.900,00	91,78
1.20 1.20.28 38 36 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	**126.900.000,00**	-	**104.000.000,00**	**104.000.000,00**	22.900.000,00	81,95
1.20 1.20.28 38 36 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.900.000,00	-	104.000.000,00	104.000.000,00	22.900.000,00	81,95
1.20 1.20.28 38 36 5 2 1 02	**Honorarium Non PNS**	**393.100.000,00**	**35.690.600,00**	**337.581.500,00**	**373.272.100,00**	19.827.900,00	94,96
1.20 1.20.28 38 36 5 2 1 02 03	Honorarium pegawai tidak tetap harian	393.100.000,00	35.690.600,00	337.581.500,00	373.272.100,00	19.827.900,00	94,96
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	7.640.000,00	72.132.800,00	79.772.800,00	50.227.200,00	61,36

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	11.202.800,00	1.540.000,00	9.662.800,00	11.202.800,00	-	100.00
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	11 202 800,00	1.540.000,00	9.662.800,00	11.202.800,00	-	100,00
					-		
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2 03	**Belanja Jasa Kantor**	11.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	90,91
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2 3 13	Belanja Jasa Dokumentasi	1 000 000,00	-	-	-	1 000.000,00	-
1 20 1.20.28 38 36 5 2 2 3 26	Belanja Spanduk	10 000 000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100.00
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	40.972.200,00	-	34.470.000,00	34.470.000,00	6 502 200 00	84 13
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid	39 774 000,00	-	34.470.000,00	34 470 000,00	5.304 000,00	86 66
1.20 1 20 28 38 36 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1 198 200,00	-	-	-	1.198 200,00	-
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	31.125.000,00	6.100.000,00	18.000.000,00	24.100.000,00	7.025.000,00	77 43
1.20 1.20.28 38 29 5 2 2 11 01	Belanja makanan dan minuman harian					-	
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.125 000,00	6 100 000,00	18.000.000,00	24.100.000,00	7.025.000,00	77.43
1.20 1.20.28 38 29 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur					-	
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**	35.700.000,00	-	-	-	35.700.000,00	-
1.20 1.20.28 38 36 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.700.000,00	-	-	-	35.700.000,00	-
1.20 1.20.28 38 40	**Sosialisasi PAD**	285.625.000,00	58.079.150,00	105.835.000,00	163.914.150,00	121 710 850,00	57.39
1.20 1.20.28 38 40 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	174.000.000,00	19.000 000,00	56.155.000,00	75.155.000,00	98.845.000,00	43.19
1.20 1.20.28 38 40 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	174.000.000,00	19.000.000,00	56.155.000,00	75.155.000,00	98.845.000,00	43,19
1.20 1.20.28 38 40 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	172.750.000,00	19 000 000,00	56.155.000,00	75 155.000,00	97.595.000,00	43.51
1.20 1 20.28 38 40 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000,00			-	1.250.000,00	-
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.625.000,00	39.079.150,00	49.680.000,00	88.759.150,00	22.865.850,00	79.52
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 03	**Belanja Jasa Kantor**	25.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00	1.000.000,00	96.00
1.20 1.20.28 38 33 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid					-	-
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 03 04	Belanja jasa Publikasi	25.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00	1.000.000,00	96.00
						-	-
1.20 1.20.28 38 33 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	-				-	-
1.20 1 20.28 38 33 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor					-	-
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	63.675.000,00	36.104.150,00	9.705.000,00	45.809.150,00	17.865.850,00	71,94
1.20 1 20.28 38 33 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid	60.000.000,00	36 104 150,00	9 705 000,00	45 809 150,00	14 190 850,00	76.35
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3 675.000,00			-	3.675.000,00	-
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	2.175.000,00	9.975.000,00	12.150.000,00	-	100.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.150.000,00	2.175.000,00	9.975.000,00	12.150.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 15	**Belanja Perjalanan Dinas**	**10.800.000,00**	**800.000,00**	**6.000.000,00**	**6.800.000,00**	**4.000.000,00**	**62,96**
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00	800.000,00	6.000.000,00	6.800.000,00	4.000.000,00	62,96
1.20 1.20.28 38 41	Pendataan Wajib Pajak Daerah	300.000.000,00	219.632.250,00	55.327.400,00	274.959.650,00	25.040.350,00	91,65
1.20 1.20.28 38 41 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	284.950.000,00	211.509.650,00	50.950.000,00	262.459.650,00	22.490.350,00	92,11
1.20 1.20.28 38 41 5 2 1 01	Honorarium PNS	284.950.000,00	211.509.650,00	50.950.000,00	262.459.650,00	22.490.350,00	92,11
1.20 1.20.28 38 41 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	284.950.000,00	211.509.650,00	50.950.000,00	262.459.650,00	22.490.350,00	92,11
1.20 1.20.28 38 41 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.050.000,00	8.122.600,00	4.377.400,00	12.500.000,00	2.550.000,00	83,06
1.20 1.20.28 38 41 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.300.000,00**	**3.922.600,00**	**4.377.400,00**	**8.300.000,00**	-	100,00
1.20 1.20.28 38 41 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	8.300.000,00	3.922.600,00	4.377.400,00	8.300.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 41 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	4.200.000,00	-	4.200.000,00	2.550.000,00	62,22
1.20 1.20.28 38 41 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	4.200.000,00	-	4.200.000,00	2.550.000,00	62,22
1.20 1.20.28 38 42	Pemantauan dan Pembinaan WP Daerah	640.000.000,00	121.172.000,00	517.144.000,00	638.316.000,00	1.684.000,00	99,74
1.20 1.20.28 38 42 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	634.790.000,00	117.602.000,00	517.144.000,00	634.746.000,00	44.000,00	99,99
1.20 1.20.28 38 42 5 2 1 01	Honorarium PNS	634.790.000,00	117.602.000,00	517.144.000,00	634.746.000,00	44.000,00	99,99
1.20 1.20.28 38 42 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	634.790.000,00	117.602.000,00	517.144.000,00	634.746.000,00	44.000,00	99,99
1.20 1.20.28 38 42 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.210.000,00	3.570.000,00	-	3.570.000,00	1.640.000,00	68,52
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	-	-	-	890.000,00	-
1.20 1.20.28 38 33 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid					-	
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	890.000,00			-	890.000,00	-
1.20 1.20.28 38 42 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.320.000,00**	**3.570.000,00**	-	**3.570.000,00**	**750.000,00**	**82,64**
1.20 1.20.28 38 42 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	3.570.000,00		3.570.000,00	750.000,00	82,64
1.20 1.20.28 38 35 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur					-	
1.20 1.20.28 38 43	Fasilitasi pajak hotel dan restoran	327.500.000,00	322.810.262,66	-	322.810.262,66	4.689.737,34	98,57
1.20 1.20.28 38 43 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00	13.500.000,00	-	13.500.000,00	300.000,00	97,83
1.20 1.20.28 38 43 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.500.000,00	-	13.500.000,00	300.000,00	97,83

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 38 43 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	300.000,00	97,83
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	313.700.000,00	309.310.262,66	-	309.310.262,66	4.389.737,34	98,60
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	620.000,00	-	620.000,00	1.180.000,00	34,44
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 03 04	Belanja jasa iklan/publikasi	1.000.000,00	300.000,00		300.000,00	700.000,00	30,00
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 03 12	Belanja jasa Dekorasi	400.000,00	320.000,00		320.000,00	80.000,00	80,00
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 03 13	Belanja jasa Dokumentasi	400.000,00			-	400.000,00	-
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	700.000,00	-	-	-	700.000,00	-
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	700.000,00			-	700.000,00	-
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	8.700.000,00	-	8.700.000,00	2.500.000,00	77,68
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.100.000,00	8.700.000,00		8.700.000,00	1.400.000,00	86,14
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur	1.100.000,00			-	1.100.000,00	-
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 26	Pengembalian Pajak dan Retribusi	300.000.000,00	299.990.262,66	-	299.990.262,66	9.737,34	100,00
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 26 01	Pengembalian Pajak Daerah	300.000.000,00	299.990.262,66		299.990.262,66	9.737,34	100,00
1.20 1.20.28 38 44	Pelay.Permohonan Keringanan Pajak Daerah	70.000.000,00	18.329.500,00	50.430.000,00	68.759.500,00	1.240.500,00	98,23
1.20 1.20.28 38 44 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	54.500.000,00	13.625.000,00	40.875.000,00	54.500.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 44 5 2 1 01	Honorarium PNS	54.500.000,00	13.625.000,00	40.875.000,00	54.500.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 44 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.500.000,00	13.625.000,00	40.875.000,00	54.500.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 44 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.813.000,00	4.704.500,00	9.555.000,00	14.259.500,00	553.500,00	96,26
1.20 1.20.28 38 44 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.753.200,00	3.317.000,00	3.404.500,00	6.721.500,00	31.700,00	99,53
1.20 1.20.28 38 44 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6.753.200,00	3.317.000,00	3.404.500,00	6.721.500,00	31.700,00	99,53
1.20 1.20.28 38 44 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.800,00	-	-	-	499.800,00	-
1.20 1.20.28 38 37 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid						
1.20 1.20.28 38 44 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	499.800,00			-	499.800,00	-
1.20 1.20.28 38 44 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	1.387.500,00	6.150.500,00	7.538.000,00	22.000,00	99,71
1.20 1.20.28 38 44 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.560.000,00	1.387.500,00	6.150.500,00	7.538.000,00	22.000,00	99,71
1.20 1.20.28 38 44 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur					-	
1.20 1.20.28 38 44 5 2 3 3	BELANJA MODAL	687.000,00	-	-	-	687.000,00	-
1.20 1.20.28 38 44 5 2 3 10	Belanja Modal pengadaan peralatan kantor	687.000,00	-	-	-	687.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 38 44 5 2 3 10 02	Belanja Modal pengadaan mesin hitung	687.000,00			-	687.000,00	-
1.20 1.20.28 38 45	**Pelayanan & Penagihan PBB**	**1.657.275.000,00**	**207.232.500,00**	**1.081.048.021,00**	**1.288.280.521,00**	**368.994.479,00**	**77,73**
1.20 1.20.28 38 45 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.350.350.000,00	153.775.000,00	973.297.501,00	1.127.072.501,00	223.277.499,00	83,47
1.20 1.20.28 38 45 5 2 1 01	Honorarium PNS	975.950.000,00	140.425.000,00	760.597.501,00	901.022.501,00	74.927.499,00	92,32
1.20 1.20.28 38 45 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	975.950.000,00	140.425.000,00	760.597.501,00	901.022.501,00	74.927.499,00	92,32
1.20 1.20.28 38 45 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	239.100.000,00	7.500.000,00	212.700.000,00	220.200.000,00	18.900.000,00	92,10
1.20 1.20.28 38 45 5 2 1 02 03	Honorarium Pegawai tidak tetap harian	239.100.000,00	7.500.000,00	212.700.000,00	220.200.000,00	18.900.000,00	92,10
1.20 1.20.28 38 45 5 2 1 03	Uang Lembur	40.300.000,00	5.850.000,00	-	5.850.000,00	34.450.000,00	14,52
1.20 1.20.28 38 45 5 2 1 03 01	Uang lembur PNS	38.500.000,00	5.850.000,00	-	5.850.000,00	32.650.000,00	15,19
1.20 1.20.28 38 45 5 2 1 03 02	Uang lembur non PNS	1.800.000,00	-	-	-	1.800.000,00	-
1.20 1.20.28 38 43 5 2 1 05	Uang untuk diberikan kpd pihak ketiga/masy	95.000.000,00				95.000.000,00	-
1.20 1.20.28 38 43 5 2 1 05 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	95.000.000,00				95.000.000,00	-
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	306.925.000,00	53.457.500,00	107.750.520,00	161.208.020,00	145.716.980,00	52,52
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.581.500,00	-	19.168.020,00	19.168.020,00	13.413.480,00	58,83
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	32.581.500,00	-	19.168.020,00	19.168.020,00	13.413.480,00	58,83
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	6.000.000,00	29.280.000,00	35.280.000,00	720.000,00	98,00
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 03 12	Belanja jasa Dekorasi	36.000.000,00	6.000.000,00	29.280.000,00	35.280.000,00	720.000,00	98,00
1.20 1.20.28 38 30 5 2 2 03 13	Belanja jasa Dokumentasi					-	#DIV/0!
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.591.000,00	-	57.802.500,00	57.802.500,00	9.788.500,00	85,52
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid	55.679.000,00	-	52.802.500,00	52.802.500,00	2.876.500,00	94,83
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	11.912.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	6.912.000,00	41,97
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	126.212.500,00	41.077.500,00	1.500.000,00	42.577.500,00	83.635.000,00	33,73
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	105.587.500,00	35.227.500,00	1.500.000,00	36.727.500,00	68.860.000,00	34,78
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur	20.625.000,00	5.850.000,00	-	5.850.000,00	14.775.000,00	28,36
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.540.000,00	6.380.000,00	-	6.380.000,00	38.160.000,00	14,32
1.20 1.20.28 38 45 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.540.000,00	6.380.000,00	-	6.380.000,00	38.160.000,00	14,32
1.20 1.20.28 38 46	Rekonsiliasi Penerimaan PBB	94.600.000,00	5.267.500,00	80.599.900,00	85.867.400,00	8.732.600,00	90,77
1.20 1.20.28 38 46 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	77.625.000,00	1.265.000,00	76.200.000,00	77.465.000,00	160.000,00	99,79

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 38 46 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	76.300.000,00	-	76.200.000,00	76.200.000,00	100.000,00	99,87
1.20 1.20.28 38 46 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.300.000,00	-	76.200.000,00	76.200.000,00	100.000,00	99,87
1.20 1.20.28 38 46 5 2 1 03	**Uang Lembur**	1.325.000,00	1.265.000,00	-	1.265.000,00	60.000,00	95,47
1.20 1.20.28 38 46 5 2 1 03 01	Uang lembur PNS	1.325.000,00	1.265.000,00	-	1.265.000,00	60.000,00	95,47
1.20 1.20.28 38 46 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.975.000,00	4.002.500,00	4.399.900,00	8.402.400,00	8.572.600,00	49,50
1.20 1.20.28 38 46 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	4.399.900,00	-	4.399.900,00	4.399.900,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 46 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	4.399.900,00	-	4.399.900,00	4.399.900,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 46 5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	875.100,00	-	-	-	875.100,00	-
1.20 1.20.28 38 39 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid						
1.20 1.20.28 38 46 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	875.100,00	-	-	-	875.100,00	-
1.20 1.20.28 38 46 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	11.700.000,00	4.002.500,00	-	4.002.500,00	7.697.500,00	34,21
1.20 1.20.28 38 46 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	2.737.500,00	-	2.737.500,00	6.262.500,00	30,42
1.20 1.20.28 38 46 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur	2.700.000,00	1.265.000,00	-	1.265.000,00	1.435.000,00	46,85
1.20 1.20.28 38 47	Penelitian SSPD dan BPHTB	1.040.380.000,00	183.578.700,00	676.602.700,00	860.181.400,00	180.198.600,00	82,68
1.20 1.20.28 38 47 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.007.540.000,00	179.296.200,00	656.827.200,00	836.123.400,00	171.416.600,00	82,99
1.20 1.20.28 38 47 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	821.000.000,00	179.296.200,00	599.323.200,00	778.619.400,00	42.380.600,00	94,84
1.20 1.20.28 38 47 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	821.000.000,00	179.296.200,00	599.323.200,00	778.619.400,00	42.380.600,00	94,84
1.20 1.20.28 38 47 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengad Barang dan Jasa						
1.20 1.20.28 38 43 5 2 1 02	**Honorarium Non PNS**	186.540.000,00	-	57.504.000,00	57.504.000,00	129.036.000,00	30,83
1.20 1.20.28 38 43 5 2 1 02 01	Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber/Instruktur	186.540.000,00	-	57.504.000,00	57.504.000,00	129.036.000,00	30,83
1.20 1.20.28 38 47 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.840.000,00	4.282.500,00	19.775.500,00	24.058.000,00	8.782.000,00	73,26
1.20 1.20.28 38 47 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	13.465.500,00	2.745.000,00	7.370.500,00	10.115.500,00	3.350.000,00	75,12
1.20 1.20.28 38 47 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	13.465.500,00	2.745.000,00	7.370.500,00	10.115.500,00	3.350.000,00	75,12
1.20 1.20.28 38 47 5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	2.034.500,00	-	1.722.500,00	1.722.500,00	312.000,00	84,66
1.20 1.20.28 38 47 5 2 2 06 01	Belanja Cetak dan Jilid	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	100,00
1.21 1.20.29 38 47 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.834.500,00	-	1.522.500,00	1.522.500,00	312.000,00	82,99
1.20 1.20.28 38 47 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	17.340.000,00	1.537.500,00	10.682.500,00	12.220.000,00	5.120.000,00	70,47
1.20 1.20.28 38 47 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.340.000,00	1.537.500,00	10.682.500,00	12.220.000,00	5.120.000,00	70,47

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 38 40 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur					-	
1.20 1.20.28 38 48	**Pengendalian penerimaan & tunggakan PD**	**101.000.000,00**	**27.058.000,00**	**70.017.000,00**	**97.075.000,00**	**3.925.000,00**	**96,11**
1.20 1.20.28 38 48 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	88.800.000,00	22.200.000,00	64.400.000,00	86.600.000,00	2.200.000,00	97,52
1.20 1.20.28 38 48 5 2 1 01	Honorarium PNS	88.800.000,00	22.200.000,00	64.400.000,00	86.600.000,00	2.200.000,00	97,52
1.20 1.20.28 38 48 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.800.000,00	22.200.000,00	64.400.000,00	86.600.000,00	2.200.000,00	97,52
1.20 1.20.28 38 48 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.200.000,00	4.858.000,00	5.617.000,00	10.475.000,00	1.725.000,00	85,86
1.20 1.20.28 38 48 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	2.908.000,00	3.892.000,00	6.800.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 48 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	6.800.000,00	2.908.000,00	3.892.000,00	6.800.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 48 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	1.950.000,00	1.725.000,00	3.675.000,00	1.725.000,00	68,06
1.20 1.20.28 38 48 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	1.950.000,00	1.725.000,00	3.675.000,00	1.725.000,00	68,06
1.20 1.20.28 38 41 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur					-	
1.20 1.20.28 38 49	**Pendampingan intensifikasi PPh OPDN**	**213.600.000,00**	**26.997.500,00**	-	**26.997.500,00**	**186.602.500,00**	**12,64**
1.20 1.20.28 38 49 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	178.550.000,00	25.200.000,00	-	25.200.000,00	153.350.000,00	14,11
1.20 1.20.28 38 49 5 2 1 01	Honorarium PNS	178.550.000,00	25.200.000,00	-	25.200.000,00	153.350.000,00	14,11
1.20 1.20.28 38 49 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	178.550.000,00	25.200.000,00	-	25.200.000,00	153.350.000,00	14,11
1.20 1.20.28 38 49 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.050.000,00	1.797.500,00	-	1.797.500,00	33.252.500,00	5,13
1.20 1.20.28 38 49 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.890.000,00	-	-	-	29.890.000,00	-
1.20 1.20.28 38 49 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	29.890.000,00	-	-	-	29.890.000,00	-
1.20 1.20.28 38 49 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.110.000,00	1.110.000,00	-	1.110.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 42 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid	-					
1.20 1.20.28 38 49 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.110.000,00	1.110.000,00	-	1.110.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 49 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	687.500,00	-	687.500,00	3.362.500,00	16,98
1.20 1.20.28 38 49 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	687.500,00	-	687.500,00	3.362.500,00	16,98
1.20 1.20.28 38 42 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman lembur					-	
1.20 1.20.28 38 50	**Penyus.draf Raperda/ Raperbup Pjk dan Retr.**	**112.150.000,00**	**72.218.250,00**	**34.400.000,00**	**106.618.250,00**	**5.531.750,00**	**95,07**
1.20 1.20.28 38 50 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	90.400.000,00	56.000.000,00	34.400.000,00	90.400.000,00	-	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Realisasi			Sisa Anggaran	%
			Bulan ini	sd bl lalu	sd. bl ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20 1.20.28 38 50 5 2 1 01	**Honorarium PNS**	**90.400.000,00**	**56.000.000,00**	**34.400.000,00**	**90.400.000,00**	-	100,00
1.20 1.20.28 38 50 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.400.000,00	56.000.000,00	34.400.000,00	90.400.000,00	-	100,00
1.20 1.20.28 38 50 5 2 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.750.000,00**	**16.218.250,00**	-	16.218.250,00	5.531.750,00	74,57
1.20 1.20.28 38 50 5 2 2 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**487.500,00**	-	-	-	487.500,00	-
1.20 1.20.28 38 50 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	487.500,00	-	-	-	487.500,00	-
1.20 1.20.28 38 50 5 2 2 06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.012.500,00**	**1.012.000,00**	-	1.012.000,00	500,00	99,95
1.20 1.20.28 38 43 5 2 2 06 01	Belanja cetak dan jilid						
1.20 1.20.28 38 50 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.012.500,00	1.012.000,00	-	1.012.000,00	500,00	99,95
1.20 1.20.28 38 50 5 2 2 11	**Belanja Makanan dan Minuman**	**20.250.000,00**	**15.206.250,00**	-	**15.206.250,00**	5.043.750,00	75,09
1.20 1.20.28 38 50 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.250.000,00	15.206.250,00	-	15.206.250,00	5.043.750,00	75,09

Pengguna Anggaran

Drs. H. Samsidi, Msi
Nip. 19550908 198603 1 005

Sleman, 28 Desember 2012
Bendahara Pengeluaran
Kabupaten Sleman

Wahyu Hidayat, SE
Nip. 19720618 199303 1 004

2013

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
Prog	Keg				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			139.285.000.00	139.285.000.00	-	
06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sleman	50 buku	32.415.000.00	32.415.000.00	-	
06	02	Penyusunan Pelaporan keuangan dan realisasi keuangan	Kab. Sleman	4 lap, 12 bulan	35.920.000.00	35.920.000.00	-	
06	05	Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD	Kab. Sleman	10 bk DPA, 10 bk DPPA	46.600.000.00	46.600.000.00	-	
06	07	Penyusunan profil data SKPD.	Kab. Sleman	10 dokumen	24.350.000.00	24.350.000.00	-	
20		Prog Peningk Sistem Pengawasan Internal dan Pengend. Pelaksanaan			28.600.000.00	28.600.000.00	-	
20	07	Implementasi SPIP	Kab. Sleman		28.600.000.00	28.600.000.00	-	
29		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			174.952.250.00	56.560.250.00	(118.392.000.00)	(67.6
29	07	Pelatihan Profesional Petugas PBB	Kab. Sleman		174.952.250.00	56.560.250.00	(118.392.000.00)	(67.6
38		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			15.176.458.350.00	15.903.991.295.00	727.532.945.00	4.79
38	01	Pendaftaran Calon Wajib Pajak Daerah	Kab. Sleman	1.100 WP	188.497.500.00	188.497.500.00	-	
38	02	Pemeriksaan Pajak Daerah	Kab. Sleman	200 WP	336.425.000.00	336.425.000.00	-	
38	07	Penetapan Pajak Daerah	Kab. Sleman	22.500 SKPD	398.075.000.00	375.575.000.00	(22.500.000.00)	(5.65
38	10	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Sleman	12676 SKPD	711.155.000.00	711.155.000.00	-	
38	12	Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan kaliurang	Kab. Sleman	365 hari	264.869.000.00	264.869.000.00	-	
38	15	Evaluasi PAD	Kab. Sleman	100%	162.065.000.00	162.065.000.00	-	
38	18	Pendataan dan pemeliharaan basis data PBB	Kab. Sleman	25.000 OP	1.018.038.450.00	1.018.038.450.00	-	
38	25	Study Potensi Retribusi Daerah	Kab. Sleman	2 lap, 2 retribusi	240.789.000.00	250.879.000.00	10.090.000.00	4.19
38	35	Operasionai Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman	Kab. Sleman	12 bulan	1.917.375.000.00	1.665.935.000.00	(251.440.000.00)	(13.11
38	36	Penyampaian SPPT PBB dan Pembayaran PBB Panutan	Kab. Sleman	Rp. 39.160.000.000,00	278.625.000.00	278.625.000.00	-	
38	40	Sosialisasi PAD	Kab. Sleman	284 pelks	346.567.500.00	346.567.500.00	-	
38	41	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Kab. Sleman	4.500 WP	608.965.000.00	618.865.000.00	9.900.000.00	1.63
38	42	Pemantauan dan Pembinaan WP Daerah	Kab. Sleman	960 lap	424.665.000.00	684.665.000.00	260.000.000.00	61.22
38	43	Fasilitasi pajak hotel dan restoran	Kab. Sleman	1 kali pelks	578.186.000.00	578.186.000.00	-	
38	44	Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah	Kab. Sleman	60 WP	4.401.025.000.00	4.401.025.000.00	-	
38	45	Pelayanan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Kab. Sleman	Rp. 39.160.000.000,00	148.000.000.00	148.000.000.00	-	
38	46	Rekonsiliasi penerimaan PBB	Kab. Sleman	100%	772.755.000.00	385.011.000.00	(387.744.000.00)	(50.18)
38	47	Penelitian SSPD dan BPHTB	Kab. Sleman	4.800 OP	74.445.000.00	74.445.000.00	-	
38	48	Pengendalian Penerimaan dan Tunggakan Pajak Daerah	Kab. Sleman	24 Dokumen	235.900.000.00	235.900.000.00	-	
38	49	Pendampingan intensifikasi PPh OPDN	Kab. Sleman	Rp. 71.603.575.400,00	97.500.000.00	120.500.000.00	23.000.000.00	23.59
38	50	Penyusunan draf raperda/ raperbup pajak dan retribusi	Kab. Sleman	4 buah	98.157.900.00	98.157.900.00	-	
38	51	Operasional administrasi PBB Tingkat Kecamatan, desa dan dusun	Kab. Sleman	600.000 SPPT	1.874.378.000.00	2.118.513.345.00	244.135.345.00	
38	56	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Kab. Sleman	Piutang Rp. 162.735.966.326	-	842.091.600.00	842.091.600.00	
				Jumlah	17.211.083.350.00	18.647.743.295.00	1.436.659.945.00	8.35

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
Prog	Keg				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pengguna Anggaran

Hardo Keswoyo, SE, Msi
Nip. 19640126 199311 1004

Sleman,
Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dra. Rini Murti Lestari, Akt,MM
Nip. 19600607 198411 2 001

Kelompok Kerja

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sri Murni Rahayu, SH, MM	DPKAD	Ketua	1
2	Drs. Agung Armawanto, MT	Bag. Adm dan PP	Sekretaris	2
3	Eka Priastana Putra, SE, Msi	DPKAD	Anggota	3
4	Heribertus Riswidodo, SE, MSE	Bappeda	Anggota	4
5	Sardi	Bag Adm dan PP	Anggota	5
6	Agus Hidayatno, SST	DPKAD	Anggota	6

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR: 6 Tahun 2009
TANGGAL: 23 Juli 2009

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(SETELAH KONVERSI)
(AUDITAN)

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2008	REALISASI 2008	%	REALISASI 2007
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	884.336.182.392,00	946.476.028.092,43	107,03	825.004.186.092,00
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	106.758.631.343,00	140.631.359.142,43	131,73	120.656.548.721,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49.171.622.443,00	61.020.899.130,70	124,10	50.287.665.731,91
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	44.883.799.880,00	52.065.472.057,93	116,00	40.965.628.030,57
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.625.758.200,00	6.676.980.800,43	100,77	5.732.297.630,18
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6.077.450.820,00	20.868.007.153,37	343,37	23.670.957.328,34
1.2	**Pendapatan Transfer**	758.169.621.359,00	785.937.430.122,00	103,66	700.176.234.261,00
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	676.230.225.359,00	688.941.478.722,00	101,88	621.561.288.361,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	72.986.811.998,00	85.884.282.522,00	117,67	67.858.623.927,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	497.883.361,00	311.668.200,00	62,60	486.664.434,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	592.594.530.000,00	592.594.528.000,00	100,00	543.065.000.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	100,00	10.151.000.000,00
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	6.093.820.600,00	6.096.820.600,00	100,05	13.613.532.600,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				8.000.000.000,00
1.2.2.3	Dana Tunjangan Pendidikan	6.093.820.600,00	6.096.820.600,00	100,05	5.613.532.600,00
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	75.845.575.400,00	90.899.130.800,00	119,85	65.001.413.300,00
1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	56.603.575.400,00	71.657.130.800,00	126,59	52.201.913.300,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	19.242.000.000,00	19.242.000.000,00	100,00	12.799.500.000,00
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	19.407.929.690,00	19.907.238.828,00	102,57	4.171.403.110,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.486.586.000,00	16.486.586.000,00	100,00	2.062.081.450,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	2.921.343.690,00	2.921.483.822,00	100,00	0,00
1.3.3	Kompensasi Pajak	0,00	499.169.006,00	0,00	2.109.321.660,00
2	**BELANJA**	1.050.868.430.555,06	906.618.990.410,50	86,27	752.113.975.892,36
2.1	**BELANJA OPERASI**	862.721.858.767,47	770.763.819.786,50	89,34	614.949.715.697,14
2.1.1	Belanja Pegawai	643.239.418.903,47	586.317.296.476,11	91,15	468.668.466.025,00
2.1.2	Belanja Barang	152.378.308.425,00	128.893.960.721,00	84,59	98.462.427.536,50
2.1.3	Bunga	144.000.000,00	120.031.476,89	83,36	136.590.831,64
2.1.4	Subsidi	10.058.273.700,00	10.042.470.518,00	99,84	7.743.887.439,00
2.1.6	Bantuan Sosial	56.901.857.739,00	45.390.060.594,50	79,77	39.938.343.865,00
2.2	**BELANJA MODAL**	142.276.333.605,00	98.394.135.029,00	69,16	109.560.194.100,98
2.2.1	Belanja Tanah	19.461.154.400,00	7.096.547.835,00	36,47	12.219.081.813,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	20.736.957.280,00	17.532.567.310,00	84,55	22.030.162.300,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	52.538.845.245,00	38.525.179.521,86	73,33	50.763.140.056,86
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.068.944.680,00	34.852.256.912,14	71,03	23.012.301.691,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	470.432.000,00	387.583.450,00	82,39	1.535.008.240,12
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	8.151.071.037,00	306.297.000,00	3,76	0,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.151.071.037,00	306.297.000,00	3,76	0,00
2.4	**TRANSFER**	37.719.167.145,59	37.154.738.595,00	98,50	27.604.063.094,24
2.4.1	**Transfer bagi Hasil ke Desa**	37.719.167.145,59	37.154.738.595,00	98,50	27.604.063.094,24
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20.173.017.145,59	20.173.017.145,00	100,00	18.615.842.894,24
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	17.546.150.000,00	16.981.721.450,00	96,78	8.988.223.200,00
	Surplus/(Defisit)	(166.532.248.163,06)	39.857.037.681,93	(23,93)	72.890.210.199,64

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2008	REALISASI 2008	%	REALISASI 2007
1	2	3	4	5	6
3	**PEMBIAYAAN**				
3.1	**PENERIMAAN DAERAH**				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	195.763.465.158,06	195.763.465.158,06	100,00	135.517.734.351,82
3.1.6	Pengembalian Piutang				1.750.823.200,00
3.1.7	Penerimaan Pajak Bencana	0,00	294.488.800,00	0,00	0,00
	Jumlah	195.763.465.158,06	196.057.953.958,06	100,15	137.268.557.351,82
3.2	**Pengeluaran Daerah**				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	13.475.000.000,00	13.475.000.000,00	100,00	9.750.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.138.000.000,00	2.137.744.928,40	99,99	137.744.928,40
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
3.2.5	Pengembalian PPh 21	2.608.490.666,00	0,00	0,00	7.557.465,00
3.2.6	Pembayaran Hutang Pajak Bencana	294.488.800,00	294.488.800,00	100,00	0,00
3.2.7	JPKM	4.815.237.529,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	29.231.216.995,00	22.007.233.728,40	75,29	14.395.302.393,40
	Pembiayaan Neto	166.532.248.163,06	174.050.720.229,66	104,51	122.873.254.958,42
	SILPA	0,00	213.907.757.911,59	0,00	195.763.465.158,06

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH
NOMOR: 7 Tahun 2010
TANGGAL: 28 Juli 2010

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009
(SETELAH KONVERSI)
(AUDITAN)

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN**	**955,033,225,051.99**	**996,182,714,691.84**	**104.31**	**41,149,489,639.85**	
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**128,918,153,263.99**	**157,231,267,811.84**	**121.96**	**28,313,114,547.85**	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56,350,000,000.00	71,044,731,106.66	126.08	14,694,731,106.66	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	49,556,793,680.00	54,719,438,555.90	110.42	5,162,644,875.90	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yg Dipisahkan	9,839,600,803.99	9,973,164,266.92	101.36	133,563,462.93	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	13,171,758,780.00	21,493,933,882.36	163.18	8,322,175,102.36	
1.2	**Pendapatan Transfer**	**809,017,154,388.00**	**822,650,618,280.00**	**101.69**	**13,633,463,892.00**	
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**724,463,105,588.00**	**717,703,169,280.00**	**99.07**	**(6,759,936,308.00)**	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	100,380,047,588.00	93,771,968,643.00	93.42	(6,608,078,945.00)	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	249,280,000.00	97,422,637.00	39.08	(151,857,363.00)	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	587,857,778,000.00	587,857,778,000.00	100.00	0.00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	35,976,000,000.00	35,976,000,000.00	100.00	0.00	
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**0.00**	**20,393,400,000.00**	**0.00**	**20,393,400,000.00**	
1.2.2.1	Dana Tunjangan Pendidikan	0.00	20,393,400,000.00	0.00	20,393,400,000.00	
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**84,554,048,800.00**	**84,554,049,000.00**	**100.00**	**200.00**	
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	68,062,048,800.00	68,062,049,000.00	100.00	200.00	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	16,492,000,000.00	16,492,000,000.00	100.00	0.00	
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**17,097,917,400.00**	**16,300,828,600.00**	**95.34**	**(797,088,800.00)**	
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,020,770,000.00	120,770,000.00	11.83	(900,000,000.00)	
1.3.2	Dana Cukai Tembakau	1,182,700,400.00	1,285,611,600.00	108.70	102,911,200.00	
1.3.2	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	14,894,447,000.00	14,894,447,000.00	0.00	0.00	
2	**BELANJA**	**1,139,002,482,963.58**	**1,016,026,601,135.37**	**89.20**	**(122,975,881,828.21)**	
2.1	**BELANJA OPERASI**	**953,622,507,390.00**	**860,189,984,372.37**	**90.20**	**(93,432,523,017.63)**	
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	689,861,046,579.00	636,607,528,849.82	92.28	(53,253,517,729.18)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173,626,240,022.00	147,599,744,504.64	85.01	(26,026,495,517.36)	
2.1.3	Belanja Bunga	144,000,000.00	102,458,156.61	71.15	(41,541,843.39)	
2.1.4	Belanja Subsidi	10,800,000,000.00	10,189,618,480.00	94.35	(610,381,520.00)	
2.1.5	Belanja Hibah	19,411,418,350.00	19,401,387,158.00	99.95	(10,031,192.00)	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	59,779,802,439.00	46,289,247,223.30	77.43	(13,490,555,215.70)	
2.2	**BELANJA MODAL**	**136,979,896,197.01**	**115,846,912,555.00**	**84.57**	**(21,132,983,642.01)**	
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	0.00	48,246,925.00	0.00	0.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	1,685,000.00	0.00	0.00	
2.2	Belanja Modal	136,979,896,197.01	115,846,912,555.00	84.57	(21,132,983,642.01)	
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6,409,675,309.17**	**0.00**	**0.00**	**(6,409,675,309.17)**	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6,409,675,309.17	0.00	0.00	(6,409,675,309.17)	
2.4	**TRANSFER**	**41,990,404,067.40**	**39,989,704,208.00**	**95.24**	**(2,000,699,859.40)**	
2.4.1	**Transfer bagi Hasil ke Desa**	**41,990,404,067.40**	**39,989,704,208.00**	**95.24**	**(2,000,699,859.40)**	
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20,523,769,067.40	20,517,574,208.00	99.97	(6,194,859.40)	
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	21,466,635,000.00	19,472,130,000.00	90.71	(1,994,505,000.00)	
	Surplus/(Defisit)	**(183,969,257,911.59)**	**(19,843,886,443.53)**	**10.79**	**164,125,371,468.06**	

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya	213,907,757,911.59	213,907,757,911.59	100.00	0.00	
	Jumlah	**213,907,757,911.59**	**213,907,757,911.59**	**100.00**	**0.00**	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	100.00	0.00	
3.2.3	Penyertaan Modal (Investasi) Swasta	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00	0.00	
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	138,000,000.00	137,744,928.40	99.82	(255,071.60)	
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal)	6,600,500,000.00	6,600,500,000.00	100.00	0.00	
	Jumlah	**29,938,500,000.00**	**29,938,244,928.40**	**99.99**	**(255,071.60)**	
	Pembiayaan Netto	**183,969,257,911.59**	**183,969,512,983.19**	**100.00**	**255,071.60**	
	SILPA Tahun Berkenaan	**0.00**	**164,125,626,539.66**	**0.00**	**164,125,626,539.66**	

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH
NOMOR: 7 TH 2011
TANGGAL: 8-8-2011

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(SETELAH KONVERSI)
(AUDITAN)

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2010	REALISASI 2010 Rp.	%	REALISASI 2009	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN**	**1,096,899,222,057.99**	**1,095,628,887,559.93**	**99.88**	**996,182,714,691.84**	
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**163,530,209,690.15**	**163,056,459,137.93**	**99.71**	**157,231,267,811.84**	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75,969,096,600.00	80,611,542,955.52	106.11	71,044,731,106.66	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	58,973,721,680.00	59,110,503,292.07	100.23	54,719,438,555.90	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yg Dipisahkan	10,448,161,337.99	10,169,824,623.38	97.34	9,973,164,266.92	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	18,139,230,072.16	13,164,588,266.96	72.58	21,493,933,882.36	
1.2	**Pendapatan Transfer**	**909,205,932,367.84**	**909,887,128,872.00**	**100.07**	**822,650,618,280.00**	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	737,807,079,540.00	740,198,028,398.00	100.32	717,703,169,280.00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	102,354,729,965.00	104,361,867,117.00	101.96	93,771,968,643.00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2,284,157,575.00	2,667,969,281.00	116.80	97,422,637.00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	563,320,892,000.00	563,320,892,000.00	100.00	587,857,778,000.00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	69,847,300,000.00	69,847,300,000.00	100.00	35,976,000,000.00	
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**86,168,469,000.00**	**84,453,294,000.00**	**98.01**	**20,393,400,000.00**	
1.2.2.1	Dana Tunjangan Pendidikan	86,168,469,000.00	84,453,294,000.00	98.01	20,393,400,000.00	
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**85,230,383,827.84**	**85,235,806,474.00**	**100.01**	**84,554,049,000.00**	
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	73,863,383,827.84	73,868,806,474.00	100.01	68,062,049,000.00	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	11,367,000,000.00	11,367,000,000.00	100.00	16,492,000,000.00	
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**24,163,080,000.00**	**22,685,299,550.00**	**93.88**	**16,300,828,600.00**	
1.3.1	Pendapatan Hibah	22,163,080,000.00	20,785,299,550.00	93.78	120,770,000.00	
1.3.2	Dana Cukai Tembakau	0.00	0.00	0.00	1,285,611,600.00	
1.3.2	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	0.00	0.00	0.00	14,894,447,000.00	
1.3.6	DPPIP	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	0.00	
1.3.7	DPPID	1,000,000,000.00	900,000,000.00	90.00	0.00	
2	**BELANJA**	**1,244,286,348,597.65**	**1,131,602,398,904.14**	**90.94**	**1,016,026,601,135.37**	
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1,072,860,038,694.49**	**989,131,133,924.33**	**92.20**	**860,189,984,372.37**	
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	801,509,598,773.49	755,838,243,854.94	94.30	636,607,528,849.82	
2.1.2	Belanja Barang	215,743,125,709.00	182,639,531,636.08	84.66	147,599,744,504.64	
2.1.3	Belanja Bunga	144,000,000.00	77,980,369.31	54.15	102,458,156.61	
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	10,189,618,480.00	
2.1.5	Belanja Hibah	20,280,011,487.00	18,413,622,487.00	90.80	19,401,387,158.00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	35,183,302,725.00	32,161,755,577.00	91.41	46,289,247,223.30	
2.2	**BELANJA MODAL**	**126,792,132,400.00**	**99,812,269,370.81**	**78.72**	**115,846,912,555.00**	
2.2.1	Belanja Tanah	150,000,000.00	69,802,625.00	46.54	2,446,529,845.00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39,029,581,719.00	25,939,878,319.00	66.46	21,070,360,360.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	34,459,278,711.00	31,751,996,688.81	92.14	25,783,008,390.00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32,811,902,700.00	29,450,357,528.00	89.76	66,189,393,435.00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	20,341,369,270.00	12,600,234,210.00	61.94	357,620,525.00	
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4,404,158,474.92**	**4,404,090,314.00**	**100.00**	**0.00**	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4,404,158,474.92	4,404,090,314.00	100.00	0.00	
2.4	**TRANSFER**	**40,230,019,028.24**	**38,254,905,295.00**	**95.09**	**39,989,704,208.00**	
2.4.1	**Transfer bagi Hasil ke Desa**	**40,230,019,028.24**	**38,254,905,295.00**	**95.09**	**39,989,704,208.00**	
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	19,528,558,295.24	19,528,558,295.00	100.00	20,517,574,208.00	
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20,701,460,733.00	18,726,347,000.00	90.46	19,472,130,000.00	
	Surplus/(Defisit)	**(147,387,126,539.66)**	**(35,973,511,344.21)**	**24.41**	**(19,843,886,443.53)**	
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya	164,125,626,539.66	164,125,626,539.66	100.00	213,907,757,911.59	
	Jumlah	164,125,626,539.66	164,125,626,539.66	100.00	213,907,757,911.59	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**					
3.2.2	Penyertaan Modal	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00	100.00	23,200,000,000.00	
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	138,000,000.00	137,744,928.40	99.82	137,744,928.40	
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal)	6,100,500,000.00	6,100,500,000.00	100.00	6,600,500,000.00	
	Jumlah	16,738,500,000.00	16,738,244,928.40	99.99	29,938,244,928.40	
	Pembiayaan Netto	147,387,126,539.66	147,387,381,611.26	100.00	183,969,512,983.19	
	SILPA	**0.00**	**111,413,870,267.05**	**0.00**	**164,125,626,539.66**	

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH
NOMOR: 13 Tahun 2012
TANGGAL: 13 Agustus 2012
129

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(SETELAH KONVERSI)
(AUDITAN)

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2011	REALISASI 2011 Rp	%	REALISASI 2010	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN**	**1.272.583.652.677,00**	**1.311.473.547.855,47**	**103,06**	**1.095.628.887.559,93**	
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**203.416.683.768,00**	**226.723.271.088,47**	**111,46**	**163.056.459.137,93**	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	122.700.165.400,00	142.698.407.280,12	116,30	80.611.542.955,52	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	30.068.639.273,00	33.163.697.870,80	110,29	59.110.503.292,07	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yg Dipisahkan	11.027.000.000,00	11.036.188.376,45	100,08	10.169.824.623,38	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	39.620.879.095,00	39.824.977.561,10	100,52	13.164.588.266,96	
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.045.903.488.909,00**	**1.062.765.759.317,00**	**101,61**	**911.787.128.872,00**	
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perim**	**737.072.791.549,00**	**753.889.009.957,00**	**102,28**	**740.198.028.398,00**	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	60.104.485.406,00	76.228.591.902,00	126,83	104.361.867.117,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2.397.343.143,00	3.089.385.055,00	128,87	2.667.969.281,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	631.920.663.000,00	631.920.733.000,00	100,00	563.320.892.000,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	42.650.300.000,00	42.650.300.000,00	100,00	69.847.300.000,00	
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**206.545.369.360,00**	**206.591.421.360,00**	**100,02**	**86.353.294.000,00**	
1.2.2.1	Dana Tunjangan Pendidikan	148.082.286.360,00	148.082.286.360,00	100,00	84.453.294.000,00	
1.2.2.2	DPPIP	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
1.2.2.3	DPPIPD	3.983.760.000,00	3.983.760.000,00	100,00	900.000.000,00	
1.2.2.4	Bosnas	54.479.323.000,00	54.525.375.000,00	100,08	0,00	
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**102.285.328.000,00**	**102.285.328.000,00**	**100,00**	**85.235.806.474,00**	
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	94.205.328.000,00	94.205.328.000,00	100,00	73.868.806.474,00	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	8.080.000.000,00	8.080.000.000,00	100,00	11.367.000.000,00	
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**23.263.480.000,00**	**21.984.517.450,00**	**94,50**	**20.785.299.550,00**	
1.3.1	Pendapatan Hibah	23.263.480.000,00	21.984.517.450,00	94,50	20.785.299.550,00	
2	**BELANJA**	**1.376.859.030.800,05**	**1.278.055.164.511,30**	**92,82**	**1.131.602.398.904,14**	
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.189.606.875.415,05**	**1.142.118.624.078,58**	**96,01**	**989.131.133.924,33**	
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	888.389.749.624,05	860.572.677.185,19	96,87	755.838.243.854,94	
2.1.2	Belanja Barang	230.691.104.566,00	214.562.841.228,24	93,01	182.639.531.636,08	
2.1.3	Belanja Bunga	144.000.000,00	61.570.548,15	42,76	77.980.369,31	
2.1.5	Belanja Hibah	37.714.827.000,00	36.819.419.800,00	97,63	18.413.622.487,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	32.667.194.225,00	30.102.115.317,00	92,15	32.161.755.577,00	
2.2	**BELANJA MODAL**	**145.735.876.798,00**	**96.111.399.134,72**	**65,95**	**99.812.269.370,81**	
2.2.1	Belanja Tanah	17.278.259.400,00	16.552.702.227,00	95,80	69.802.625,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.352.626.626,00	12.745.728.259,00	38,22	25.939.878.319,00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	39.501.347.430,00	25.008.806.786,65	63,31	31.751.996.688,81	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	43.837.087.977,00	41.563.390.374,07	94,81	29.450.357.528,00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.766.555.365,00	240.771.488,00	2,05	12.600.234.210,00	
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.004.281.320,00**	**489.223.000,00**	**48,71**	**4.404.090.314,00**	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.004.281.320,00	489.223.000,00	48,71	4.404.090.314,00	
2.4	**TRANSFER**	**40.511.997.267,00**	**39.335.918.298,00**	**97,10**	**38.254.905.295,00**	
2.4.1	**Transfer bagi Hasil ke Desa**	**40.511.997.267,00**	**39.335.918.298,00**	**97,10**	**38.254.905.295,00**	
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	19.693.062.267,00	19.693.062.267,00	100,00	19.528.558.295,00	
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20.818.935.000,00	19.642.856.031,00	94,35	18.726.347.000,00	
	Surplus/(Defisit)	**(104.275.378.123,05)**	**33.418.383.344,17**	**(32,05)**	**(35.973.511.344,21)**	
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya	111.413.378.123,05	111.413.870.267,05	100,00	164.125.626.539,66	
	Jumlah	**111.413.378.123,05**	**111.413.870.267,05**	**100,00**	**164.125.626.539,66**	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**					
3.2.2	Penyertaan Modal	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00	85,71	10.500.000.000,00	
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	138.000.000,00	137.744.928,40	99,82	137.744.928,40	
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal)	0,00	0,00	0,00	6.100.500.000,00	
	Jumlah	**7.138.000.000,00**	**6.137.744.928,40**	**99,99**	**16.738.244.928,40**	
	Pembiayaan Netto	**104.275.378.123,05**	**105.276.125.338,65**	**100,96**	**147.387.381.611,26**	
	SILPA	**0,00**	**138.694.508.682,82**	**0,00**	**111.413.870.267,05**	

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERA
NOMOR: 9 TA
TANGGAL: 29 /
TENTANG PERTA
PELAKSANAAN A
PENDAPATAN D
TAHUN ANGGA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
(SETELAH KONVERSI)
AUDITAN

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2012	REALISASI 2012		REALISASI 2011	KET
			RP	%		
1	2	3	4	5	6	
1	**PENDAPATAN**	**1.475.128.477.847,31**	**1.589.722.974.409,13**	**107,77**	**1.311.473.547.855,47**	
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**241.003.081.720,31**	**301.069.539.284,13**	**124,92**	**226.723.271.088,47**	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	148.350.000.000,00	177.835.870.150,47	119,88	142.698.407.280,12	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	22.241.060.530,00	34.034.969.787,28	153,03	33.163.697.870,80	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yg Dipisahkan	11.713.222.161,31	12.783.121.935,56	109,13	11.036.188.376,45	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	58.698.799.029,00	76.415.577.410,82	130,18	39.824.977.561,10	
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.233.129.240.777,00**	**1.281.708.216.150,00**	**103,94**	**1.062.765.759.317,00**	
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**916.800.268.049,00**	**946.821.049.150,00**	**103,27**	**753.889.009.957,00**	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	66.651.948.768,00	95.851.408.966,00	143,81	76.228.591.902,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0,00	345.477.415,00		3.089.385.055,00	
1.2.1.3	Dana Bagi Hasil Cukai	2.202.162.281,00	2.678.005.769,00	121,61	0,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	795.708.767.000,00	795.708.767.000,00	100,00	631.920.733.000,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	52.237.390.000,00	52.237.390.000,00	100,00	42.650.300.000,00	
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**208.486.544.000,00**	**208.486.544.000,00**	**100,00**	**206.591.421.360,00**	
1.2.2.1	Dana Tunjangan Pendidikan	208.486.544.000,00	208.486.544.000,00	100,00	146.082.286.360,00	
1.2.2.2	DPPIP	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3	DPPIPD	0,00	0,00	0,00	3.983.760.000,00	
1.2.2.4	Bosnas	0,00	0,00	0,00	54.525.375.000,00	
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**107.842.428.728,00**	**126.400.623.000,00**	**117,21**	**102.285.328.000,00**	
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	88.106.428.728,00	112.500.623.000,00	127,69	94.205.328.000,00	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	19.736.000.000,00	13.900.000.000,00	70,43	8.080.000.000,00	
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**996.155.350,00**	**6.945.218.975,00**	**697,20**	**21.984.517.450,00**	
1.3.1	Pendapatan Hibah	996.155.350,00	6.945.218.975,00	697,20	21.984.517.450,00	
2	**BELANJA**	**1.595.739.879.570,00**	**1.421.401.170.875,33**	**89,07**	**1.278.055.164.511,30**	
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.362.188.063.855,51**	**1.241.689.260.072,05**	**91,15**	**1.142.118.624.078,58**	
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	1.058.619.585.362,51	979.253.621.029,36	92,50	860.572.677.185,19	
2.1.2	Belanja Barang	235.650.324.392,00	203.244.891.404,66	86,25	214.562.841.228,24	
2.1.3	Belanja Bunga	144.000.000,00	45.273.123,03	31,44	61.570.548,15	
2.1.5	Belanja Hibah	50.562.429.581,00	45.170.865.015,00	89,34	36.819.419.800,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.211.724.500,00	13.974.609.500,00	81,19	30.102.115.317,00	
2.2	**BELANJA MODAL**	**182.046.890.045,40**	**132.536.252.044,00**	**72,80**	**96.111.399.134,72**	
2.2.1	Belanja Tanah	32.300.000.000,00	10.616.365.435,00	32,87	16.552.702.227,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	50.514.923.375,40	40.382.726.115,00	79,94	12.745.728.259,00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	54.189.858.731,00	46.566.932.866,00	85,93	25.008.808.786,65	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.498.844.090,00	33.358.242.745,00	96,69	41.563.390.374,07	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.543.263.849,00	1.611.984.883,00	15,29	240.771.488,00	
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.725.453.809,09**	**1.193.672.563,00**	**32,04**	**489.223.000,00**	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.725.453.809,09	1.193.672.563,00	32,04	489.223.000,00	
2.4	**TRANSFER**	**47.779.471.860,00**	**45.981.986.196,28**	**96,24**	**39.335.918.298,00**	
2.4.1	**Transfer bagi Hasil ke Desa**	**47.779.471.860,00**	**45.981.986.196,28**	**96,24**	**39.335.918.298,00**	
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	24.316.536.860,00	23.824.947.196,28	97,98	19.693.062.267,00	
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	23.462.935.000,00	22.157.039.000,00	94,43	19.642.856.031,00	
	Surplus/(Defisit)	**(120.611.401.722,69)**	**168.321.803.533,80**	**(139,56)**	**33.418.383.344,17**	
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya	138.548.094.296,00	138.694.508.682,82	100,11	111.413.870.267,05	
	Jumlah	**138.548.094.296,00**	**138.694.508.682,82**	**100,11**	**111.413.870.267,05**	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**					
3.2.2	Penyertaan Modal	17.798.692.573,31	17.798.692.573,00	100,00	6.000.000.000,00	
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	138.000.000,00	137.744.928,40	99,82	137.744.928,40	
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah	**17.936.692.573,31**	**17.936.437.501,40**	**99,99**	**6.137.744.928,40**	
	Pembiayaan Netto	**120.611.401.722,69**	**120.758.071.181,42**	**100,12**	**105.276.125.338,65**	
	SILPA	**0,00**	**289.079.874.715,22**	**0,00**	**138.694.508.682,82**	

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Alamat : JL Parasamya No.05 Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telephone (0274) 867248, 868405 Psw 1327, Fax (0274) 868414 Kode Pos 55511

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2008

KODE REKENING	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN LALU (Rp)	REALISASI PENERIMAAN BULAN INI (Rp)	REALISASI PENERIMAAN JUMLAH S/D BL INI (Rp)	%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
2	4	4	5	6	7	8	9
1.1.20.05.2.00.00.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH						
4 1 1	PAJAK DAERAH						
4 1 1 01	1. Pajak Hotel	11.000.000.000,00	12.989.953.957,98	1.532.443.246,18	14.522.397.204,16	132,02	3.522.397.204,16
4 1 1 02	2. Pajak Restoran	5.100.000.000,00	6.072.995.459,92	602.526.548,65	6.675.522.008,57	130,89	1.575.522.008,57
4 1 1 03	3. Pajak Hiburan	2.300.000.000,00	3.233.528.824,30	320.138.206,80	3.553.667.031,10	154,51	1.253.667.031,10
4 1 1 04	4. Pajak Reklame	5.621.622.443,00	7.931.329.319,16	215.693.244,21	8.147.022.563,37	144,92	2.525.400.120,37
4 1 1 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	24.000.000.000,00	23.229.069.889,00	3.692.053.446,00	26.921.123.335,00	112,17	2.921.123.335,00
4 1 1 06	6. Pajak Pengambilan BGGC (P3BA)	650.000.000,00	421.947.438,50	129.125.250,00	551.072.688,50	84,78	(98.927.311,50)
4 1 1 07	7. Pajak Parkir	500.000.000,00	593.716.200,00	56.378.100,00	650.094.300,00	130,02	150.094.300,00
	Jumlah A	49.171.622.443,00	54.472.541.088,86	6.548.358.041,84	61.020.899.130,70	124,10	11.849.276.687,70

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Alamat : Jl. Parasamya No.05 Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telephone (0274) 867248, 868405 Psw 1327, Fax (0274) 868414 Kode Pos 55511

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2009

KODE REKENING	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN LALU (Rp)	REALISASI PENERIMAAN BULAN INI (Rp)	REALISASI PENERIMAAN JUMLAH S/d BLN INI (Rp)	%	KET. LEBIH (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 1 20 05 00 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH						
4 1 1	PAJAK DAERAH	12.500.000.000,00	16.557.627.217,00	1.631.996.987,48	18.189.624.204,48	145,52	5.689.624.204,48
4 1 1 01	1. Pajak Hotel	6.000.000.000,00	6.934.600.031,87	694.340.625,66	7.628.940.657,53	127,15	1.628.940.657,53
4 1 1 02	2. Pajak Restoran	2.600.000.000,00	3.353.229.251,10	284.129.190,06	3.637.358.441,16	139,90	1.037.358.441,16
4 1 1 03	3. Pajak Hiburan	6.800.000.000,00	7.672.697.036,27	1.338.163.078,22	9.010.860.114,49	132,51	2.210.860.114,49
4 1 1 04	4. Pajak Reklame	27.200.000.000,00	28.524.824.620,00	2.665.286.869,00	31.190.111.489,00	114,67	3.990.111.489,00
4 1 1 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	650.000.000,00	445.362.975,00	217.078.575,00	662.441.550,00	101,91	12.441.550,00
4 1 1 06	6. Pajak Pengambilan BGGC (P3BA)	600.000.000,00	678.818.150,00	46.576.500,00	725.394.650,00	120,90	125.394.650,00
4 1 1 07	7. Pajak Parkir						
	Jumlah A	56.350.000.000,00	64.167.159.281,24	6.877.571.825,42	71.044.731.106,66	126,08	14.694.731.106,66

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Alamat : JL Parasamya No.05 Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telephone (0274) 867248, 868405 Psw 1327, Fax (0274) 868414 Kode Pos 55511

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2010

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET STL PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
				S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 20 1 20 07	*DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & KEKAYAAN DAERAH*						
A	4 1 01	PAJAK DAERAH						
	4 1 01 01	1. Pajak Hotel	21.326.096.600,00	21.576.664.548,17	897.176.396,97	22.473.840.945,14	105,38	1.147.744.345,14
	4 1 01 02	2. Pajak Restoran	8.668.000.000,00	9.492.826.219,18	702.212.507,70	10.195.038.726,88	117,62	1.527.038.726,88
	4 1 01 03	3. Pajak Hiburan	3.500.000.000,00	3.603.880.719,51	189.632.521,90	3.793.513.241,41	108,39	293.513.241,41
	4 1 01 04	4. Pajak Reklame	8.600.000.000,00	7.102.731.673,39	1.956.841.913,70	9.059.573.587,09	105,34	459.573.587,09
	4 1 01 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	32.500.000.000,00	30.221.147.276,00	3.398.243.070,00	✓ 33.619.390.346,00	103,44	1.119.390.346,00
	4 1 01 06	6. Pajak Pengambilan BGGC (P3BA)	650.000.000,00	386.402.805,00	313.574.850,00	✓ 699.977.655,00	107,69	49.977.655,00
	4 1 01 07	7. Pajak Parkir	725.000.000,00	704.867.318,00	65.341.136,00	✓ 770.208.454,00	106,24	45.208.454,00
		Jumlah A	75.969.096.600,00	73.088.520.559,25	7.523.022.396,27	80.611.542.955,52	106,11	4.642.446.355,52

PEMERINTAH KABUPATEN SLEM
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Alamat : Jl. Parasamya No.06 Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telephone (0274) 867248, 868405 Psw 1327, Fax (0274) 868414 Kode Pos 55511

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2011

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET PAPBD (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN LALU (Rp)	REALISASI PENERIMAAN BULAN INI (Rp)	REALISASI PENERIMAAN JUMLAH s/d BL INI (Rp)	%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*1 20 1 20 07*	*DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN & KEKAYAAN DAERAH*						
A	4 1 01	PAJAK DAERAH						
	4 1 01 01	1. Pajak Hotel	22.000.000.000,00	20.099.510.040,09	2.538.370.345,13	22.637.880.385,22	102,90	637.880.385,22
	4 1 01 02	2. Pajak Restoran	13.000.000.000,00	11.544.761.162,03	1.712.723.621,82	13.257.484.783,85	101,98	257.484.783,85
	4 1 01 03	3. Pajak Hiburan	3.200.000.000,00	2.492.142.257,60	217.692.627,80	2.709.834.885,40	84,68	(490.165.114,60)
	4 1 01 04	4. Pajak Reklame	8.750.000.000,00	8.675.531.912,01	647.035.359,00	9.322.567.271,01	106,54	572.567.271,01
	4 1 01 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	38.400.000.000,00	36.629.223.917,00	3.392.870.886,00	40.022.094.803,00	104,22	1.622.094.803,00
	4 1 01 06	6. Pajak Pengambilan BGGC (SDAEM)	3.000.000.000,00	2.641.780.125,00	576.605.550,00	3.218.385.675,00	107,28	218.385.675,00
	4 1 01 07	7. Pajak Parkir	850.165.400,00	676.258.762,00	175.311.650,00	851.570.412,00	100,17	1.405.012,00
	4 1 01 08	8. Pajak BPHTB	32.500.000.000,00	41.589.000.559,50	7.648.392.123,50	49.237.392.683,00	151,50	16.737.392.683,00
	4 1 01 09	9. Pajak Air Tanah (SDAEM)	1.000.000.000,00	1.307.277.988,44	133.918.393,20	1.441.196.381,64	144,12	441.196.381,64
		Jumlah A	122.700.165.400,00	125.655.486.723,67	17.042.920.556,45	142.698.407.280,12	116,30	19.998.241.880,12

Keterangan : Korsip Pajak Reklame penerimaan tgl 31/5/2011 pada tgl 13/6/2011 Rp. 19.389.700,-

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Parasamya No. 05, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2012

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN LALU (Rp)	REALISASI PENERIMAAN BULAN INI (Rp)	REALISASI PENERIMAAN JUMLAH s/d BL INI (Rp)	%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 20 1 20 28	*DINAS PENDAPATAN DAERAH*						
A	4 1 01	PAJAK DAERAH						
	4 1 01 01	1. Pajak Hotel	25,000,000,000.00	28,549,716,950.48	3,667,269,869.59	32,216,986,820.07	128.87	7,216,986,820.07
	4 1 01 02	2. Pajak Restoran	14,000,000,000.00	15,042,204,693.28	1,716,677,502.50	16,758,882,195.78	119.71	2,758,882,195.78
	4 1 01 03	3. Pajak Hiburan	2,600,000,000.00	3,375,023,457.58	429,469,703.98	3,804,493,161.56	146.33	1,204,493,161.56
	4 1 01 04	4. Pajak Reklame	9,000,000,000.00	9,827,537,206.22	1,512,602,817.00	11,340,140,023.22	126.00	2,340,140,023.22
	4 1 01 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	40,500,000,000.00	37,691,452,888.00	3,854,078,431.00	41,545,531,319.00	102.58	1,045,531,319.00
	4 1 01 11	6. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC(SDAEM)	5,500,000,000.00	6,869,995,050.00	1,150,165,275.00	8,020,160,325.00	145.82	2,520,160,325.00
	4 1 01 07	7. Pajak Parkir	750,000,000.00	781,305,117.00	74,713,165.00	856,018,282.00	114.14	106,018,282.00
	4 1 01 08	8. Pajak Air Tanah(SDAEM)	1,500,000,000.00	1,743,307,856.36	129,646,621.20	1,872,954,477.56	124.86	372,954,477.56
	4 1 01 09	9. Pajak BPHTB	49,500,000,000.00	52,476,130,244.78	8,944,573,301.50	61,420,703,546.28	124.08	11,920,703,546.28
		Jumlah A	148,350,000,000.00	156,356,673,463.70	21,479,196,686.77	177,835,870,150.47	119.88	29,485,870,150.47
3	4 1 2	RETRIBUSI						
	4 1 2 02 10	1. Tempat Rekreasi dan OR	1,600,000,000.00	1,607,662,472.00	151,761,000.00	1,759,423,472.00	109.96	159,423,472.00
		- Kaliurang	1,600,000,000.00	1,607,662,472.00	151,761,000.00	1,759,423,472.00	109.96	159,423,472.00
	4 1 2 02	2. Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	214,173,176.39	39,611,528.82	253,784,705.21	#DIV/0!	253,784,705.21
		- Sewa lahan reklame	0.00	214,173,176.39	39,611,528.82	253,784,705.21	#DIV/0!	253,784,705.21
		Jumlah 1	149,950,000,000.00	158,178,509,112.09	21,670,569,215.59	179,849,078,327.68	119.94	29,899,078,327.68

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Parasamya No. 05, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2013

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN LALU (Rp)	REALISASI PENERIMAAN BULAN INI (Rp)	REALISASI PENERIMAAN JUMLAH s/d BL INI (Rp)	%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*1 20 1 20 28*	*DINAS PENDAPATAN DAERAH*						
A	4 1 01	PAJAK DAERAH						
	4 1 01 01	1. Pajak Hotel	32.000.000.000,00	36.866.757.012,74	4.636.001.572,86	41.502.758.585,60	129,70	9.502.758.585,60
	4 1 01 02	2. Pajak Restoran	17.500.000.000,00	18.854.931.814,19	2.189.532.136,53	21.044.463.950,72	120,25	3.544.463.950,72
	4 1 01 03	3. Pajak Hiburan	3.500.000.000,00	4.494.457.032,36	416.093.607,60	4.910.550.639,96	140,30	1.410.550.639,96
	4 1 01 04	4. Pajak Reklame	9.000.000.000,00	10.829.998.365,48	1.322.056.245,00	12.152.054.610,48	135,02	3.152.054.610,48
	4 1 01 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	43.000.000.000,00	44.578.388.492,00	4.835.470.123,00	49.413.858.615,00	114,92	6.413.858.615,00
	4 1 01 07	6. Pajak Parkir	800.000.000,00	953.501.941,20	92.724.990,00	1.046.226.931,20	130,78	246.226.931,20
	4 1 01 08	7. Pajak Air Tanah(SDAEM)	1.600.000.000,00	1.807.670.145,94	219.086.538,87	2.026.756.684,81	126,67	426.756.684,81
	4 1 01 11	8. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC(SDAEM)	6.500.000.000,00	8.284.306.125,00	1.035.192.525,00	9.319.498.650,00	143,38	2.819.498.650,00
	4 1 01 12	9. Pajak Bumi dan Bangunan	45.000.000.000,00	56.455.242.023,00	1.154.350.448,00	57.609.592.471,00	128,02	12.609.592.471,00
	4 1 01 13	10. Pajak BPHTB	65.000.000.000,00	69.967.903.610,00	12.391.476.475,00	82.359.380.085,00	126,71	17.359.380.085,00
		Jumlah A	223.900.000.000,00	253.093.156.561,91	28.291.984.661,86	281.385.141.223,77	125,67	57.485.141.223,77
B	4 1 2	RETRIBUSI						
	4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha						
	4 1 2 02 10	1. Tempat Rekreasi dan OR	1.600.000.000,00	1.639.886.500,00	195.474.000,00	1.835.360.500,00	114,71	235.360.500,00
		- Kaliurang	1.600.000.000,00	1.639.886.500,00	195.474.000,00	1.835.360.500,00	114,71	235.360.500,00
	4 1 2 02	2. Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	404.245.941,80	23.845.417,38	428.091.359,18	#DIV/0!	428.091.359,18
		- Sewa lahan reklame	0,00	404.245.941,80	23.845.417,38	428.091.359,18	#DIV/0!	428.091.359,18
		Jumlah B	1.600.000.000,00	2.044.132.441,80	219.319.417,38	2.263.451.859,18	141,47	663.451.859,18
C	4 1 4	LAIN-LAIN PAD Yang Sah						
	4 1 4 07	Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	4 1 4 08	Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		Jumlah C	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		Jumlah 1	225.500.000.000,00	255.137.289.003,71	28.511.304.079,24	283.648.593.082,95	125,79	58.148.593.082,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 1 20 1 20 07	*DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*						
A		RETRIBUSI						
	4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha						
	4 1 2 02 01	1. Pemakaian Kekayaan Daerah	442.501.000,00	537.706.500,00	53.053.200,00	590.759.700,00	133,50	148.258.700,00
	4 1 2 02 01	a. Sewa Gedung :	39.501.000,00	53.531.250,00	12.230.000,00	65.761.250,00	166,48	26.260.250,00
	4 1 2 02 01	b. Sewa Lapangan	21.000.000,00	23.408.750,00	450.000,00	23.858.750,00	113,61	2.858.750,00
	4 1 2 02 01	c. Sewa Bus	7.000.000,00	23.662.500,00	2.300.000,00	25.962.500,00	370,89	18.962.500,00
		d. Sewa Rumah Dinas	0,00	604.800,00	151.200,00	756.000,00	#DIV/0!	756.000,00
		e. Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		f. Gd. Olah Raga	25.000.000,00	70.590.000,00	2.480.000,00	73.070.000,00	292,28	48.070.000,00
	4 1 2 02 10	g. Tempat Rekreasi & Olahraga Stadion Maguwoharjo	350.000.000,00	365.909.200,00	35.442.000,00	401.351.200,00	114,67	51.351.200,00
		Jumlah A	442.501.000,00	537.706.500,00	53.053.200,00	590.759.700,00	133,50	148.258.700,00
B	4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN						
	4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perush Milik Daerah/BUMD	14.055.000.000,00	15.174.565.109,42	0,00	15.174.565.109,42	107,97	1.119.565.109,42
	4 1 3 01 01	a. PD. BPR Bank Sleman	4.000.000.000,00	4.214.481.922,00	0,00	4.214.481.922,00	105,36	214.481.922,00
	4 1 3 01 02	b. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Prop. DIY	10.000.000.000,00	10.677.379.636,42	0,00	10.677.379.636,42	106,77	677.379.636,42
	4 1 3 01 03	c. PDAM	55.000.000,00	282.703.551,00	0,00	282.703.551,00	514,01	227.703.551,00
		Jumlah B	14.055.000.000,00	15.174.565.109,42	0,00	15.174.565.109,42	107,97	1.119.565.109,42
C	4 1 4	LAIN-LAIN PAD Yang Sah						
	4 1 4 01	1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	0,00	841.200.000,00	0,00	841.200.000,00	#DIV/0!	841.200.000,00
	4 1 4 01 01	a. Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	4 1 4 01 02	b. Barang Inventaris/Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	4 1 4 01 05	c. Kendaraan Dinas	0,00	550.600.000,00	0,00	550.600.000,00	#DIV/0!	550.600.000,00
	4 1 4 01 08	d. Hasil Penebangan Pohon/Penjualan Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	4 1 4 01 10	e. Bahan-bahan Bekas Bangunan/penghapusan	0,00	290.600.000,00	0,00	290.600.000,00	#DIV/0!	290.600.000,00
	4 1 4 02	2. Penerimaan Jasa Giro	918.158.695,00	1.325.049.313,00	178.111.370,00	1.503.160.683,00	163,71	585.001.988,00
	4 1 4 02 01	a. Jasa Giro Kas Da/Bank	918.158.695,00	1.245.102.755,00	126.303.897,00	1.371.406.652,00	149,36	453.247.957,00
	4 1 4 02 02	b. Jasa Giro/Bunga Bank Bendaharawan	0,00	79.946.558,00	51.807.473,00	131.754.031,00	#DIV/0!	131.754.031,00
	4 1 4 02 03	c. Jasa Giro Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	4 1 4 03	3. Pendapatan Bunga Deposito	8.000.000.000,00	22.790.002.877,21	3.232.765.041,33	26.022.767.918,54	325,28	18.022.767.918,54
	4 1 4 04	4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Hasil temuan *)	0,00	118.694.584,00	2.250.000,00	120.944.584,00	#DIV/0!	120.944.584,00
	4 1 4 06	5. Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan *)	0,00	42.323.557,53	280.278.119,88	322.601.677,41	#DIV/0!	322.601.677,41
	4 1 4 08	6. Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	4 1 4 10 03	7. Setoran Pengembalian gaji dan tunjangan :)	0,00	166.300.993,00	5.859.410,00	172.160.403,00	#DIV/0!	172.160.403,00
		- Sebelum Tahun 2013	0,00	166.300.993,00	5.859.410,00	172.160.403,00	#DIV/0!	172.160.403,00
	4 1 4 16	8. Lain-lain *)	0,00	878.942.303,83	275.920.707,92	1.154.863.011,75	#DIV/0!	1.154.863.011,75
		Jumlah C	8.918.158.695,00	26.162.513.628,57	3.975.184.649,13	30.137.698.277,70	337,94	21.219.539.582,70
		Jumlah 2	23.415.659.695,00	41.874.785.237,99	4.028.237.849,13	45.903.023.087,12	196,04	22.487.363.392,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	1 20 1 20 08	*DINAS PASAR*						
	4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	4.075.707.100,00	4.196.205.025,00	418.130.600,00	4.614.335.625,00	113,55	538.628.525,00
	4 1 2 01 02	- Pelayanan Persampahan	900.511.900,00	918.013.550,00	90.762.900,00	1.008.776.450,00	112,02	108.264.550,00
	4 1 2 01 06	- Pelayanan Pasar	3.175.195.200,00	3.278.191.475,00	327.367.700,00	3.605.559.175,00	113,55	430.363.975,00
		Retribusi Jasa Usaha	551.829.900,00	622.955.450,00	107.553.200,00	730.508.650,00	132,38	178.678.750,00
	4 1 2 02 01	- Pemanfaatan Kekayaan Daerah	551.829.900,00	622.955.450,00	107.553.200,00	730.508.650,00	132,38	178.678.750,00
	4 1 4	LAIN-LAIN PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		Jumlah 3	4.627.537.000,00	4.819.160.475,00	525.683.800,00	5.344.844.275,00	115,50	717.307.275,00
4	1 20 1 20 03	*SEKRETARIAT DAERAH*						
	4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	300.000.000,00	366.646.589,45	10.317.673,30	376.964.262,75	125,65	76.964.262,75
	4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD/BUKP						
	4 1 3 01 03	- BUKP	247.000.000,00	309.673.374,21	6.992.395,73	316.665.769,94	128,20	69.665.769,94
		- Dana Pembinaan	30.000.000,00	32.556.130,14	1.900.158,61	34.456.288,75	114,85	4.456.288,75
		- Jasa Produksi	23.000.000,00	24.417.085,10	1.425.118,96	25.842.204,06	112,36	2.842.204,06
		Jumlah 4	300.000.000,00	366.646.589,45	10.317.673,30	376.964.262,75	125,65	76.964.262,75
5	1 07 1 07 01	*DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA*						
A	4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum						
	4 1 2 01 05	1. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	700.000.000,00	745.831.000,00	86.568.000,00	832.399.000,00	118,91	132.399.000,00
	4 1 2 01 07	2. Pengujian Kendaraan Bermotor	1.100.000.000,00	1.176.752.000,00	106.787.500,00	1.283.539.500,00	116,69	183.539.500,00
	4 1 2 01 15	3. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.100.000.000,00	763.794.780,00	266.058.570,00	1.029.853.350,00	93,62	(70.146.650,00)
	4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha						
	4 1 2 02 04	- Terminal	361.152.000,00	374.212.000,00	51.283.500,00	425.495.500,00	117,82	64.343.500,00
		a. Terminal	325.440.000,00	340.375.000,00	45.565.500,00	385.940.500,00	118,59	60.500.500,00
		b. MCK Terminal	20.652.000,00	18.060.000,00	3.642.000,00	21.702.000,00	105,08	1.050.000,00
		c. Loket terminal Jombor	8.820.000,00	4.935.000,00	1.050.000,00	5.985.000,00	67,86	(2.835.000,00)
		d. PKL	6.240.000,00	10.842.000,00	1.026.000,00	11.868.000,00	190,19	5.628.000,00
	4 1 2 03	Retribusi Perijinan Tertentu						
	4 1 2 03 04	- Ijin Trayek	250.000,00	480.000,00	30.000,00	510.000,00	204,00	260.000,00
	4 1 2 3 04	a. Ijin Trayek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	4 1 2 3 04	b. Ijin Insidentil/Usaha Angkutan	250.000,00	480.000,00	30.000,00	510.000,00	204,00	260.000,00
B	4 1 4	LAIN-LAIN PAD Yang Sah	0,00	65.162.000,00	15.229.800,00	80.391.800,00	#DIV/0!	80.391.800,00
	4 1 4 01	Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	64.994.000,00	15.223.500,00	80.217.500,00	#DIV/0!	80.217.500,00
	4 1 4 02	Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	168.000,00	6.300,00	174.300,00	#DIV/0!	174.300,00
	4 1 4 03	Denda Retribusi Perijinan tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		Jumlah 5	3.261.402.000,00	3.126.231.780,00	525.957.370,00	3.652.189.150,00	111,98	390.787.150,00
6	1 14 1 14 01	*DINAS NAKERSOS*						
		Retribusi Jasa Umum						
	4 1 3 01 10	- Pelayanan Pendidikan/Pelatihan Kerja Swadana	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
		Jumlah 6	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
7	1 20 1 20 09	*KANTOR PELAYANAN PERIJINAN*						
	4 1 2 03	Retribusi Perijinan Tertentu						
	4 1 2 03 03	- Ijin Gangguan/Keramaian	1.700.000.000,00	2.260.593.266,17	105.486.703,50	2.366.079.969,67	139,18	666.079.969,67
		- Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0,00	5.514.264,90	32.752,80	5.547.017,70	#DIV/0!	5.547.017,70
		Jumlah 7	1.700.000.000,00	2.266.107.531,07	105.519.456,30	2.371.626.987,37	139,18	671.626.987,37

*) di Rekening Kasda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	1 03 1 03 01	*DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN*						
A	4 1 2	**Retribusi Jasa Umum**						
	4 1 2 01 02	1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000.000,00	1.872.122.769,76	162.230.592,00	2.034.353.361,76	135,62	534.353.361,76
	4 1 2 01 04	2. Pelayanan Pemakaman	161.838.000,00	169.650.000,00	22.300.000,00	191.950.000,00	118,61	30.112.000,00
	4 1 2 02 02	3. Pengolahan Limbah Cair	60.000.000,00	79.097.865,00	6.380.220,00	85.478.085,00	142,46	25.478.085,00
		Retribusi Jasa Usaha						
	4 1 2 02 01	Pemakaian Kekayaan daerah	1.888.072.320,00	1.669.490.739,00	293.094.000,00	1.962.584.739,00	103,95	74.512.419,00
	4 1 2 01 01	a. Sewa Alat Laborat & alat konstruksi	11.434.400,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,80	(11.342.400,00)
	4 1 2 01 01	b. Sewa Alat -alat Berat	122.800.000,00	83.788.000,00	9.200.000,00	92.988.000,00	75,72	(29.812.000,00)
		c. Sewa Rusunawa	1.753.837.920,00	1.582.474.739,00	177.722.000,00	1.760.196.739,00	100,36	6.358.819,00
		d. Pemakaian Tanah pd ruas milik jalan	0,00	3.136.000,00	106.172.000,00	109.308.000,00	#DIV/0!	109.308.000,00
	4 1 2 03	**Retribusi Perijinan Tertentu**						
	4 1 2 03 01	- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	9.300.000.000,00	24.717.936.456,00	2.782.603.640,00	27.500.540.096,00	295,70	18.200.540.096,00
		Jumlah 8A	12.909.910.320,00	28.508.297.829,76	3.266.608.452,00	31.774.906.281,76	246,13	18.864.995.961,76
B		Lain-lain PAD yang sah						
	4 1 4 01	1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan						
	4 1 4 01 07	a. Penjualan drum bekas aspal	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		2. Denda Retribusi	3.500.000.000,00	8.242.644.166,03	409.499.642,00	8.652.143.808,03	247,20	5.152.143.808,03
	4 1 4 08 01	a. Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	13.213.588,00	2.287.930,00	15.501.518,00	#DIV/0!	15.501.518,00
	4 1 4 08 02	b. Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	14.144.689,25	2.184.020,00	16.328.709,25	#DIV/0!	16.328.709,25
	4 1 4 08 01	c. Denda Retribusi Perijinan Tertentu	3.500.000.000,00	8.215.285.888,78	405.027.692,00	8.620.313.580,78	246,29	7.370.313.580,78
		Jumlah 8B	3.500.000.000,00	8.242.644.166,03	409.499.642,00	8.652.143.808,03	247,20	5.152.143.808,03
		Jumlah	16.409.910.320,00	36.750.941.995,79	3.676.108.094,00	40.427.050.089,79	246,36	24.017.139.769,79
9	2 04 1 17 01	*DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA*						
A	4 1 2 02	**Retribusi Jasa Usaha**	704.352.000,00	811.460.170,00	139.971.025,00	951.431.195,00	135,08	247.079.195,00
	4 1 2 02 01	1. Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah	61.712.000,00	41.683.670,00	4.456.025,00	46.139.695,00	74,77	(15.572.305,00)
	4 1 2 02 01	a. Fasilitas Kaliurang	17.720.000,00	10.346.200,00	1.508.500,00	11.854.700,00	66,90	(5.865.300,00)
	4 1 2 02 01	b. Fasilitas Tlogoputri/Kios Kaliurang	43.992.000,00	31.337.470,00	2.947.525,00	34.284.995,00	77,93	(9.707.005,00)
	4 1 2 02 10	2. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	642.640.000,00	769.776.500,00	135.515.000,00	905.291.500,00	140,87	262.651.500,00
		a. Candi	25.000.000,00	37.920.000,00	4.397.000,00	42.317.000,00	169,27	17.317.000,00
		b. Menara Pandang	17.640.000,00	16.266.500,00	1.374.000,00	17.640.500,00	100,00	500,00
		c. Wahana Musium Gunung Merapi	330.000.000,00	337.681.000,00	60.009.000,00	397.690.000,00	120,51	67.690.000,00
		d. Tiket Sinema/Mini Theater	270.000.000,00	377.909.000,00	69.735.000,00	447.644.000,00	165,79	177.644.000,00
B	4 1 4	**Lain-lain PAD yang sah**	205.000.000,00	202.077.513,00	20.903.710,00	222.981.223,00	108,77	17.981.223,00
	4 1 4	1. Bagi Hasil TWC Ratu Boko	180.000.000,00	175.924.233,00	17.726.910,00	193.651.143,00	107,58	13.651.143,00
		2. Bagi Hasil Parkir Musium Gunung Merapi	25.000.000,00	26.153.280,00	3.176.800,00	29.330.080,00	117,32	4.330.080,00
	4 1 4 08 02	Denda Retribusi Jasa Usaha						
		Jumlah 9	909.352.000,00	1.013.537.683,00	160.874.735,00	1.174.412.418,00	129,15	265.060.418,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	4 02 1 02 01	*DINAS KESEHATAN*						
	4 1 4	LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD						
	4 1 4 16 01	Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pasien Umum	14.113.755.827,00	14.133.902.218,00	1.656.016.954,00	15.789.919.172,00	111,88	1.676.163.345,00
		Jumlah 10	14.113.755.827,00	14.133.902.218,00	1.656.016.954,00	15.789.919.172,00	111,88	1.676.163.345,00
11	1 02 1 02 02	*RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN*						
	4 1 4 15 01	LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD	43.982.399.000,00	44.858.817.473,40	3.378.349.689,00	48.237.167.162,40	109,67	4.254.768.162,40
		Jumlah 11	43.982.399.000,00	44.858.817.473,40	3.378.349.689,00	48.237.167.162,40	109,67	4.254.768.162,40
12	1 02 1 02 03	*RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN*						
	4 1 4	LAIN-LAIN PAD Yang Sah/Rekening BLUD	5.244.360.912,81	4.241.915.329,45	376.997.845,00	4.618.913.174,45	88,07	(625.447.738,36)
	4 1 4 15 01	- Pelayanan Kesehatan	5.244.360.912,81	4.229.388.740,45	376.997.845,00	4.606.386.585,45	87,84	(637.974.327,36)
		- Jasa Giro	0,00	12.526.589,00	0,00	12.526.589,00	#DIV/0!	12.526.589,00
		Jumlah 12	5.244.360.912,81	4.241.915.329,45	376.997.845,00	4.618.913.174,45	88,07	(625.447.738,36)
13	1 16 1 16 01	*KANTOR P3M*						
	4 1 4	*Lain-lain PAD yang sah*						
	4 1 4 14	Kontribusi Masyarakat dari Penguatan Modal	1.787.930.443,00	2.220.726.000,00	356.240.000,00	2.576.966.000,00	144,13	789.035.557,00
	4 1 4 14 01	- Kontribusi Penguatan dari Perindustrian	100.545.255,00	113.290.000,00	10.860.000,00	124.150.000,00	123,48	23.604.745,00
	4 1 4 14 02	a. - Kontribusi Koperasi	353.765.250,00	477.600.000,00	40.175.000,00	517.775.000,00	146,36	164.009.750,00
	4 1 4 14 02	b. - Kontribusi KP2KS	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	100,00	0,00
	4 1 4 14 02	c. - Kontribusi Aman	183.000.000,00	167.750.000,00	15.250.000,00	183.000.000,00	100,00	0,00
	4 1 4 14 02	d. - Kontribusi Mekar	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00
	4 1 4 14 03	- Kontribusi Penguatan dari Perikanan	98.075.000,00	119.825.000,00	4.100.000,00	123.925.000,00	126,36	25.850.000,00
	4 1 4 14 04	- Kontribusi Penguatan Modal TPH dan Ketapang	172.282.500,00	236.975.000,00	99.637.500,00	336.612.500,00	195,38	164.330.000,00
	4 1 4 14 05	- Kontribusi Penguatan dari Peternakan	397.227.500,00	583.955.000,00	141.535.000,00	725.490.000,00	182,64	328.262.500,00
	4 1 4 14 06	- Kontribusi Penguatan dari Kehutanan	9.562.500,00	22.125.000,00	1.250.000,00	23.375.000,00	244,44	13.812.500,00
	4 1 4 14 07	- Kontribusi Penguatan dari Perkebunan	23.618.438,00	30.330.000,00	2.850.000,00	33.180.000,00	140,48	9.561.562,00
	4 1 4 14 08	- Kontribusi Penguatan dari Ketenagakerjaan	11.200.000,00	13.650.000,00	100.000,00	13.750.000,00	122,77	2.550.000,00
	4 1 4 14 09	- Kontribusi Penguatan dari Keluarga terPHK	35.854.125,00	31.698.500,00	2.277.500,00	33.976.000,00	94,76	(1.878.125,00)
	4 1 4 14 10	- Kontribusi Penguatan Modal UPPKS	143.732.500,00	142.615.000,00	15.990.000,00	158.605.000,00	110,35	14.872.500,00
	4 1 4 14 11	- Kontribusi Penguatan Modal USEP	20.320.000,00	25.695.000,00	2.707.500,00	28.402.500,00	139,78	8.082.500,00
	4 1 4 14 12	- Kontribusi dari Pariwisata	86.775.000,00	93.225.000,00	10.475.000,00	103.700.000,00	119,50	16.925.000,00
	4 1 4 14 13	- Kontribusi dari Pasar	29.616.000,00	35.327.500,00	7.027.500,00	42.355.000,00	143,01	12.739.000,00
	4 1 4 14 14	- Kontribusi dari Lulusan Pelatihan	14.856.375,00	19.165.000,00	2.005.000,00	21.170.000,00	142,50	6.313.625,00
	4 1 4	- Denda Angsuran	0,00	1.777.750,00	236.675,00	2.014.425,00	#DIV/0!	2.014.425,00
	4 1 4	- Jasa Giro Penguatan Modal	240.000.000,00	334.424.331,00	30.253.870,00	364.678.201,00	151,95	124.678.201,00
		Jumlah 13	2.027.930.443,00	2.556.928.081,00	386.730.545,00	2.943.658.626,00	145,16	915.728.183,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	1 10 1 10 01	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL*						
	4 1 2 01	*Retribusi Jasa Umum*						
	4 1 2 01 03	Penggantian Biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil	578.600.000,00	589.844.000,00	55.496.000,00	645.340.000,00	111,53	66.740.000,00
	4 1 2 01 03	1. Penggantian Biaya cetak KTP	492.050.000,00	521.154.000,00	41.351.000,00	562.505.000,00	114,32	70.455.000,00
	4 1 2 01 03	2. Penggantian Biaya Akta catatan sipil	86.550.000,00	68.690.000,00	14.145.000,00	82.835.000,00	95,71	(3.715.000,00)
	4 1 4	Lain-lain PAD yang sah						
	4 1 4 17	- Lain-lain pendapatan Kependudukan dan Catatan Sipil	344.500.000,00	353.655.000,00	28.065.000,00	381.720.000,00	110,80	37.220.000,00
		Jumlah 14	923.100.000,00	943.499.000,00	83.561.000,00	1.027.060.000,00	111,26	103.960.000,00
15	2 01 1 21 01	*DINAS PERTANIAN PERIKANAN & KEHUTANAN*						
A		Retribusi Jasa Umum	217.800.000,00	216.223.800,00	16.649.300,00	232.873.100,00	106,92	15.073.100,00
	4 1 2 01 06	- Pelayanan Pasar Hewan Gamping	217.800.000,00	216.223.800,00	16.649.300,00	232.873.100,00	106,92	15.073.100,00
		Retribusi Jasa Usaha	257.100.000,00	194.600.000,00	65.596.000,00	260.196.000,00	101,20	3.096.000,00
	4 1 2 02 08	1. Rumah Potong Hewan	45.900.000,00	44.057.500,00	4.404.000,00	48.461.500,00	105,58	2.561.500,00
	4 1 2 02 13	2. Penjualan Produksi Usaha Daerah	211.200.000,00	150.542.500,00	61.192.000,00	211.734.500,00	100,25	534.500,00
	4 1 2 02 13	a. Penjualan Benih Ikan	75.000.000,00	65.362.500,00	19.775.000,00	85.137.500,00	113,52	10.137.500,00
	4 1 2 02 13	b. Penjualan Hasil Tanaman BPP	133.200.000,00	82.380.000,00	41.217.000,00	123.597.000,00	92,79	(9.603.000,00)
	4 1 2 02 13	c. Penjualan Hasil Kebun Sawungan	3.000.000,00	2.800.000,00	200.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
	4 1 4	Lain-lain PAD yang sah	0,00	2.000.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	#DIV/0!	18.000.000,00
	4 1 4 17	- Lain-lain pendapatan	0,00	2.000.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	#DIV/0!	18.000.000,00
		Jumlah 15	474.900.000,00	412.823.800,00	98.245.300,00	511.069.100,00	107,62	36.169.100,00
		JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	*342.895.307.197,81*	*412.502.586.197,86*	*43.523.904.389,97*	*456.026.490.587,83*	*132,99*	*113.131.183.390,02*

REKAPITULASI PER JENIS PENERIMAAN

4 1 1	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	223.900.000.000,00	253.093.156.561,91	28.291.984.661,86	281.385.141.223,77	125,67	57.485.141.223,77
4 1 2	PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	26.304.202.320,00	43.043.088.262,73	4.958.591.467,88	48.001.679.730,61	182,49	21.697.477.410,61
4 1 3	PENERIMAAN POS BAGIAN LABA	14.355.000.000,00	15.541.211.698,87	10.317.673,30	15.551.529.372,17	108,34	1.196.529.372,17
4 1 4	LAIN-LAIN PAD	78.336.104.877,81	100.825.129.674,35	10.263.010.586,93	111.088.140.261,28	141,81	32.752.035.383,47
	JUMLAH TOTAL PENERIMAAN PAD	342.895.307.197,81	412.502.586.197,86	43.523.904.389,97	456.026.490.587,83	132,99	113.131.183.390,02

Catatan : Apabila ada ketidakcocokan target dan realisasi penerimaan akan dikoreksi pada bulan berikutnya.

Sleman, 2014
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dra. RINI MURTI LESTARI, Akt, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19600607 198411 2 001

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya No. 05, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039

REALISASI PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN & LAIN2 PENDAPATAN YG SAH
BULAN DESEMBER 2013

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI			%	LEBIH (KURANG)
			BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 20 07 00 00 4 2	I. DANA PERIMBANGAN	992.417.480.016,00	25.748.001.476,00	967.034.429.201,00	992.782.430.677,00	100,04	364.950.661,00
1 20 07 00 00 4 2 1	A Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan Pajak	50.004.238.016,00	13.042.169.476,00	37.327.019.201,00	50.369.188.677,00	100,73	364.950.661,00
1 20 07 00 00 4 2 1 01	1 Bagi Hasil Pajak	47.223.707.347,00	11.890.743.471,00	35.017.356.331,00	46.908.099.802,00	99,33	(315.607.545,00)
1 20 07 00 00 4 2 1 01 01	*a. PBB*	14.726.000.000,00	4.086.466.901,00	13.794.878.574,00	17.881.345.475,00	121,43	3.155.345.475,00
1 20 07 00 00 4 2 1 01 03	*b. PPh Psl 21, Psl 25 & Psl 29 WP OPDN*	32.497.707.347,00	7.804.276.570,00	21.222.477.757,00	29.026.754.327,00	89,32	(3.470.953.020,00)
1 20 07 00 00 4 2 1 02	2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	96.906.416,00	251.433.555,00	348.339.971,00	#DIV/0!	348.339.971,00
1 20 05 00 00 4 2 1 02 02	*a IHPH/SDA Kehutanan*	*0,00*	*326.938,00*	*604.160,00*	*931.098,00*	*#DIV/0!*	*931.098,00*
1 20 05 00 00 4 2 1 02 03	*b Pungutan Hasil Perikanan*	*0,00*	*96.579.478,00*	*250.829.395,00*	*347.408.873,00*	*#DIV/0!*	*347.408.873,00*
1 20 07 00 00 4 2 1 03	3 Dana Bagi Hasil Cukai	2.780.530.669,00	1.054.519.589,00	2.058.229.315,00	3.112.748.904,00	111,95	332.218.235,00
1 20 07 00 00 4 2 2 01	B Dana Alokasi Umum	891.589.912.000,00	0,00	891.589.912.000,00	891.589.912.000,00	100,00	0,00
1 20 07 00 00 4 2 3 01	C Dana Alokasi Khusus	50.823.330.000,00	12.705.832.000,00	38.117.498.000,00	50.823.330.000,00	100,00	0,00
1 20 07 00 00 4 3	II. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	433.125.701.135,30	55.347.176.535,00	395.369.539.039,00	450.716.715.574,00	104,06	17.591.014.438,70
1 20 07 00 00 4 3 1	A Pendapatan Hibah	0,00	1.016.000.000,00	0,00	1.016.000.000,00	#DIV/0!	1.016.000.000,00
1 20 07 00 00 4 3 1 01 01	1 Pendapatan Hibah	0,00	1.016.000.000,00	0,00	1.016.000.000,00	#DIV/0!	1.016.000.000,00
1 20 07 00 00 4 3 1 01 02	2 Dana BEC-TF	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*#DIV/0!*	0,00
1 20 07 00 00 4 3 3	B Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak dr Propinsi	125.109.605.255,30	53.149.560.504,00	81.302.400.000,00	134.451.960.504,00	107,47	9.342.355.248,70
1 20 07 00 00 4 3 3 02	1 Bagi Hasil Pajak Propinsi	125.109.605.255,30	53.149.560.504,00	81.302.400.000,00	134.451.960.504,00	107,47	9.342.355.248,70
1 20 07 00 00 4 3 3 02 01	*a Pajak Kendaraan Bermotor*	*46.247.942.367,00*	*16.810.445.740,00*	*32.400.000.000,00*	*49.210.445.740,00*	*106,41*	*2.962.503.373,00*
1 20 07 00 00 4 3 3 02 03	*b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*	*48.495.566.508,30*	*24.039.098.649,00*	*27.900.000.000,00*	*51.939.098.649,00*	*107,10*	*3.443.532.140,70*
1 20 07 00 00 4 3 3 02 05	*c PBB KB*	*30.362.843.000,00*	*12.299.136.297,00*	*21.000.000.000,00*	*33.299.136.297,00*	*109,67*	*2.936.293.297,00*
1 20 07 00 00 4 3 3 02 07	*d Pajak Pengmbln & Pemanfaatn Air Permukaan*	*3.253.380,00*	*879.818,00*	*2.400.000,00*	*3.279.818,00*	*100,81*	*26.438,00*
1 20 05 00 00 4 3 6 01	C Dana Penyesuaian dan Otsus	32.095.325.000,00	0,00	32.095.325.000,00	32.095.325.000,00	100,00	0,00
1 20 05 00 00 4 3 4 01 01	- Dana Incentif Khusus/DID	32.095.325.000,00	0,00	32.095.325.000,00	32.095.325.000,00	100,00	0,00
1 20 05 00 00 4 3 5 01	D Bantuan Keuangan dr Pem.Provinsi/Pemda lainya	29.050.000.000,00	0,00	28.336.200.000,00	28.336.200.000,00	97,54	(713.800.000,00)
1 20 07 00 00 4 3 5 01 01	- Bantuan Keuangan dr Propinsi	29.050.000.000,00	0,00	28.336.200.000,00	28.336.200.000,00	97,54	(713.800.000,00)
1 20 05 00 00 4 3 6 01	E Bantuan Keuangan dr Pemerintah Pusat	246.870.770.880,00	1.181.616.031,00	253.635.614.039,00	254.817.230.070,00	103,22	7.946.459.190,00
1 20 05 00 00 4 3 6 01 01	1 Tunjangan Pendidikan	246.870.770.880,00	0,00	253.393.033.000,00	253.393.033.000,00	102,64	6.522.262.120,00
1 20 05 00 00 4 3 6 01 03	2 WISMP	0,00	1.181.616.031,00	242.581.039,00	1.424.197.070,00	#DIV/0!	1.424.197.070,00
	JUMLAH I + II	*1.425.543.181.151,30*	*81.095.178.011,00*	*1.362.403.968.240,00*	*1.443.499.146.251,00*	*101,26*	*17.955.965.099,70*

Sleman, 2014
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dra. RINI MURTI LESTARI, Akt, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19600607 198411 2 001

>Presented:Sie PembukuanDPKAD

Biaya Pemungutan Pajak
Tahun 2008

Rekening	Biaya
BELANJA BARANG DAN JASA	41,194,000
BELANJA MODAL	350,000
BELANJA PEGAWAI	98,235,000
BELANJA BARANG DAN JASA	20,328,900
BELANJA BARANG DAN JASA	149,720,900
BELANJA PEGAWAI	130,110,000
BELANJA BARANG DAN JASA	20,928,320
BELANJA MODAL	47,750,000
BELANJA PEGAWAI	168,173,250
BELANJA BARANG DAN JASA	640,000
BELANJA PEGAWAI	200,450,000
BELANJA BARANG DAN JASA	32,670,000
BELANJA PEGAWAI	1,288,975,225
BELANJA BARANG DAN JASA	378,310,640
BELANJA MODAL	1,866,000
BELANJA PEGAWAI	732,645,000
BELANJA BARANG DAN JASA	32,984,272
BELANJA PEGAWAI	84,040,000
BELANJA BARANG DAN JASA	127,500,000
BELANJA PEGAWAI	261,430,000
BELANJA BARANG DAN JASA	19,909,775
BELANJA MODAL	650,000
BELANJA PEGAWAI	8,085,000
BELANJA BARANG DAN JASA	7,198,000
BELANJA PEGAWAI	9,625,000
Jumlah	**3,863,769,282**

Biaya Pemungutan Pajak
Tahun 2009

Rekening	Biaya
Penetapan pajak Daera	149,000,000
Analisis Pemeriksaan dan Hasil Pemantauan Pajak Daerah	60,000,000
Penyediaan Jasa Surat Ketetapan Pajak Penerangan Jalan	160,000,000
Pendaftaran Calon WP dan Pendataan WP Daerah	236,522,750
Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	279,459,000
Pelayanan Keberatan dan Keringanan Pajak Daerah	52,900,000
Bagi Hasil Pajak	260,000,000
Pengelolaan PBB	1,996,612,500
Pembinaan dan Operasional BPHTB	989,300,000
Pengelolaan Titik Lokasi Reklame	241,000,000
Penagihan Pajak Daerah	295,075,000
Pemantauan WP Daerah	261,950,000
Intensifikasi Pajak Reklame	314,900,000
Pembinaan Wajib Pajak Daerah	27,910,000
Pengembalian PHR	21,950,000
Pelaporan SPT Masa dan Tahunan (PPH21)	150,000,000
Jumlah	**5,496,579,250**

Biaya Pemungutan Pajak
Tahun 2010

Rekening	Biaya
Pelaporan SPT Masa dan Tahunan (PPH21)	113,850,000.0
Pemeriksaan pajak Daerah	347,570,000.0
Pemantauan WP Daerah dan Pemantauan Malam Natal dan Tahun Baru	264,670,000.0
Intensifikasi pajak reklame	331,380,000.0
pengelolaan aplikasi sistem MAPATDA	119,110,000.0
Penglolaan titik lokasi reklame	185,000,000.0
Penetapan Pajak Daerah	152,000,000.0
Analissi Hasil Pemeriksaan dan Hasil Pemantauan Pajak Daerah	37,000,000.0
Penyediaan Surat Ketetapan Pajak PPJU	150,000,000.0
Penagihan Pajak Daerah	425,350,000.0
Pelayanan Keberatan dan Keringanan Pajak Daerah	64,250,000.0
Pembinaan Wajib pajak Daerah	43,300,000.0
Pengembalian PHR	25,000,000.0
Bagi Hasil Pajak	229,000,000.0
Pengelolaan PBB	1,477,329,450.0
Pendataan dan Pemeliharaan Basis Data	464,000,000.0
Pembinaan dan Operasi BPHTB	905,975,000
Penyusunan Draft Raperda Pajak Hotel	40,000,000.0
Penyusunan Draft Raperda Pajak Restoran	40,000,000.0
Penyusunan Draft Raperda Pajak Hiburan	40,000,000.0
Penyusunan Draft Raperda Pajak Reklame	40,000,000.0
Jumlah	**5,494,784,450.0**

Biaya Pemungutan Pajak
Tahun 2011

Rekening	Biaya
Pelatihan Profesional Pertugas PBB	34,000,000
Pendaftaran Calon WP dan Pemantauan WP Daerah	147,992,000
Pemeriksaan Pajak Daerah	296,750,000
Penetapan Pajak Daerah	273,366,000
Penagihan Pajak Daerah	703,497,000
Pendataan dan Pemeliharaan Basis Data PBB	703,145,390
Operasionalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman	228,750,000
Penyampaian SPT PBB dan Pembayaran PBB Panutan	599,141,000
Konseling BPHTB	67,152,500
Pendataan Wajib Pajak	275,093,000
Pemantauan dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	631,750,000
Fasilitasi Pajak Hotel dan Restoran	25,000,000
Pelayanan Permohonan Keringanan Pajak Daerah	64,250,000
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	1,066,267,910
Rekonsiliasi Penerimaan PBB	83,374,800
Penelitian SSPD dan BPHTB	617,150,000
Pengendalian Penerimaan dan Tunggakan Pajak Daerah	101,834,000
Pendampingan Intensifikasi PPh OPDN	213,665,540
Penyusunan Draft Raperda Pajak Penerangan Jalan	20,000,000
Penyusuanan Draft Raperda Pajak Parkir	20,000,000
Penyusunan Draft raperda Pajak MBLB	20,000,000
Penyusunan Draft Raperda Pajak Sarang Burung Walet	20,000,000
Jumlah	**6,212,179,140**

Biaya Pemungutan Pajak
Tahun 2012

Rekening	Biaya
Pelatihan Profesional Pertugas PBB	181,800,000
Pendaftaran Calon WP Daerah	165,000,000
Pemeriksaan Pajak Daerah	320,000,000
Penetapan Pajak Daerah	491,000,000
Penagihan Pajak Daerah	773,000,000
Pendataan dan Pemeliharaan basis Data PBB	777,000,000
Operasional Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman	226,910,000
Penyampaian SPPT PBB dan Pembayaran PBB Panutan	650,000,000
Pendataan Wajib Pajak Daerah	300,000,000
Pemantauan dan Pembinaan WP Daerah	640,000,000
Fasilitas Pajak Hotel dan Restoran	327,500,000
Pelayanan Permohonan Keringanan Pajak Daerah	70,000,000
Pelayanan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	1,657,275,000
Rekonsiliasi Penerimaan PBB	94,600,000
Penelitian SSPD dan BPHTB	1,040,380,000
Pengendalian Penerimaan dan Tunggakan Pajak Daerah	101,000,000
Pendampingan Intensifikasi PPh OPDN	213,600,000
Penyusunan Draft Raperda/raperbup Pajak dan Retribusi	112,150,000
Jumlah	**8,141,215,000**

Biaya Pemungutan Pajak
Tahun 2013

Rekening	Biaya
Pelatihan Profesional Petugas PBB	56,560,250
Pendaftaran Calon WP Daerah	188,497,500
Pemeriksaan Pajak Daerah	336,425,000
Penetapan Pajak Daerah	375,575,000
Penagihan Pajak Daerah	711,155,000
Pendataan dan Pemeliharaan Basis Data PBB	1,018,038,450
Operasional Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman	1,665,935,000
Penyampaian SPPT PBB dan Pembayaran PBB Panutan	278,625,000
Pendataan Wajib Pajak Daerah	618,865,000
Pemantauan dan Pembinaan WP Daerah	684,665,000
Fasilitas Pajak Hotel dan Restoran	578,186,000
Pelayanan Permohonan Keringanan Pajak Daerah	4,401,025,000
Pelayanan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	148,000,000
Rekonsiliasi Penerimaan PBB	385,011,000
Penelitian SSPD dan BPHTB	74,445,000
Pengendalian Penerimaan dan Tunggakan Pajak Daerah	235,900,000
Pendampingan Intensifikasi PPh OPDN	120,500,000
Penyusunan Draft Raperda/raperbup Pajak dan Retribusi	98,157,900
Operasionalisasi Administrasi PBB Tingkat Kecamaan, Desa, dan Dusun	2,118,513,345
Verifikasi Puitang Pajak Daerah	842,091,600
Jumlah	**14,936,171,045**

PAJAK DAERAH

Keterangan	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	3,863,769,282.00	5,496,579,250.00	5,494,784,450.00	6,212,179,140.00	8,141,215,000.00	14,936,171,045.00
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	61,020,899,130.70	71,044,731,107	80,611,542,955.52	142,698,407,280.12	177,835,870,150.47	281,385,141,223.77
Rasio Efisiensi	**6.33%**	**7.74%**	**6.82%**	**4.35%**	**4.58%**	**5.31%**
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	61,020,899,130.70	71,044,731,106.66	80,611,542,955.52	142,698,407,280.12	177,835,870,150.47	281,385,141,223.77
Target Penerimaan Pajak Daerah	49,171,622,443.00	56,350,000,000.00	75,969,096,600.00	122,700,165,400.00	148,350,000,000.00	223,900,000,000.00
Rasio Efektivitas	**124.10%**	**126.08%**	**106.11%**	**116.30%**	**119.88%**	**125.67%**
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	61,020,899,130.70	71,044,731,106.66	80,611,542,955.52	142,698,407,280.12	177,835,870,150.47	281,385,141,223.77
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	140,631,359,142.43	157,231,267,811.84	163,056,459,137.93	226,723,271,088.47	301,069,539,284.13	456,026,490,587.83
Kontribusi	**43.39%**	**45.18%**	**49.44%**	**62.94%**	**59.07%**	**61.70%**

Angka Indeks

Tahun	Pajak Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
	Realisasi Pajak Daerah	Angka Indeks	Realisasi	Angka Indeks
2008	61,020,899,130.70	-	140,631,359,142.43	-
2009	71,044,731,106.66	116%	157,231,267,811.84	112%
2010	80,611,542,955.52	113%	163,056,459,137.93	104%
2011	142,698,407,280.12	177%	226,723,271,088.47	139%
2012	177,835,870,150.47	125%	301,069,539,284.13	133%
2013	281,385,141,223.77	158%	456,026,490,587.83	151%

Derajat Otonomi Perpajakan

Tahun	BHP (Rp)	TPD (Rp)	DOF (%)	
2008	86,195,950,722	946,476,028,092	9.11%	
2009	93,869,391,280	996,182,714,692	9.42%	0.32%
2010	107,029,836,398	1,095,628,887,560	9.77%	0.35%
2011	79,317,976,957	1,311,473,547,855	6.05%	-3.72%
2012	98,874,892,150	1,589,722,974,409	6.22%	0.17%
2013	47,256,439,773	1,899,525,636,839	2.49%	-3.73%

Derajat Otonomi Fiskal

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DOF (%)	Kriteria Kemampuan Daerah	Pola Hubungan
2008	140,631,359,142.43	946,476,028,092.43	14.86%	Rendah sekali	Instruktif
2009	157,231,267,811.84	996,182,714,691.84	15.78%	Rendah Sekali	Instruktif
2010	163,056,459,137.93	1,095,628,887,560	14.88%	Rendah Sekali	Instruktif
2011	226,723,271,088.47	1,311,473,547,855	17.29%	Rendah Sekali	Instruktif
2012	301,069,539,284.13	1,589,722,974,409	18.94%	Rendah Sekali	Instruktif
2013	456,026,490,587.83	1,899,525,636,839	24.01%	Rendah Sekali	Instruktif

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bagi Hasil Pajak	Tidak ada keterangan	Tidak ada keterangan	104,361,867,117	76,228,591,902	Tidak ada keterangan	46,908,099,802
Bagi Hasil Bukan Pajak			2,667,969,281	3,089,385,055		348,339,971
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	**86,195,950,722**	**93,869,391,280**	**107,029,836,398**	**79,317,976,957**	**98,874,892,150**	**47,256,439,773**

Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dana Alokasi Umum	592,594,528,000	587,857,778,000	563,320,892,000	631,920,733,000	795,708,767,000	891,589,912,000
Dana Alokasi Khusus	10,151,000,000	35,976,000,000	69,847,300,000	42,650,300,000	52,237,390,000	50,823,330,000
Hibah	16,486,586,000	120,770,000	20,785,299,550	21,984,517,450	6,945,218,975	1,016,000,000
Bantuan lain	19,242,000,000	16,492,000,000	11,367,000,000	8,080,000,000	13,900,000,000	28,336,200,000
Jumlah	**638,474,114,000**	**640,446,548,000**	**665,320,491,550**	**704,635,550,450**	**868,791,375,975**	**971,765,442,000**

Kontribusi Pajak Daerah

No	Jenis Penerimaan	2008		2009		2010	
		Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi
1	Pajak Hotel	14,522,397,204.16	23.80%	18,189,624,204.48	25.60%	22,473,840,945.14	27.88%
2	Pajak Restoran	6,675,522,008.57	10.94%	7,628,940,657.53	10.74%	10,195,038,726.88	12.65%
3	Pajak Hiburan	3,553,667,031.10	5.82%	3,637,358,441.16	5.12%	3,793,513,241.41	4.71%
4	Pajak Reklame	8,147,022,563.37	13.35%	9,010,860,114.49	12.68%	9,059,573,587.09	11.24%
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	26,921,123,335.00	44.12%	31,190,111,489.00	43.90%	33,619,390,346.00	41.71%
6	Pajak Pengambilan BGGC	551,072,688.50	0.90%	662,441,550.00	0.93%	699,977,655.00	0.87%
7	Pajak Parkir	650,094,300.00	1.07%	725,394,650.00	1.02%	770,208,454.00	0.96%
8	Pajak BPHTB	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
9	Pajak Air tanah (SDAEM)	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10	Pajak Bumi dan Bangunan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Realisasi PAD		**61,020,899,131**	**100%**	**71,044,731,107**	**100%**	**80,611,542,956**	**100%**

No	Jenis Penerimaan	2011		2012		2013	
		Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi	Jumlah	Kontribusi
1	Pajak Hotel	22,637,880,385.22	15.86%	32,216,986,820.07	18.12%	41,502,758,585.60	14.75%
2	Pajak Restoran	13,257,484,783.85	9.29%	16,758,882,195.78	9.42%	21,044,463,950.72	7.48%
3	Pajak Hiburan	2,709,834,885.40	1.90%	3,804,493,161.56	2.14%	4,910,550,639.96	1.75%
4	Pajak Reklame	9,322,567,271.01	6.53%	11,340,140,023.22	6.38%	12,152,054,610.48	4.32%
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	40,022,094,803.00	28.05%	41,545,531,319.00	23.36%	49,413,858,615.00	17.56%
6	Pajak Pengambilan BGGC	3,218,385,675.00	2.26%	8,020,160,325.00	4.51%	9,319,498,650.00	3.31%
7	Pajak Parkir	851,570,412.00	0.60%	856,018,282.00	0.48%	1,046,226,931.20	0.37%
8	Pajak BPHTB	49,237,392,683.00	34.50%	61,420,703,546.28	34.54%	82,359,380,085.00	29.27%
9	Pajak Air tanah (SDAEM)	1,441,196,381.64	1.01%	1,872,954,477.56	1.05%	2,026,756,684.81	0.72%
10	Pajak Bumi dan Bangunan	-	0.00%	-	0.00%	57,609,592,471.00	20.47%
Realisasi PAD		**142,698,407,280**	**100%**	**177,835,870,150**	**100%**	**281,385,141,224**	**100%**

No	Jenis Pajak	Kontribusi Rata-Rata
1	Pajak Hotel	21.00%
2	Pajak Restoran	10.09%
3	Pajak Hiburan	3.57%
4	Pajak Reklame	9.08%
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	33.12%
6	Pajak Pengambilan BGGC	2.13%
7	Pajak Parkir	0.75%
8	Pajak BPHTB	32.77%
9	Pajak Air tanah (SDAEM)	0.93%
10	Pajak Bumi dan Bangunan	20.47%

No	Jenis Penerimaan	Rasio Kontribusi						Rata-rata Kontribusi
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pajak Hotel	23.80%	25.60%	27.88%	15.86%	18.12%	14.75%	21.00%
2	Pajak Restoran	10.94%	10.74%	12.65%	9.29%	9.42%	7.48%	10.09%
3	Pajak Hiburan	5.82%	5.12%	4.71%	1.90%	2.14%	1.75%	3.57%
4	Pajak Reklame	13.35%	12.68%	11.24%	6.53%	6.38%	4.32%	9.08%
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	44.12%	43.90%	41.71%	28.05%	23.36%	17.56%	33.12%
6	Pajak Pengambilan BGGC	0.90%	0.93%	0.87%	2.26%	4.51%	3.31%	2.13%
7	Pajak Parkir	1.07%	1.02%	0.96%	0.60%	0.48%	0.37%	0.75%
8	Pajak BPHTB	-	-	-	34.50%	34.54%	29.27%	32.77%
9	Pajak Air tanah (SDAEM)	-	-	-	1.01%	1.05%	0.72%	0.93%
10	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	20.47%	20.47%